

Kata Pengantar

Laporan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Negara-Negara - [2005](#)
Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi dan Pekerja
8 Maret, 2006

Semua laki-laki dan perempuan menginginkan dan berhak hidup bermartabat dan dalam kebebasan. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Bush: "Kemajuan kebebasan adalah kisah besar zaman kita." Menggalakkan hak asasi dan demokrasi adalah suatu fenomena sejagat dan terdapat suatu diskusi global yang kian meningkat tentang demokrasi dan nilai-nilai universal yang dilindungi oleh kekuasaan pemerintahan demokratis.

Makin meningkatnya permintaan akan pemerintahan demokratis mencerminkan pengakuan bahwa penjamin terbaik hak asasi adalah demokrasi yang berkembang subur, lembaga-lembaga pemerintah yang representatif dan bertanggungjawab, persamaan hak berdasarkan tertib hukum, suatu masyarakat madani yang sehat dan kuat, pluralisme politik, dan media yang bebas.

Amerika Serikat bersama negara-negara bebas lainnya mengemban tugas membela hak asasi dan membantu menyebar luaskan hikmah demokrasi. Kita harus membantu negara-negara mengembangkan lembaga demokrasi yang akan menjamin dihormatinya hak asasi dalam jangka panjangnya. Kita harus membantu demokrasi yang rapuh menegakkan kehidupan yang lebih baik bagi para warganya. Kita harus menghimbau negara-negara supaya bertanggungjawab apabila mereka mundur dari komitmen hak asasi internasional. Dan kita harus selalu berdiri bersama-sama dalam semangat solidaritas bersama laki-laki dan perempuan diseluruh dunia yang hidup dalam ketakutan, namun memimpikan kebebasan.

Dengan membela dan memajukan prinsip-prinsip hak asasi dan demokrasi, kita menaruh kepercayaan terhadap nilai-nilai negara yang paling kita junjung tinggi dan meletakkan landasan bagi perdamaian yang langgeng. Memenuhi janji Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan membina demokrasi diseluruh dunia yang berkembang subur akan makan waktu beberapa generasi, namun hal itu adalah tugas paling mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda.

Dengan pemikiran ini, saya dengan gembira menyampaikan *Laporan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Negara-Negara 2005*, Departemen Luar Negeri kepada Kongres Amerika Serikat. .

Condoleezza Rice
Menteri Luar Negeri

Pendahuluan

Laporan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Negara-Negara - [2005](#)
Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi dan Pekerja
8 Maret, 2006

Laporan ini menguraikan kinerja 196 negara dalam mempraktekkan komitmen internasional mereka terhadap hak asasi manusia. Hak-hak mendasar ini, yang tercermin dalam Deklarasi Universal PBB mengenai Hak Asasi Manusia, telah dianut oleh rakyat dari setiap kebudayaan dan warna kulit, setiap latar belakang dan kepercayaan, dan merupakan apa yang dikatakan oleh presiden Bush "tuntutan martabat manusia yang tidak dapat ditawar-tawar."

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menerbitkan laporan penyelenggaraan hak asasi manusia negara-negara tahunan pertama pada tahun 1977 sesuai dengan mandat Kongres, dan hal itu sudah menjadi sebuah unsur penting dari upaya Amerika Serikat untuk menggalakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Selama hampir tiga dasawarsa, laporan itu, telah berfungsi sebagai suatu dokumen rujukan dan landasan bagi tindakan kerjasama diantara pemerintah, organisasi, dan pribadi yang berusaha mengakhiri pelanggaran dan memperkuat kemampuan negara-negara ini untuk melindungi hak-hak mendasar setiap orang.

Membela hak asasi manusia diseluruh dunia bukanlah suatu upaya untuk memaksakan nilai-nilai asing terhadap warga negara-negara lain atau mencampuri masalah dalam negeri mereka. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menghimbau "setiap individu dan unsur masyarakat supaya menggalakkan penghormatan atas hak-hak dan kebebasan ini, serta melalui langkah-langkah progresif , nasional maupun internasional menjamin pengakuan dan pematuhannya secara universal dan efektif ..."

Presiden Bush memberi komitmen Amerika Serikat untuk bekerjasama dengan demokrasi-demokrasi lainnya, serta laki-laki dan perempuan yang berkemauan baik di seluruh dunia guna mencapai tujuan jangka panjang bersejarah yakni "berakhirnya tirani di dunia kita."

Memang benar, pelanggaran-pelanggaran hak asasi dan penyalahgunaan keadilan bisa dan memang terjadi di negara-negara demokrasi. Tidak ada sistem pemerintahan tanpa kelemahan. Kondisi hak asasi di seluruh dunia berbeda-beda dan laporan masing-masing Negara mencerminkan fakta tersebut, khususnya sistem demokrasi yang akarnya dangkal dan sumberdayanya langka tidak bisa memenuhi komitmen tulus mereka kepada para warganya, termasuk komitmen terhadap hak asasi. Peralihan demokratik dapat berlangsung kacau dan menegangkan. Korupsi yang meraja lela dapat memundurkan perkembangan demokrasi, merusak proses peradilan dan memusnahkan kepercayaan umum. Meskipun demikian, secara keseluruhan negara-negara dengan sistem demokratik memberi perlindungan jauh lebih besar terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi dibandingkan negara-negara yang tidak demokratik.

Perjalanan Amerika Serikat sendiri menuju kebebasan dan keadilan bagi semua rakyatnya lama dan sukar dan masih jauh dari sempurna. Namun dengan berlalunya waktu, cabang-cabang independen pemerintah, media kami yang bebas, keterbukaan kami pada dunia, dan, yang paling penting, keberanian umum dari para patriot Amerika yang tidak kenal lelah, membantu kami berpegang teguh pada cita-cita pembentukan Amerika Serikat dan kewajiban hak asasi internasional kami.

Laporan ini memberikan landasan faktual untuk menilai kemajuan yang tercapai mengenai hak asasi dan tantangan yang masih tinggal. Laporan itu meninjau kinerja setiap negara pada tahun 2005, bukannya membandingkan kinerja satu negara terhadap negara lainnya. Sementara setiap laporan mengemukakan kondisi hak asasi di negara masing-masing, observasi singkat dapat dilakukan. Enam pengamatan yang luas, didukung oleh contoh-contoh spesifik negara itu, digaribawahi di bawah ini. Contoh-contoh itu sifatnya sebagai ilustrasi, dan tidak menyeluruh.

Pertama, negara dimana kekuasaan terpusat ditangan penguasa yang tidak dapat diminta pertanggungjawabnya cenderung merupakan pelanggar hak asasi yang paling sistematis didunia. Negara-negara seperti ini terdiri dari negara dengan sistem tertutup, totaliter, yang mengabaikan hak-hak mendasar rakyatnya, sampai ke negara dengan sistem otoriter dimana pelaksanaan hak-hak mendasar di batasi secara ketat.

Pada tahun 2005 Republik Demokrasi Rakyat Korea (Korea Utara) masih merupakan salah satu negara yang paling terkucil di dunia. Rejim penindas secara sistematis terus menguasai hampir semua aspek kehidupan warganya, tidak memberikan kebebasan berbicara, beragama, berhimpun, berasosiasi, berpindah, menyelenggarakan pers bebas, dan juga tidak memberi hak-hak pekerja. Pada bulan Desember 2005, rejim itu lebih mengucilkan diri lagi dengan mengurangi secara signifikan kehadiran organisasi swadaya masyarakat internasional (NGO) di negara itu.

Di Birma dimana junta militer berkuasa lewat kediktatoran, janji-janji reformasi demokratik dan penghormatan terhadap hak asasi dimanfaatkan sebagai tameng untuk melakukan kekejaman dan penindasan. Kerja paksa, perdagangan manusia, penggunaan anak-anak sebagai tentara dan diskriminasi agama tetap menjadi keprihatinan yang serius. Militer melanjutkan pelanggaran termasuk pemerkosaan yang sistematis, penyiksaan, eksekusi dan pemindahan secara paksa warga etnis minoritas. Rejim ini mempertahankan pengendalian tangan besi melalui pengawasan, ancaman dan pemenjaraan para aktivis politik , termasuk pemenang hadiah Nobel dan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, yang terus dikenakan tahanan rumah tanpa dikenakan tuduhan.

Pada tahun 2005, catatan hak asasi dan demokrasi pemerintah Iran yang sudah jelek menjadi semakin buruk. Dalam pemilihan presiden Juni 2005, lebih dari seribu calon yang terdaftar – termasuk semua calon perempuan – secara sewenang-wenang dikeluarkan oleh dewan pengayom negara itu. Presiden garis keras yang baru terpilih menampik kejadian Holokos dan menyerukan bagi dihancurkannya Israel. Para ulama

yang berkuasa dan presiden bertanggung jawab atas memburuknya kondisi dalam penjara bagi ratusan tahanan politik, memberlakukan pembatasan lebih lanjut terhadap kebebasan pers, dan meneruskan pembatalan kebebasan sosial dan politik. Pelanggaran-pelanggaran yang serius seperti eksekusi yang semena-mena, pelanggaran serius terhadap kebebasan beragama, diskriminasi berdasarkan asal-usul etnis dan agama, pelenyapan orang, premanisme ekstremis, dan praktek menyiksa serta perlakuan pelanggaran lainnya terus berlangsung.

Di Zimbabwe pemerintah terus menerus menyerang martabat manusia dan kebebasan mendasar, memperketat cengkramannya terhadap organisasi swadaya masyarakat (NGO) untuk masyarakat madani dan hak asasi serta memanipulasi pemilihan parlemen bulan Maret lalu. Para anggota oposisi mengalami pelanggaran, termasuk siksaan dan pemerkosaan. Amandemen-amandemen baru konstitusi memungkinkan pemerintah membatasi orang meninggalkan negara itu, memindahkan hak milik tanah kepada Negara lewat program pemilikan tanah, dan menghapuskan hak menentang kepemilikan tanah di pengadilan. Operasi Pemulihan Keteraturan pemerintah memprakarsai pememusnahan perumahan dan bisnis yang dituduh ilegal, memindahkan atau menghancurkan kehidupan lebih dari 700 ribu orang dan semakin memperlemah ekonomi yang sudah tertekan disana.

Di Kuba rejim yang berkuasa terus mengendalikan semua aspek kehidupan lewat partai komunis dan organisasi masa yang dikuasai oleh pemerintah. Rejim yang berkuasa menindas himbauan bagi reformasi demokratik, seperti Proyek Varela, yang mengusulkan suatu referendum nasional. Pihak berwajib menangkap, menahan, mendenda dan mengancam aktivis Varela dan pemerintah menangkap setidaknya 333 tahanan politik dan tahanan lainnya.

Catatan hak asasi Cina tetap buruk, dan pemerintah terus melakukan pelanggaran yang serius. Mereka yang secara terbuka menentang kebijakan atau pandangan pemerintah Cina atau memprotes menentang wewenang pemerintah menghadapi gangguan, penahanan dan pemenjaraan oleh pemerintah dan penguasa keamanan. Gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum dan protes yang menghimbau agar keluhan didengarkan meningkat secara signifikan dan beberapa kejadian ditindas dengan kekerasan. Langkah-langkah utama untuk meningkatkan wewenang peradilan dan mengurangi kekuasaan arbiter polisi dan pasukan keamanan mengalami kebuntuan. Pembatasan media dan internet terus berlangsung. Penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas terus berlangsung, khususnya terhadap suku Uighur dan Tibet. Undang-undang agama baru yang memperluas perlindungan hukum bagi kegiatan tertentu dari kelompok-kelompok agama terdaftar diloloskan, tetapi penindasan terhadap kelompok-kelompok agama tidak terdaftar terus berlangsung, seperti penindasan terhadap gerakan spiritual Falun Gong.

Di Belarus Presiden Lukashenko terus mengambil alih semua kekuasaan bagi dirinya dan rejim kediktatorannya. Para aktifis pro demokrasi termasuk politisi yang beroposisi, pemimpin serikat pekerja independen, mahasiswa dan redaksi surat kabar ditangkap, didenda dan dipenjarakan karena mengecam Lukashenko dan rejimnya. Pemerintahnya semakin meningkatkan pemeriksaan pajak dan persyaratan pendaftaran baru untuk mempersulit atau melarang organisasi swadaya masyarakat (NGO), media independen, partai-partai politik serta organisasi-organisasi minoritas dan agama, sehingga mereka tidak mampu beroperasi secara legal.

Kedua, hak asasi dan demokrasi terkait erat, dan keduanya penting bagi stabilitas dan keamanan jangka panjang. Negara-negara bebas dan demokratik yang menghormati hak-hak rakyatnya membantu meletakkan landasan bagi perdamaian yang langgeng. Sebaliknya, negara-negara yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi rakyatnya sendiri kemungkinan besar menimbulkan ancaman terhadap negara tetangga dan masyarakat internasional.

Birma merupakan suatu kasus seperti ini. Hanya dengan kembalinya Birma ke jalur demokratik maka hak-hak dasar rakyat Birma bisa diselenggarakan. Yunta militer menolak mengakui hasil pemilihan badan legislative bersejarah pada tahun 1990 yang bebas dan jujur. Kesalahan pemerintah dari rejim yang kejam dan merusak ini telah mengakibatkan penderitaan berat bagi rakyat Birma, dan menyebabkan atau memperburuk sejumlah kesulitan untuk tetangga-tetangganya, mulai dari membanjirnya pengungsi sampai ke penyebaran penyakit-penyakit menular serta perdagangan narkoba dan manusia. Pada tanggal 16 Desember, Dewan Keamanan PBB menyelenggarakan diskusi bersejarah mengenai situasi di Birma.

Republik Demokrasi Rakyat Korea (DPRK) merupakan contoh lainnya. Ketika semenanjung Korea terpecah dua, DPRK dan Republik Korea (ROK atau Korea Selatan) kurang lebih berada pada posisi ekonomi yang sama dan keduanya berada di bawah pemerintahan otoriter. Kebebasan politik dan ekonomi menyebabkan

perbedaan diantara kedua negara. Kini, rakyat Korea Utara tidak menikmati sebagian besar kebebasan mendasar, sementara pemerintahan rejim otoriter menyebabkan timbulnya puluhan ribu pengungsi. Pemerintah mendapatkan devisa melalui kegiatan-kegiatan ilegal termasuk perdagangan narkoba, pemalsuan mata uang dan barang-barang seperti rokok, dan penyelundupan. Pyongyang tidak mengindahkan himbauan berulang-ulang dari masyarakat internasional supaya membongkar program nuklirnya.

Pemerintah Iran terus mengabaikan keinginan rakyat Iran bagi sebuah pemerintahan yang bertanggungjawab, meneruskan kebijakan yang berbahaya untuk memperoleh kemampuan memiliki senjata nuklir, memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi teroris dan menganjurkan – termasuk dalam beberapa pidato terbuka oleh presidennya yang baru – pemusnahan satu negara anggota PBB. Kebijakan Iran yang tidak memberikan hak-hak mendasar kepada rakyatnya, campur tangan di Irak, dukungan kepada Hizbullah, Hamas dan organisasi teroris lainnya, serta penolakannya berunding secara konstruktif mengenai isu-isu tersebut telah menyebabkan negara itu semakin terkucil dari masyarakat internasional.

Begitu juga, pemerintah Suriah menolak himbauan internasional supaya menghormati kebebasan mendasar rakyatnya dan mengakhiri campurtangannya dalam masalah tetangga-tetangganya. Suriah terus memberikan dukungan kepada Hizbullah, Hamas dan kelompok-kelompok pembangkang Palestina lainnya dan tidak bekerjasama sepenuhnya dengan Komisi Penyelidik Independen Internasional PBB mengenai pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri. Laporan Kepala Penyelidik menyimpulkan bukti-bukti menunjukkan keterlibatan penguasa Suriah dan menjelaskan bahwa para pejabat Suriah sementara berpura-pura memberikan kerjasama, dengan sengaja menyesatkan para penyelidik.

Sebaliknya, di negara-negara Balkan, perbaikan keseluruhan yang nyata dalam hak asasi, demokrasi dan tertib hukum selama beberapa tahun yang lalu telah mengarah pada stabilitas dan keamanan yang lebih tinggi di wilayah itu. Semakin banyak pemerintah yang demokratis berkuasa, semakin banyak penjahat perang dihadapkan ke pengadilan, sejumlah orang yang kehilangan tempat tinggal telah kembali ke rumah mereka, pemilihan secara progresif yang semakin mematuhi standar internasional, serta negara-negara bertetangga memperdalam kerjasama mereka untuk memecahkan masalah pasca-konflik dan masalah regional. Banyak negara yang dulunya anggota federasi Yugoslavia mencapai kemajuan dalam hal menyeret orang-orang yang dikenakan tuduhan kejahatan perang ke pengadilan, hal ini penting bagi rekonsiliasi nasional dan stabilitas regional. Namun pada akhir tahun 2005, dua buronan penjahat perang yang paling dicari-cari, Radovan Karadzic dan Ratko Mladic, masih bebas berkeliaran.

Ketiga, sebagian dari pelanggaran hak asasi yang paling gawat dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dalam konteks konflik bersenjata dalam negeri dan/atau lintas tapal batas. Usaha pemerintah Sudan pada tahun 2003 untuk menumpas pembontakan kecil oleh pembontak Afrika di Darfur dengan mempersenjatai milisi *janjaweed*, dan membiarkan mereka memporak-porandakan wilayah itu telah menimbulkan suatu konflik yang ganas. Departemen luar negeri Amerika Serikat pada bulan September 2004 menetapkan bahwa genosida terjadi di Darfur. Peristiwa itu berlanjut terus pada tahun 2005. Pada akhir 2005 paling sedikit 70 ribu orang penduduk sipil tewas, hampir 2 juta orang kehilangan tempat tinggal karena pertempuran, dan lebih dari 200 ribu pengungsi melarikan diri ke negara tetangga Chad. Penyiksaan merajalela dan sistematis di Darfur, begitu juga tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan yang digunakan sebagai alat perang. Terdapat laporan perempuan disuruh berjalan kaki ke gurun pasir; nasib mereka tidak diketahui. Perjanjian Perdamaian Menyeluruh yang ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan membuka jalan untuk meloloskan konstitusi pada bulan Juli dan membentuk sebuah pemerintah persatuan nasional yang akan memerintah sampai pemilihan pada tahun 2009. Uni Afrika mengerahkan tujuh ribu pasukan ke Darfur, dimana kehadiran mereka membantu membendung sebagian, tetapi tidak semua, tindak kekerasan. Pada akhir 2005, serangan-serangan terhadap penduduk sipil oleh *janjaweed* yang didukung pemerintah terus berlangsung.

Catatan hak asasi Nepal yang buruk juga semakin memburuk. Pemerintah terus melakukan pelanggaran serius, baik pada waktu maupun sesudah keadaan darurat Pebruari - April yang menangguhkan semua hak mendasar kecuali habeas corpus (hak untuk diperiksa di depan hakim). Dalam kebanyakan kasus pemerintah mengabaikan perintah habeas corpus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan sering menahan kembali mahasiswa dan pemimpin partai politik. Kaum pemberontak Mao juga melanjutkan kampanye mereka menyiksa, membunuh, mengebom, merekrut anak-anak untuk dijadikan tentara, menculik, memeras, dan memaksa penutupan sekolah-sekolah dan bisnis.

Krisis politik di Pantai Gading, yang terus memecah negara itu, menjurus pada pelanggaran lebih lanjut pada tahun 2005, termasuk pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan keamanan pemerintah dan pemberontak. Tidak banyak lagi laporan tentang perekrutan serdadu anak-anak dan banyak yang sudah dibebaskan. Kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap pihak oposisi politik terus berlangsung. Meskipun usaha masyarakat internasional dan Uni Afrika diteruskan, proses politik untuk menegakkan sebuah pemerintahan melalui pembagian kekuasaan mengalami kemacetan. Pada akhir September hanya sedikit yang berhasil dirampungkan untuk persiapan pemilihan yang direncanakan berlangsung pada tanggal 30 Oktober, dan perlucutan senjata kelompok pemberontak Pasukan Baru belum dimulai. Pada tanggal 6 Oktober, Uni Eropa memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Laurent Gbagbo sampai dengan satu tahun.

Di Chechnya dan di bagian lain wilayah Kaukasus Rusia, pasukan federal dan pasukan Chechnya yang pro-Moskow terlibat dalam pelanggaran termasuk penyiksaan, eksekusi dengan semena-mena, penyalpungan dan penangkapan dengan sewenang-wenang. Para-militer Chechnya yang pro-Moskow kadang-kadang bertindak lepas dari struktur komando pasukan Rusia dan tidak terlihat indikasi bahwa pihak berwajib pemerintah federal melakukan sesuatu upaya yang efektif untuk mengontrol mereka atau membuat mereka bertanggungjawab atas pelanggaran yang sangat buruk. Pasukan anti-pemerintah juga terus melakukan pengeboman-engeboman teroris dan pelanggaran-pelanggaran gawat hak asasi di Kaukasus Utara. Pada tahun 2005 kita menyaksikan berlanjutnya penyebaran tindak kekerasan dan pelanggaran di seluruh wilayah itu, dimana secara keseluruhan ditemukan iklim dimana tertib hukum langka dan korupsi merajalela.

Wilayah Danau Besar di Afrika Tengah, yang meliputi Republik Demokrasi Kongo, Rwanda, Burundi dan Uganda telah diamuk oleh perang saudara, tindak kekerasan antar etnis berskala besar dan kemelut yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi yang gawat selama lebih dari satu dasawarsa. Namun demikian secara keseluruhan tindak kekerasan berkurang pada tahun 2005 dan situasi hak asasi bertambah baik secara nyata, mendorong puluhan ribu orang yang kehilangan tempat tinggal, terutama rakyat Burundi, kembali pulang. Burundi mengakhiri proses peralihan empat tahun dan terdapat kemajuan yang bersejarah, yakni pemilihan di Republik Demokratik Kongo. Pemerintah-pemerintah di wilayah Danau Besar mencapai kemajuan yang signifikan dalam mendemobilisasikan ribuan serdadu anak-anak dari pasukan militer mereka dan mereka yang jadi anggota berbagai kelompok pemberontak. Bersamaan dengan itu, berbagai kelompok bersenjata yang berpangkalan di Kongo Timur terus memporak porandakan wilayah itu dan bersaing satu sama lainnya memperebutkan sumberdaya strategik dan sumberdaya alam, meskipun ada operasi militer Kongo yang didukung oleh PBB untuk membubarkan kelompok-kelompok bersenjata di Republik Demokrasi Kongo. Ribuan pemberontak dari Rwanda, Uganda, dan Burundi, termasuk pemberontak Rwanda yang mempelopori pembantaian rakyat Rwanda 1994, terus menentang pemerintah di negara mereka masing-masing, menyerang orang-orang sipil di Republik Demokrasi Kongo dan melakukan sejumlah pelanggaran gawat, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Pemerintah Rwanda dan Uganda dilaporkan secara ilegal terus menyalurkan senjata kepada kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi dan melakukan pelanggaran yang serius di bagian timur Republik Demokrasi Kongo.

Di Kolombia, pelanggaran hak asasi berkaitan dengan kemelut bersenjata internal yang sudah berlangsung selama 41 tahun masih terjadi. Namun demikian, pemerintah memusatkan ofensif militer terhadap kelompok-kelompok bersenjata ilegal dan demobilisasi kelompok paramiliter yang sedang berjalan menjurus pada berkurangnya pembunuhan dan penculikan. Kolombia juga memulai proses empat tahun untuk menerapkan kode prosedur kriminal yang baru. Namun begitu, kekebalan dari hukuman tetap menjadi hambatan besar, khususnya bagi para pejabat yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi dimasa lalu, serta terhadap para anggota militer yang bekerjasama dengan kelompok para-militer.

Keempat, dimana masyarakat madani dan media independen diserang, kebebasan mendasar mengeluarkan pendapat, berasosiasi dan berhimpun terhambat. Sebuah masyarakat madani yang sehat dan kuat serta media masa yang independen membantu menciptakan kondisi dimana hak asasi dapat berkembang subur lewat peningkatan kesadaran dikalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka, membeberkan pelanggaran, mendesak pembaharuan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Pemerintah hendaklah membela – bukan melanggar – penyelenggaraan secara damai kebebasan mendasar oleh anggota media dan masyarakat madani meskipun mereka tidak setuju dengan pandangan atau tindakan mereka. Pembatasan yang diberlakukan undang-undang terhadap penyelenggaraan kebebasan demikian hanya dapat dibenarkan sejauh hal itu konsisten dengan kewajiban hak asasi sebuah negara dan bukan sekedar alasan yang dibuat-buat untuk membatasi hak-hak seperti itu

Apabila negara memanfaatkan undang-undang sebagai senjata politik atau suatu alat penindasan terhadap masyarakat madani dan media, mereka memerintah lewat undang-undang dan bukannya menegakkan tertib hukum. Tertib hukum berfungsi sebagai kendali terhadap kekuasaan negara, yakni hal itu merupakan sistem yang dirancang untuk melindungi hak asasi seseorang terhadap kekuasaan negara. Sebaliknya, tertib hukum bisa berubah menjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan, yakni memanipulasi hukum dan sistem peradilan untuk mempertahankan kekuasaan para penguasa terhadap yang dikuasai.

Pada tahun 2005, negara-negara, dalam jumlah yang merisaukan, diseluruh dunia meloloskan atau secara selektif memberlakukan undang-undang terhadap media dan organisasi swadaya masyarakat (NGO). Misalnya:

Pemerintah Kamboja memanfaatkan undang-undang kejahatan fitnah yang ada untuk mengancam, menangkap dan menuntut di peradilan pengecam dan anggota oposisi dalam kurun tahun berjalan.

Cina meningkatkan pembatasan media dan internet, menjurus pada dua penangkapan yang diketahui.

Pemerintah Zimbabwe menangkap orang-orang yang mengancam presiden Mugabe, mengganggu dan secara sewenang-wenang menahan wartawan, menutup sebuah surat kabar independen, membubarkan secara paksa para demonstran, serta menangkap dan menahan pemimpin oposisi serta para pendukung mereka.

Di Venezuela undang-undang baru yang mengatur pencemaran nama, fitnah, dan isi media siaran dibarengi dengan gangguan dan intimidasi fisik, menyebabkan pembatasan terhadap kebebasan media masa dan tercipta suatu iklim penyensoran diri. Masih ada laporan bahwa wakil pemerintah dan pendukungnya melakukan intimidasi dan mengancam anggota fihak oposisi, beberapa organisasi swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hak asasi, dan kelompok masyarakat madani lainnya. Beberapa organisasi swadaya masyarakat (NGO) juga menuduh bahwa pemerintah memanfaatkan peradilan guna membatasi oposisi politik.

Di Belarus pemerintah Lukashenko meningkatkan penindasan terhadap kelompok-kelompok oposisi dan mengenakan pembatasan baru terhadap masyarakat madani. Terdapat penangkapan-penangkapan bermotifkan politik, beberapa surat kabar independen ditutup, operasi surat kabar lainnya dihalangi dan organisasi swadaya masyarakat (NGO) diganggu.

Di Russia serbuan terhadap kantor-kantor NGO, masalah pendaftaran, intimidasi para pemimpin NGO dan stafnya, serta masalah visa bagi pekerja asing NGO menimbulkan dampak negatif, begitu juga dengan diloloskannya oleh parlemen sebuah undang-undang pembatasan baru terhadap NGO. Kremlin juga bertindak membatasi kritik dalam media. Pemerintah mengurangi keragaman media siaran, terutama televisi, sumber berita utama bagi mayoritas rakyat Rusia. Pada akhir tahun 2005, semua stasiun televisi nasional yang independen telah diambil alih oleh negara atau organisasi yang pro-negara.

Kelima, pemilihan demokratis dengan sendirinya tidak menjamin bahwa hak asasi akan dihormati, tetapi hal itu dapat menempatkan sebuah negara pada jalur pembaharuan dan meletakkan landasan untuk pelembagaan perlindungan hak asasi. Namun pemilihan demokratis merupakan batu loncatan dalam menempuh perjalanan panjang menuju demokratisasi. Hal itu penting untuk mendirikan pemerintahan yang bertanggung jawab dan lembaga-lembaga pemerintah yang mematuhi tertib hukum serta tanggap terhadap kebutuhan warganegaranya.

Di Iraq tahun 2005 merupakan tahun dengan kemajuan besar bagi demokrasi, hak-hak dan kebebasan demokratis. Terdapat pertumbuhan yang mantap dari organisasi swadaya masyarakat (NGO) serta asosiasi masyarakat madani yang mempromosikan hak asasi. Pemilihan legislatif pada tanggal 30 Januari menandai langkah kedepan yang besar dalam mengukuhkan lembaga pemerintahan guna melindungi hak asasi dan kebebasan disebuah negara yang sejarahnya tercemar oleh pelanggaran hak asasi paling buruk di masa lalu. Dalam referendum 15 Oktober dan pemilihan 15 Desember, pemilih Irak meluluskan sebuah konstitusi permanen dan memilih anggota dari parlemen baru, Dewan Perwakilan, sehingga mengkonsolidasikan lembaga-lembaga demokratis yang menjadi kerangka untuk masa depan yang demokratis. Meskipun pemilihan bersejarah dan lembaga-lembaga pemerintahan demokratis yang baru itu menyajikan sebuah struktur untuk kemajuan nyata, kehidupan madani dan jaringan social masih berada dalam keadaan sangat tegang akibat kekerasan yang luas yang pada dasarnya ditimbulkan oleh unsur

pembrontak dan teroris. Tambahan pula, unsur-unsur milisi sektarian dan pasukan keamanan acap kali bertindak secara independen dari penguasa pemerintah. Meskipun begitu, pemerintah bertekad dan berpegang pada sebuah jalur hukum dan elektoral yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak politik.

Meskipun tidak menikmati hak asasi mendasar selama bertahun-tahun, pada tahun 2005 warga Afghanistan terus menunjukkan keberanian dan komitmen mereka pada suatu masa depan yang bebas dan dimana hak asasi dihormati. Tanggal 18 September menandai pemilihan parlemen yang pertama selama hampir tiga dasawarsa. Perempuan dengan bersemangat memberikan suara mereka dalam pemilihan tersebut, yang melibatkan 582 orang calon perempuan. Enam puluh delapan perempuan terpilih ke majelis rendah menduduki kursi-kursi yang dicadangkan untuk perempuan sesuai konstitusi 2004. Tujuh belas dari 68 perempuan itu bisa terpilih lewat usaha mereka sendiri meskipun tidak dicadangkan kursi khusus. Di majelis tinggi tujuh belas dari 34 kursi yang diangkat presiden disediakan untuk perempuan; Dewan Daerah memilih 5 perempuan tambahan yang seluruhnya berjumlah 22 perempuan. Pemilihan parlemen 18 September masih dibayangi oleh pemerintah yang masih harus berjuang untuk memperluas kewenangannya di propinsi, karena berlanjutnya ketidak-amanan dan perlawanan dengan kekerasan di beberapa tempat.

Di Ukraina terdapat perbaikan yang kentara dalam kinerja hak asasi menyusul Revolusi Oranye yang menjurus pada pemilihan pemerintahan baru yang mewakili keinginan rakyat. Pada tahun 2005 ada peningkatan pertanggungjawaban petugas polisi, dan media masa memperoleh kemajuan dalam kebebasannya. Campur tangan terhadap kebebasan berkumpul berkurang banyak, dan kebanyakan pembatasan kebebasan berhimpun dicabut. Berbagai kelompok hak asasi baik domestik maupun internasional pada umumnya beroperasi tanpa gangguan pemerintah.

Indonesia, negara berpenduduk Islam terbanyak di dunia, membuat kemajuan yang signifikan dalam memperkuat susunan sistem demokratiknya. Melalui serangkaian pemilihan lokal bersejarah, warga Indonesia secara langsung mampu memilih para pemimpinnya di tingkat kota, kabupaten dan propinsi untuk pertama kalinya. Terjadi perbaikan dalam situasi hak asasi, meskipun masalah-masalah signifikan masih ada, dan pelanggaran-pelanggaran serius terus terjadi. Suatu perkembangan penting adalah persetujuan perdamaian 15 Agustus yang bersejarah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Pemerintah juga meresmikan pembukaan Majelis Rakyat Papua dan mengambil langkah-langkah lain guna memenuhi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001.

Lebanon membuat kemajuan signifikan yang mengakhiri pendudukan militer Suriah selama 29 tahun dan memperoleh kembali kedaulatan parlemen yang terpilih secara demokratik. Namun demikian, berlanjutnya pengaruh Suriah tetap menjadi masalah.

Liberia muncul di arena demokratik internasional dengan langkah drastisnya untuk menjauh dari masa lalu yang penuh tindak kekerasan serta menuju masa depan yang bebas dan demokratik. Pada tanggal 23 Nopember, Ellen Johnson Sirleaf dinyatakan pemenang pemilihan presiden multi partai, membuatnya kepala negara Afrika perempuan pertama yang terpilih dan menandai suatu kemajuan dalam peralihan negara itu dari perang saudara menuju demokrasi. Pemerintah peralihan itu umumnya menghormati hak asasi warganya dan meluluskan undang-undang untuk memperkuat hak asasi. Namun, pelanggaran oleh polisi, korupsi para pejabat dan masalah-masalah lain tetap ada dan diperburuk oleh warisan perang saudara selama 14 tahun, termasuk kerusakan hebat dari prasarana serta meluasnya kemiskinan dan pengangguran

Keenam, kemajuan pembaharuan demokratik dan hak asasi tidak bersifat linier dan juga tidak terjamin. Beberapa negara masih mempunyai lembaga-lembaga pemerintahan demokratik yang lemah dan terus berjuang; yang lain masih harus memberikan komitmen sepenuhnya terhadap proses demokratik. Langkah-langkah maju dapat terganggu oleh ketidakberesan. Bisa terjadi kemunduran yang serius. Pemerintah yang terpilih secara demokratik tidak selalu memerintah secara demokratik saat memegang kekuasaan.

Pada tahun 2005, banyak negara yang sudah memberi komitmen pada reformasi demokratik menunjukkan kemajuan yang beragam, beberapa mengalami kemunduran.

Catatan hak asasi Republik Kyrgyzstan bertambah baik menyusul perubahan kepemimpinan antara Maret dan Juli, meskipun masih ada masalah. Presiden Akayev melarikan diri dari negara itu setelah pengunjuk rasa fihak oposisi mengambil alih gedung utama pemerintah di ibukota guna memprotes pemilihan yang curang. Pemilihan presiden bulan Juli dan pemilihan parlemen bulan Nopember mendatangkan perbaikan dalam beberapa bidang dibandingkan pemilihan sebelumnya. Tetapi reformasi konstitusi menemui kemacetan dan korupsi tetap merupakan masalah serius.

Di Ekuador, kongres disana mencopot presiden Lucio Gutierrez yang terpilih secara demokratis bulan April menyusul aksi protes besar-besaran dan penarikan dukungan para pemimpin militer dan polisi secara terbuka. Wakil Presiden Alfredo Palacio menggantikan Gutierrez, dan pemilihan baru dijadwalkan untuk tahun 2006.

Sungguhpun pemerintah peralihan Republik Demokrasi Kongo menunda pemilihan umum nasional sampai 2006, negara itu menyelenggarakan pemungutan suara nasional pertama secara demokratis dalam kurun waktu 40 tahun. Pemilih dengan selisih suara yang besar menyetujui konstitusi baru dalam sebuah referendum nasional yang sebahagian besar berlangsung bebas dan adil, meskipun ditemukan beberapa ketidak beresan.

Pada bulan Juni, parlemen Uganda meluluskan sebuah amandemen yang kontroversial yang menghapus pembatasan masa jabatan presiden, meratakan jalan bagi Presiden Museveni untuk memegang masa jabatan ketiga. Tetapi rakyat dalam sebuah referendum nasional memilih untuk menyetujui sebuah pemerintahan multi partai dan parlemen melakukan amandemen undang-undang pemilihan yang melibatkan partisipasi partai oposisi dalam pemilihan dan pemerintahan.

Pemerintah Mesir melakukan amandemen terhadap konstitusinya untuk memungkinkan pemilihan presiden multi partai pertama negara itu pada bulan September. Sepuluh partai politik mengajukan calon, dan masa kampanye ditandai oleh perdebatan publik yang bersemangat serta kesadaran politik dan keterlibatan yang lebih besar. Tetapi pemilih yang memberikan suara rendah, dan ada laporan kredibel mengenai banyak kecurangan pada waktu pemungutan suara. Calon dengan jumlah suara ke 2 terbanyak dalam pemilihan presiden, Ayman Nour, dicabut kekebalan parlemennya pada bulan Januari, dijatuhi hukuman penjara sampai lima tahun atas tuduhan pemalsuan pada bulan Desember setelah berlangsung sidang pengadilan selama enam bulan yang tidak memenuhi standar internasional mendasar. Pemilihan parlementer bulan Nopember dan Desember memperlihatkan kemajuan signifikan bagi para kandidat yang berafiliasi dengan Persaudaraan Muslim yang dilarang. Pemilihan-pemilihan ini dicemari kekerasan berlebihan oleh pasukan keamanan, jumlah pemilih yang rendah, dan kecurangan dalam penghitungan suara. Pemerintah menolak kehadiran pengamat internasional baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan parlemen. Dewan Nasional untuk Hak Asasi, yang dibentuk oleh parlemen Mesir, mengeluarkan laporan tahunannya yang pertama, yang secara blak-blakan menguraikan pelanggaran pemerintah.

Pada waktu pemilihan anggota parlemen Ethiopia pada bulan Mei, para pengamat internasional mencatat sejumlah ketidakberesan dan intimidasi terhadap para pemilih. Puluhan demonstran yang memprotes pemilihan itu terbunuh oleh pasukan keamanan. Pihak berwajib menangkap, memukuli dan membunuh para anggota oposisi, para petugas NGO, golongan etnis minoritas dan anggota pers.

Pemilihan parlemen Azerbaijan diselenggarakan pada bulan Nopember, sementara terlihat kemajuan dalam beberapa bidang, pemilihan itu tidak memenuhi sejumlah standar internasional. Terdapat sejumlah laporan kredibel dimana pejabat lokal mencampuri proses kampanye dan menyalahgunakan sumberdaya negara, membatasi kebebasan berhimpun, penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi untuk mengganggu rapat-rapat umum, dan kecurangan serta ketidakberesan besar dalam penghitungan dan tabulasi suara. Sejauh ini tindakan tambahan yang diambil, yakni proses penampungan keluhan pasca-pemilihan, tidak sepenuhnya menjawab kekurangan proses pemilihan itu.

Kazakhstan memperlihatkan perbaikan dalam periode pra-pemilihan presiden bulan Desember, tetapi secara keseluruhan tidak memenuhi standar internasional pemilihan yang bebas dan adil. Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Kantor Lembaga Demokratik dan Hak Asasi Manusia Uni Eropa mencatat pembatasan-pembatasan serius yang terhadap pidato politik, dimana beberapa jenis kritik terhadap presiden dilarang, perbedaan akses ke media diberlakukan terhadap para calon fihak oposisi dan independen, dan gangguan tindak kekerasan dalam kampanye-kampanye pihak oposisi. Undang-undang yang diterapkan pada tahun 2005, khususnya undang-undang mengenai ekstremisme, amandemen keamanan nasional, serta amandemen undang-undang pemilihan, mengurangi perlindungan hak asasi dan

memperluas kekuasaan cabang eksekutif untuk mengatur dan mengontrol masyarakat madani dan media. Tetapi Mahkamah Konstitusional memutuskan bahwa undang-undang pembatasan NGO tidak konstitusional.

Catatan hak asasi Uzbekistan yang sudah buruk, semakin memburuk pada tahun 2005. Pembangkangan yang dijawab dengan tindak kekerasan di kota Andijon pada bulan Mei, menjurus pada penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh pihak berwajib, dan gelombang penindasan oleh pemerintah mendominasi peristiwa di sisa tahun itu. Kebangkitan itu bermula dari serangkaian aksi protes damai setiap hari yang mendukung pengusaha yang diadili antara bulan Pebruari dan Mei atas tuduhan ekstremisme Islam. Pada malam 12-13 Mei, beberapa orang yang tidak dikenal merebut senjata dari sebuah stasiun polisi, menyerbu penjara kota itu dimana para tersangka ditahan, menewaskan beberapa orang pengawal dan membebaskan ratusan nara pidana, termasuk para tersangka. Kemudian mereka menduduki gedung administrasi regional dan melakukan penyanderaan. Pada tanggal 13 Mei, menurut laporan saksi mata pasukan pemerintah menembakkan senjata secara membabi-buta ke arah khalayak ramai yang tidak bersenjata, menyebabkan ratusan orang tewas. Usai kejadian itu, pemerintah mengancam, memukuli dan memenjarakan puluhan orang aktivis hak asasi, wartawan, dan yang melaporkan peristiwa tersebut serta menghukum penjara sejumlah orang dalam peradilan yang tidak memenuhi standar internasional. Pemerintah memaksa penutupan sejumlah NGO domestik dan internasional serta membatasi secara ketat NGO yang masih beroperasi.

Di Rusia, upaya terus dilakukan untuk memusatkan kekuasaan di Kremlin dan demokrasi langsung dari atas ke bawah. Untuk mencapai tujuan ini, Kremlin menghapuskan pemilihan langsung gubernur dan menggantikannya dengan penunjukan oleh Presiden dan persetujuan badan legislatif. Dalam konteks Rusia sekarang, dimana proses cek dan balans nya lemah, sistem ini membatasi pertanggungjawaban pemerintah kepada pemilih sementara lebih memusatkan kekuasaan pada cabang eksekutif. Amandemen terhadap undang-undang elektoral dan partai politik, yang dicanangkan untuk memperkuat partai politik diseluruh negara dalam jangka panjangnya, sebenarnya dapat mengurangi kemampuan partai-partai oposisi untuk bersaing dalam pemilihan. Kecenderungan ini, bersama pembatasan media yang terus berlangsung, parlemen yang patuh, korupsi, secara selektif memberlakukan undang-undang, tekanan politik terhadap kehakiman, dan gangguan terhadap beberapa NGO, menyebabkan rapuhnya pertanggungjawaban pemimpin pemerintah kepada rakyat.

Catatan hak asasi Pakistan tetap buruk, meskipun ada pernyataan komitmen pada peralihan demokratik dan sikap "pencerahan moderat" oleh Presiden Musharraf. Pembatasan tetap diberlakukan terhadap kebebasan bergerak, mengeluarkan pendapat, berasosiasi dan beragama. Kemajuan demokratisasi terbatas. Dalam pemilihan pemerintahan lokal pada tahun 2005, pengamat internasional dan domestik menemukan penyelewengan yang serius, termasuk campur tangan oleh partai-partai politik yang mempengaruhi hasil pemungutan suara di beberapa bagian negara itu. Polisi menangkap hampir 10 ribu aktivis Partai Rakyat Pakistan pada bulan April menjelang kedatangan suami Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari untuk menghadiri rapat umum. Pasukan keamanan melakukan pembunuhan, pelanggaran atas proses peradilan, menangkap dengan semena-mena dan menyiksa. Korupsi meluas di kalangan pemerintahan dan pasukan polisi, serta pemerintah tidak berupaya banyak untuk memerangi permasalahannya. Pejabat pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran hak asasi pada umumnya menikmati kekebalan hukum de facto.

Meskipun kenyataan-kenyataan yang diuraikan diatas dan kendala yang tinggi, terdapat tuntutan yang semakin meningkat di seluruh dunia bagi kebebasan pribadi dan politik yang lebih besar, serta bagi penyebarluasan prinsip-prinsip demokrasi. Misalnya, untuk wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yang Lebih Luas (BMENA), tahun-tahun terakhir ini telah menyaksikan awal dari pluralisme politik, pemilihan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlindungan baru untuk perempuan, dan kelompok minoritas, serta himbauan penduduk asli bagi perubahan demokratik yang damai.

Dalam Forum bagi Masa Depan Nopember 2005 yang berlangsung di Manama, Bahrain, 40 pemimpin yang mewakili organisasi madani dari 16 negara anggota BMENA ikut serta didampingi menteri luar negeri mereka. Pemimpin masyarakat madani ini merumuskan seperangkat prioritas yang dipusatkan pada tertib hukum, transparansi, hak asasi dan pemberdayaan perempuan. Diantara mereka yang turut dalam delegasi masyarakat madani itu adalah wakil dari Dialog Bantuan Demokrasi (DAD) yang mempresentasikan hasil diskusi serta perdebatan yang berlangsung selama setahun antara pemimpin masyarakat madani dan counterpart pemerintah mereka perihal topik yang penting seperti reformasi pemilihan dan pembangunan partai politik yang sah. Jaringan DAD yang semakin berkembang termasuk

ratusan pemimpin masyarakat madani dari wilayah BMENA. Untuk mendukung secara lebih baik upaya reformasi di wilayah itu, sebuah Yayasan untuk Masa Depan guna mendukung langsung masyarakat madani dan sebuah Dana Masa Depan untuk mendukung investasi di wilayah itu juga diresmikan dalam Forum itu. Tingkat dan kedalaman dari partisipasi masyarakat madani dalam Forum untuk Masa Depan itu bersejarah dan positif, serta meletakkan preseden penting bagi dialog yang serius dan kemitraan antara masyarakat madani dan pemerintah seputar isu-isu reformasi politik.

Forum untuk Masa Depan itu hanyalah satu dari banyak mekanisme yang oleh Amerika Serikat, Kelompok 8 negara lainnya serta pemerintah-pemerintah regional digunakan untuk mendukung keinginan penduduk asli bagi pembaharuan di Timur Tengah dan Afrika Utara yang lebih luas.

Tuntutan yang kian meningkat di seluruh dunia bagi hak asasi dan demokrasi yang tercermin dalam laporan ini bukanlah hasil kerja yang tidak berpribadi (impersonal) dari beberapa dialektik, atau orkestrasi pemerintah-pemerintah asing. Tetapi, seruan ini berasal dari keinginan manusia yang kuat untuk hidup bermartabat dan dalam kebebasan, serta dari keberanian dan keuletan laki-laki dan perempuan dari semua lapisan usia dan semua lapisan masyarakat yang melayani serta mengorbankan diri demi pencapaian kebebasan.

Indonesia

Laporan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Negara-Negara - [2005](#)
Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi dan Pekerja
8 Maret, 2006

Indonesia adalah sebuah republik dengan sistem multi partai, demokratis, dan presidentiil, berpenduduk sekitar 241 juta. Pada bulan Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama yang terpilih secara langsung dalam sebuah pemilihan yang menurut penilaian para pengamat internasional dan domestik berlangsung secara bebas dan adil. Para pemilih juga memilih dua badan legislatif nasional pada tahun 2004: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dibentuk untuk pertama kalinya. Sementara otoritas sipil pada umumnya mempertahankan kontrol yang efektif terhadap pasukan keamanan, dalam beberapa kejadian unsur-unsur pasukan keamanan bertindak secara lepas dari otoritas sipil.

Ada peningkatan dalam situasi hak asasi dalam tahun itu, dan meskipun masih ada masalah-masalah signifikan khususnya di daerah-daerah yang dilanda konflik separatisme, akhir dari kemelut dalam negeri yang sudah berlangsung lama di propinsi Aceh merupakan langkah maju yang penting. Pemerintah menghadapi kemelut berintensitas rendah dan yang datang dan pergi, di propinsi Papua atau Irian Jaya; tindak kekerasan antar masyarakat di propinsi Maluku dan Sulawesi Tengah; dan pengeboman oleh teroris di berbagai lokasi. Sumberdaya yang tidak memadai, kepemimpinan yang buruk dan terbatasnya pertanggungjawaban turut menyumbang pada pelanggaran-pelanggaran serius oleh pasukan keamanan. Korupsi yang meraja lela memperburuk lagi tertib hukum yang sudah lemah, dan mengakibatkan para pelakunya lolos dari tuntutan hukum. Kemiskinan, pengangguran yang tinggi, dan sistem pendidikan yang lemah mengakibatkan semua warga, khususnya anak-anak dan perempuan, peka terhadap pelanggaran hak asasi. Sepanjang tahun itu pemerintah mencurahkan sumberdaya dan perhatian yang cukup besar bagi upaya pemulihan, menyusul bencana gempa bumi dan tsunami yang hebat pada bulan Desember 2004 yang mengakibatkan lebih dari 130 ribu orang tewas dan hilang di propinsi Aceh dan Sumatra Utara. Negara itu berusaha keras mengatasi pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Berikut adalah masalah-masalah hak asasi yang dilaporkan:

- pembunuhan, khususnya di daerah-daerah yang dilanda konflik separatisme
- penyalpungan
- penyiksaan
- kondisi penjara yang buruk
- penangkapan secara sewenang-wenang
- sistem peradilan yang korup
- pemeriksaan tanpa surat perintah pengadilan

- pelanggaran terhadap hak kebebasan berbicara
- pembatasan terhadap perkumpulan damai
- mencampuri kebebasan beragama oleh pihak-pihak pribadi, kadang-kadang bekerjasama dengan pejabat lokal
- tindak kekerasan dan pelanggaran seksual terhadap perempuan dan anak-anak
- perdagangan manusia
- kegagalan menegakkan standar pekerja dan pelanggaran hak pekerja, termasuk kerja paksa anak-anak

Sepanjang tahun itu ada perbaikan-perbaikan signifikan terhadap situasi hak asasi. Untuk pertama kalinya warga negara memilih pemimpin dalam 149 pemilihan lokal di tingkat kota, kabupaten dan propinsi. Pada tanggal 15 Agustus, pemerintah menandatangani perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diterapkan oleh kedua belah pihak sehingga sangat mengurangi pelanggaran hak asasi di propinsi itu. Di propinsi Papua, pemerintah meresmikan pembentukan Majelis Rakyat Papua dan mengambil langkah-langkah lain guna memenuhi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 2001. Pasukan keamanan semakin memperlihatkan sikap menahan diri dalam menanggapi aksi demonstrasi damai kelompok separatis di Papua. Pemerintah memulai kampanye anti korupsi yang membawa hasil, termasuk hukuman terhadap pejabat tinggi.

Kelompok-kelompok separatis bersenjata, teroris dan kelompok-kelompok militan juga melakukan pelanggaran hak asasi yang serius. Di Aceh, menjelang persetujuan perdamaian 15 Agustus, pemberontak melakukan pembunuhan dan penculikan. Di propinsi Sulawesi Tengah, Maluku, dan Bali teroris melakukan pengeboman yang menewaskan serta melukai banyak penduduk sipil. Kelompok-kelompok militan menyerang penganut agama minoritas dan bertindak membatasi kebebasan beragama.

PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI

Bagian 1 Penghormatan terhadap Integritas Seseorang, termasuk Bebas dari Ancaman:

a. Pencabutan Kehidupan Yang Sewenang-Wenang atau Yang Melanggar Hukum

Pasukan keamanan terus melakukan pembunuhan yang melanggar hukum terhadap pemberontak, yang dicurigai pemberontak dan orang-orang sipil di daerah kegiatan kaum separatis, dimana kebanyakan pembunuhan bermotif politik yang melanggar hukum juga terjadi. Terdapat bukti bahwa militer Indonesia (TNI) menganggap setiap orang yang dibunuh oleh pasukannya di daerah-daerah konflik sebagai pemberontak bersenjata. Pemerintah gagal membuat tentara dan polisi mempertanggungjawabkan pembunuhan itu dan pelanggaran hak asasi serius lainnya di Aceh dan Papua.

Menyusul gempa bumi dan tsunami bulan Desember 2004 yang melanda propinsi Aceh, pemerintah dan pemberontak GAM mengadakan perundingan yang menghasilkan persetujuan perdamaian 15 Agustus berbentuk sebuah Memorandum Kesepahaman (MOU). Penerapan MOU tersebut mengakhiri konflik selama hampir tiga dasawarsa dan menyebabkan pengurangan besar dari pelanggaran hak asasi oleh TNI, polisi, dan pemberontak GAM.

Koalisi Organisasi Swadaya Masyarakat (NGO) Untuk Hak Asasi di Aceh melaporkan bahwa selama tahun itu TNI menewaskan 42 pemberontak GAM dan menangkap satu; 44 orang sipil terbunuh. Organisasi yang sama melaporkan bahwa 40 sipil dan 37 anggota GAM terbunuh sebelum MOU, serta 4 sipil dan 5 anggota GAM terbunuh sesudah MOU.

Pada tanggal 3 Januari, di Bireuen, Aceh, enam anggota pasukan khusus TNI (Kopassus) dilaporkan menewaskan dua orang dan melukai seorang lainnya ketika orang-orang itu mencoba menengahi penahanan putra seorang anggota GAM.

Sukarelawan kemanusiaan melaporkan bahwa personil TNI dan Brigade Mobil Polisi (Brimob) menewaskan tiga tersangka pemberontak setelah menangkap mereka dalam sebuah operasi gabungan di desa Serba Jaya, Kabupaten Aceh Jaya.

Komisi NGO mengenai Pelenyapan dan Korban Kekerasan Aceh melaporkan bahwa GAM menewaskan tujuh orang sipil; Koalisi NGO untuk Hak Asasi melaporkan bahwa GAM menewaskan 17 tentara pada tahun itu.

Pada tanggal 4 Mei, pemberontak GAM dituduh menembak dan menewaskan anak laki-laki berumur 7 tahun di kabupaten Aceh Utara ketika pemberontak menghadang kendaraan yang membawa anak lelaki tersebut. Insiden ini menyebabkan 10 lainnya, termasuk 3 tentara luka-luka.

TNI dan polisi jarang sekali menyelidiki pembunuhan yang melanggar hukum dan hampir tidak pernah mengumumkan hasil penyelidikan seperti itu.

Tidak ada kemajuan yang diketahui dalam kasus-kasus berikut dari tahun 2004: empat penduduk sipil ditemukan tewas di sebuah hutan dekat Peureulak, Aceh Timur; pembunuhan warga sipil Cut Musdaifah di desa Wakheuh; pembunuhan yang menurut tuduhan dilakukan GAM terhadap calon legislatif lokal Muhammad Amin; dan penembakan mati anggota paramedik di Aceh Selatan. Tidak ada perkembangan dalam kasus pembunuhan Mei 2003 terhadap anggota legislatif lokal Jamaluddin Hasany; dalam pembunuhan bulan Juli 2003 terhadap mantan anggota GAM Cut Aca Budi; dalam pembunuhan bulan Juli 2003 terhadap guru sekolah Muslim Sulaiman dan isterinya Darmawati; atau dalam pengeboman bulan Desember 2003 yang menewaskan 9 orang di sebuah konser terbuka di Peureulak.

Di propinsi Papua, pemerintah terus mengadakan operasi terhadap pemberontak Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pemberontak OPM terus melakukan operasi intensitas rendah dan sporadis terhadap unit-unit militer dan polisi. TNI memperkirakan pasukan OPM terdiri dari 620 gerilyawan yang dipersenjatai dengan kira-kira 150 pucuk senjata api mulai dari M-16 yang modern sampai ke senapan Mauser yang sudah kuno.

Pada tanggal 17 Januari, personil TNI dituduh memukuli penduduk lokal Papua di Naibire, menyebabkan tujuh orang cedera parah dan seorang, Miron Wonda, tewas. Pada tanggal 10 April, sewaktu memburu 11 anggota pemberontak OPM, polisi melakukan serangan di kota Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, polisi menembak dan menewaskan Tolino Iban Giri dan menangkap 8 lainnya. Para pemuka gereja setempat mengatakan kepada pers bahwa Tolino Iban Giri dan delapan lainnya itu bukan anggota OPM.

Pada bulan Maret, di Mulia, menurut komandan distrik militer, seseorang yang tidak dikenal, diduga anggota OPM, menembak dan menewaskan penduduk sipil setempat, Tinus Tabuni.

Juga di Papua, TNI dan polisi terus bekerjasama dengan penegak hukum Amerika Serikat dalam penyelidikan bersama terhadap penghadangan tahun 2002 yang menewaskan 2 orang warga Amerika dan 1 orang Indonesia serta mencederai 12 lainnya dekat sebuah tambang emas dan tembaga besar dekat kota Timika. Sebuah gugus tugas bersama berusaha menciduk para pelakunya, termasuk anggota gerilyawan OPM Anthonious Wamang, yang telah dinyatakan bersalah oleh sebuah dewan juri agung Amerika Serikat sehubungan dengan pembunuhan itu.

Pemerintah mencapai kemajuan terbatas dalam menegakkan pertanggungjawaban bagi sejumlah pelanggaran hak asasi yang dilakukan di Papua dalam tahun-tahun sebelumnya, termasuk yang dilakukan di Biak (1998), Abepura, Wasior, dan Wamena. Dalam tahun itu sebuah pengadilan hak asasi di Makasar membebaskan dua orang terdakwa dari semua tuduhan dalam kasus Abepura tahun 2000 dimana polisi dituduh menewaskan paling sedikit tiga orang dan menyerang sampai 100 orang dalam suatu serbuan (lihat bagian 1.e.). Pada tahun 2004 Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM), sebuah organisasi independen yang dibentuk dan didanai oleh pemerintah, merampungkan laporannya mengenai insiden Wasior 2001, dimana polisi dituduh membunuh 12 warga sipil menyusul serangan terhadap pos polisi yang menewaskan lima anggota polisi, dan dalam insiden Wamena tahun 2003, puluhan penduduk dataran tinggi tengah dari kawasan Kuyowage disiksa dan desa-desa dibumihanguskan pada waktu sebuah operasi militer dilancarkan menyusul pendobrakan sebuah gudang senjata bulan April 2003. Dalam kedua kasus ini, komisi mendapati tentara dan polisi melakukan pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk pembunuhan, pengusiran secara paksa, dan penyiksaan. Komnas HAM mengkategorikan pelanggaran ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pada bulan September 2004 mengajukan laporan ke kantor Kejaksaan Agung untuk kemungkinan diajukannya penuntutan. Kantor Kejaksaan Agung kabarnya memberitahukan Komnas HAM mereka tidak akan menyelidiki kasus tersebut karena laporan Komnas

HAM tidak memenuhi standar Kantor Kejaksaan Agung, atau tidak diisi dengan kesaksian yang dapat diterima. Pada akhir tahun Komnas HAM tidak berencana untuk merevisi laporannya itu

Polisi menggunakan kekuatan mematikan untuk menciduk tersangka atau bertindak sembrono dalam mengejar para tersangka, dan tindakan ini kadang-kadang mengakibatkan tewasnya orang sipil. Dalam kasus lain, para tersangka dalam tahanan polisi meninggal dalam keadaan yang mencurigakan.

Pada tanggal 27 Maret, sewaktu melakukan serbuan terhadap sebuah tempat perjudian, polisi menembak Sunaryoko di desa Tasikmadu, Jawa Timur. Polisi setempat kemudian menahan para petugas yang terlibat dan kabarnya mengambil langkah disiplin terhadap mereka. Tidak diperoleh perincian dari tindakan disiplin tersebut.

Sepanjang tahun itu pemerintah tidak membuat kemajuan yang signifikan dalam menegakkan pertanggungjawaban bagi kasus-kasus pelanggaran tahun 2004 berikut ini: pemukulan sampai mati oleh polisi terhadap seorang penduduk Jawa Timur pada bulan Juni, pembunuhan bulan Agustus terhadap tiga orang yang dituduh mencoba melarikan diri dari tahanan polisi di Sragen, Jawa Tengah, pembunuhan bulan Agustus terhadap Hermansyah dan Ade Candra yang dituduh mencoba melarikan diri dari interogasi polisi di Pekanbaru, atau penembakan bulan Juli oleh polisi di Poso yang mencederai Bambang, seorang tersangka yang dikenai tuduhan yang salah.

Pada bulan September 2004 orang-orang tak dikenal meracun sampai mati tokoh aktivis hak asasi terkemuka Munir Said Thalib sewaktu dalam penerbangan dari Jakarta ke Belanda lewat Singapura. Menurut otopsi pemerintah Belanda, penyebab kematian adalah peracunan arsenik. Pada tanggal 20 Desember, Pengadilan Jakarta Pusat menyatakan Pollycarpus Budihari Priyanto seorang pilot yang berada dalam penerbangan itu sebagai penumpang, terbukti bersalah membunuh Munir, dan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara. Majelis Hakim melukiskan pembunuhan itu sebagai sebuah konspirasi dan menyerukan agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebuah laporan mengenai kasus itu yang disusun oleh sebuah tim pencari fakta yang dibentuk oleh presiden tidak dirilis untuk umum, tetapi menurut laporan pers, disimpulkan pembunuhan Munir merupakan sebuah konspirasi, dan direkomendasikan agar penyelidikan terhadap mantan pejabat dan yang masih aktif dari Badan Intelijen Negara (BIN) serta pejabat perusahaan penerbangan Garuda diselenggarakan. Pada akhir tahun baik pihak penuntut maupun pembela naik banding atas keputusan pengadilan terhadap Pollycarpus.

Tidak ada kemajuan dalam penyelidikan kasus bunuh diri Ihsanuddin tahun 2003, tersangka anggota organisasi teroris Jemaah Islamiyah (JI).

Pada tanggal 29 Maret, Pengadilan Distrik Palu di Sulawesi Tengah menjatuhkan hukuman penjara delapan bulan atas diri Sofyan, karena memiliki senjata api gelap. Ia sebelumnya ditahan karena dicurigai terlibat dalam pembunuhan jaksa Ferry Silalahi, namun ia dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Silalahi. Selama tahun itu polisi menangkap tiga tersangka baru dalam kasus penembakan Silalahi: Hence Said, Farid Podungge, dan Wagiman. Pada bulan Agustus polisi menyerahkan berkas perkara Wagiman kepada jaksa penuntut untuk diadili; namun tidak ada perkembangan sejak saat itu. Pada bulan Nopember polisi menangkap Ali Ipong, seorang tersangka dalam 9 kasus tindak kekerasan di Palu dan Poso. Pada akhir tahun ia diinterogasi. Tidak ada kemajuan dalam penyelidikan pembunuhan tahun 2004 atas diri Pendeta Freddy Wuisan dekat gereja Membuke, Poso.

Pemerintah membuat sangat sedikit kemajuan pada tahun itu dalam penuntutan terhadap mereka yang bertanggungjawab atas pembunuhan pada tahun 1998 terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti, dan sembilan demonstran di persimpangan Semanggi, serta pembunuhan tahun 1999 terhadap empat demonstran di Semanggi. Pada tahun 2004 Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara meminta DPR supaya mengubah keputusan tahun 2001 yang tidak mengklasifikasikan kasus-kasus ini sebagai pelanggaran hak asasi. Pada bulan Juli anggota DPR yang mewakili beberapa partai politik mengusulkan pembentukan sebuah komite khusus untuk membuka kembali kasus penembakan itu berdasarkan rekomendasi dari Komisi DPR untuk Hukum dan Hak Asasi. Namun sampai akhir tahun tidak ada perkembangan lebih lanjut.

Pada tahun itu terjadi pengeboman di Aceh, Bali, kepulauan Maluku, dan Sulawesi. Pada tanggal 1 Oktober, tiga orang pengebom bunuh diri menewaskan 19 orang dan melukai lebih dari 100 di kawasan pariwisata

Kuta dan Jimbaran, Bali. Beberapa anggota senior organisasi teroris JI, termasuk warga Malaysia Noordin Mohammad Top masih tetap buron dan menjadi fokus upaya kontra terorisme penegak hukum.

Pengadilan mengadili sejumlah tersangka teroris berkaitan dengan insiden-insiden teroris besar, termasuk pengeboman kedutaan besar Australia September 2004 yang menewaskan 10 orang dan melukai lebih dari 150 lainnya. Para petugas penegak hukum dan kehakiman menangkap, mengadili, dan menjatuhkan hukuman terhadap enam laki-laki karena peranan mereka dalam serangan itu. Dua pelaku, Iwan Dharmawan Mutho dan Achmad Hasan, keduanya dituduh merencanakan dan mengorganisasir serangan itu, dijatuhi hukuman mati. Naik banding mereka masih dalam proses pada akhir tahun. Empat lainnya dijatuhi hukuman mulai dari 3 ½ sampai 10 tahun penjara.

Pada tanggal 9 Nopember, polisi terlibat baku tembak dengan sekitar lima orang teroris, yang menewaskan dua dan melukai satu anggota polisi. Yang tewas termasuk Azahari bin Husin, seorang warga negara Malaysia dan ahli pembuat bom yang terkait dengan empat pengeboman teroris yang besar, termasuk pengeboman di Bali tanggal 1 Oktober.

Pada bulan Agustus Pengadilan Negeri Makasar di Sulawesi Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap diri Agung Abdul Hamid karena pengeboman restoran MacDonald tahun 2002 dan sebuah keagenan mobil Toyota.

Pengadilan terus melakukan penuntutan hukum sehubungan dengan pengeboman Hotel Marriott Agustus 2003 yang menewaskan 12 orang. Pada akhir tahun pengadilan menjatuhkan hukuman penjara terhadap 15 tersangka mulai dari 3 sampai 12 tahun. Peradilan dua tersangka lainnya sedang berlangsung.

Sejak 2002 pengadilan telah menjatuhkan hukuman terhadap hampir 130 orang sehubungan dengan serangan-serangan teroris. Hukuman paling berat melibatkan lima hukuman mati dan tujuh hukuman penjara seumur hidup.

Di Sulawesi Tengah, paling sedikit 37 orang terbunuh dan paling sedikit 104 lainnya cedera pada tahun itu. Ketegangan politik dan ekonomi antara warga Kristen dan Muslim merupakan salah satu penyebab kekerasan itu.

Pada tanggal 28 Mei, sebuah bom meledak di pasar utama kota Tentena, kabupaten Poso, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, menewaskan paling sedikit 21 orang dan mencederai 40 orang lainnya. Ledakan-ledakan kecil lainnya terjadi di depan kantor PDI-Perjuangan pada tanggal 15 Mei; di pasar Tentena pada tanggal 29 Juni, dan di halaman belakang komisariat pemilihan Poso pada tanggal 12 Juli. Tidak ada korban yang dilaporkan dalam insiden-insiden itu.

Selama tahun itu 13 orang terbunuh dan sekitar 80 lainnya luka-luka di propinsi Maluku, jauh lebih sedikit dari tahun 2004. Seperti halnya di Sulawesi Tengah serta daerah konflik lainnya, tidak jelas apakah korban tewas ini disebabkan oleh konflik antar agama, atau motif kejahatan, atau motif lain.

Pada tanggal 16 Mei, kawan bersenjata tak dikenal menyerang sebuah pos komando operasi Brimob di desa Loki, kabupaten Piru, pulau Seram Barat, Propinsi Maluku, menewaskan tujuh orang, termasuk lima petugas polisi. Polisi mengatakan penyerang adalah anggota sebuah kelompok ekstrimis Muslim lokal. Pada tanggal 19 Mei, polisi menangkap dua tersangka, yang kabarnya mengakui melakukan serangan tersebut.

Pemerintah dan polisi terus mencapai kemajuan dalam menangani konflik di Sulawesi Tengah dan Maluku. Polisi melancarkan upaya-upaya yang lebih gigih untuk melacak, menangkap dan menuntut mereka yang terlibat dalam kekerasan. Pada bulan Agustus dua tersangka ditangkap dalam penyelidikan penembakan Pendeta Susianti Tinulele Nopember 2004; tidak diperoleh laporan kemajuan lebih lanjut dalam kasus tersebut. Pada bulan Juni polisi menyatakan 18 orang sebagai tersangka dalam pengeboman Tentena 28 Mei, termasuk Hasman, kepala penjara Poso. Polisi kemudian membebaskan Hasman dan 13 lainnya karena kurangnya bukti. Pada bulan Oktober dan November, lima perempuan remaja – empat Kristen dan satu Muslim – terbunuh di dan dekat Poso, Sulawesi Tengah (lihat bagian 2.c.).

Pemerintah dan polisi propinsi Sulawesi Tengah dalam kasus tertentu mendesak penyelenggaraan penyelidikan dan penuntutan pasukan keamanan yang dituduh terlibat dalam kekerasan agama dimasa lalu

di propinsi itu. Pada bulan April markas besar kepolisian secara terbuka mengumumkan nama seorang perwira senior polisi sebagai tersangka dalam pengeboman gereja di Palu, Sulawesi Tengah bulan Desember – perwira polisi senior pertama yang dikenakan tuduhan seperti itu.

Pada bulan Maret, polisi Maluku menangkap 3 laki-laki karena kemungkinan terlibat dalam serangan terhadap sebuah bus bulan itu yang menewaskan 4 orang dan melukai 14 lainnya.

b. Pelenyapan

Sepanjang tahun itu terjadi pelenyapan puluhan orang, yang paling sering di Propinsi Aceh, dan sejumlah besar orang yang lenyap dalam 20 tahun terakhir, terutama di daerah konflik, masih tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah melaporkan sedikit kemajuan dalam menuntut ke meja hijau mereka yang bertanggungjawab bagi pelenyapan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Koalisi NGO mengenai Hak Asasi, di Aceh, 31 warga sipil dan seorang anggota GAM diculik dalam tahun itu; 46 orang sipil dan 4 anggota GAM diberitakan diculik pada tahun 2004. Tidak diperoleh laporan mengenai penculikan setelah ditanda tangannya MOU.

Pasukan keamanan dinyatakan terlibat dalam beberapa kasus pelenyapan. Pada tanggal 22 Januari, lima perwira TNI berpakaian sipil dituduh menculik seorang sipil, Hamdani, dan mengancam isterinya. Tentara membebaskan Hamdani tiga hari kemudian. Pada tanggal 21 April, dua unit dari Unit Gabungan Intelejen Militer dituduh menculik Dhalan bin Abdurrahman dan Ardiyansyah bin Amin Yusuf, keduanya dituduh sebagai anggota GAM, ketika melancarkan operasi di desa Cot Bak U.

Tidak ada kemajuan dalam kasus tahun 2004 dimana laki-laki usia 16 tahun yang ditahan polisi mengalami luka-luka, atau dalam kasus Mukhlis dan Zulfikar, anggota dari NGO lokal – Link for Community Development.

GAM juga menculik orang-orang dalam tahun itu. Pada tanggal 14 Pebruari, para anggota GAM dituduh menculik empat orang, termasuk anak-anak berumur delapan tahun, dan menuntut uang tebusan. Pada akhir tahun tidak diketahui dimana mereka berada. Pada bulan Juni anggota GAM dituduh menculik Marhaban, seorang ulama Islam anggota Partai Persatuan Pembangunan, setelah gagal memeras uang darinya. GAM membebaskan Marhaban setelah ia membayar sejumlah uang yang tidak diketahui nilainya.

Tidak ada kemajuan yang diketahui dalam kasus pelenyapan tahun 2004 guru sekolah dasar Muhammad Amin Alwi dan Hasballah yang secara paksa dibawa oleh 10 lelaki bersenjata mengenakan seragam militer di kabupaten Nagan Raya.

Pada tanggal 10 Desember, polisi menangkap tersangka penculik pendeta Kristen Pantekosta Jarok Ratu, yang diculik di pulau Buru Selatan, Propinsi Maluku pada bulan Desember 2004. Pendeta itu masih hilang sampai akhir tahun 2005.

Pada tanggal 14 September, Komnas HAM mengumumkan hasil penyelidikan mereka terhadap penculikan 12 sampai 14 aktivis pro demokrasi pada masa pemerintahan mantan presiden Suharto. Meskipun personil militer menolak bekerjasama dalam pelacakan tersebut, Komnas HAM menyimpulkan bahwa semua korban yang masih hilang sudah tewas dan mengidentifikasi para tersangka untuk diselidiki dengan resmi tanpa mengumumkan nama-nama mereka.

Di Papua tidak diperoleh laporan kredibel tentang pelenyapan dalam tahun itu. Pemerintah tidak melaporkan kemajuan dalam penuntutan mereka yang bertanggungjawab melakukan pelenyapan yang berlangsung tahun-tahun sebelumnya, termasuk Martinus Maware, Mathius Rumbiapuk, atau Hubertus Wresman.

c. Penyiksaan dan Kekejaman, Ketidak Manusiawian Lainnya, atau Perlakuan Merendahkan Martabat atau Hukuman.

Berdasarkan undang-undang adalah suatu kejahatan yang dapat dikenakan hukuman penjara sampai empat tahun terhadap pejabat yang menggunakan kekerasan atau paksaan untuk memperoleh pengakuan;

tetapi, para petugas penegak hukum mengabaikan undang-undang tersebut dalam banyak kejadian. Pasukan keamanan terus menggunakan siksaan dan bentuk pelanggaran lainnya. Pemerintah melakukan beberapa upaya membuat anggota pasukan keamanan bertanggungjawab atas tindak peniksaan. Sepanjang tahun itu penggunaan siksaan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka yang paling menyolok terjadi di Aceh dan Papua.

Siksaan kadang-kadang digunakan untuk memperoleh pengakuan, menghukum tersangka, dan memperoleh informasi yang melibatkan orang lain dalam kegiatan kriminal. Pasukan keamanan juga dituduh menggunakan peniksaan untuk memeras uang dari penduduk desa. Angka-angka yang dapat dipercaya tentang insiden peniksaan yang terjadi tahun itu sukar diperoleh. Siksaan yang digunakan termasuk pemukulan secara membabi-buta, penggigitan, pencambukan, penyayatan dan pembakaran.

Di Propinsi Aceh Koalisi NGO Hak Asasi melaporkan 80 kasus dimana penduduk sipil disiksa, dan tidak ada kasus anggota GAM disiksa, dibandingkan dengan 77 kasus penduduk sipil dan 7 anggota GAM yang disiksa pada tahun 2004. Pada bulan September 2004 Human Rights Watch (HRW) melaporkan banyak pelanggaran terhadap tahanan di Aceh oleh pasukan keamanan, termasuk penggunaan sengatan listrik dan pemukulan dengan balok kayu dan popor senapan. Pemerintah mengumumkan akan menyelidiki tuduhan-tuduhan tersebut; tetapi pada akhir tahun tidak ada penyelidikan yang dilaporkan dilakukan.

Yayasan Bantuan Hukum dan Komnas HAM di Papua melaporkan 35 kasus peniksaan oleh pasukan keamanan di Papua dalam tahun itu.

Pada tanggal 16 Pebruari, 10 Marinir dilaporkan memukuli 6 orang yang kehilangan tempat tinggal (internally displaced persons – IDP) di Aceh karena tidak dapat atau tidak mau memberikan informasi tentang keberadaan anggota GAM. Dalam tuduhan insiden lainnya, delapan anggota TNI menyeret seorang kepala desa berumur 53 tahun di belakang sebuah truk pick-up dari desanya ke pos TNI terdekat, sebagai hukuman akibat tidak melaporkan anggota GAM kadang-kadang lewat di depan rumahnya.

Pada bulan Mei, NGO lokal menuduh seorang petugas polisi dan tiga personil militer menyiksa Ivan Mardiwani, seorang penduduk Surabaya. Kepala polisi Surabaya ketika itu secara terbuka berjanji akan menyelidiki kasus tersebut; pada akhir tahun tidak tersedia informasi berkenaan dengan status penyelidikan. Pada bulan Januari NGO Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rakyat dan Hak Asasi Manusia (LBHKR–HAM) melaporkan polisi Surabaya kepada DPRD mengenai tindak pelanggaran hak asasi. LBHKR–HAM menuduh polisi Surabaya memperlakukan dengan buruk dua tersangka sewaktu melakukan interogasi sebuah kasus narkotika.

Pada tanggal 14 Juli, tentara dituduh menyiksa seorang yang disangka jadi anggota OPM dengan menyayat wajah dan tubuhnya dengan pisau dan silet, serta kemudian menyiram bensin dikepalanya dan membakar rambutnya. Tanggal 22 Juli, 14 tentara dituduh menyiksa dua penduduk sipil Papua selama satu hari. Anggota tentara itu dilaporkan menendang, menggigit dan meninju mereka. Tentara kemudian mengikat salah satu korban dan membakar rumput kering di punggungnya setelah mencambuknya terlebih dahulu.

Pemerintah tidak melaporkan kemajuan dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab melakukan tindak peniksaan di Aceh pada tahun 2004 atau 2003, termasuk kasus-kasus yang diperinci dalam laporan HRW dan Amnesty International (AI).

Tidak ada kemajuan baru dalam kasus tersangka anggota JI Saifudin Umar, alias Abu Fida, yang ditemukan dalam keadaan luka parah di sebuah rumah sakit Jawa Timur pada bulan Agustus 2004. Ia mengaku ditangkap secara diam-diam dan disiksa polisi, yang mengakui menangkap Abu Fida karena mambantu menyembunyikan dua buronan anggota JI, tetapi pihak kepolisian menyangkal menyiksanya.

Pada tanggal 24 Maret, di Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pengadilan militer Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap 6 personil militer tiga bulan penjara masing-masing karena memukuli Farid Faqih pada 26 Januari. Faqih berada dalam tahanan atas tuduhan mencuri bantuan yang dimaksudkan untuk korban bencana tsunami bulan Desember 2004.

Dalam tahun itu berita televisi sering menayangkan adegan polisi memukuli dan menendang tersangka kejahatan yang ditangkap, termasuk yang dibawah umur, dan rekaman gambar orang-orang yang berada dalam tahanan polisi yang jelas tampak mengalami pelanggaran fisik.

Pada tanggal 24 Juni, di Aceh, polisi syaria (hukum Islam) didepan umum memukul dengan rotan 52 orang yang dijatuhi hukuman karena berjudi, minum arak dan berdua-duaan dengan pasangan dari jenis kelamin yang berbeda yang tidak memiliki hubungan keluarga.

Pada tanggal 15 Agustus, puluhan personil militer dari sebuah batalyon infantri di Lumajang, Jawa Timur, menyerang desa Kalibuntu, kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Insiden itu menyebabkan kira-kira 100 orang cedera dan beberapa buah sepeda motor, mobil dan rumah rusak. Penduduk setempat yakin serangan itu diakibatkan oleh peristiwa penikaman seminggu sebelumnya terhadap anggota batalyon itu oleh seorang penduduk desa itu. Panglima militer Jawa Timur kemudian secara terbuka minta maaf kepada penduduk setempat dan berjanji akan memecat semua personil yang terlibat dalam serangan itu. Pada bulan Agustus pihak militer memecat komandan batalyon itu dan dua anggota batalyon infanteri tersebut yang terlibat dalam serangan itu.

Pemeriksaan terjadi di zona konflik (lihat bagian 5). Para pembela hak asasi menuduh bahwa kebanyakan pemeriksaan itu dilakukan oleh anggota tentara. Angka-angka tidak tersedia, tetapi sumber yang kredibel memberikan sejumlah kejadian yang melibatkan tentara. Lingkup permasalahan pemeriksaan di Aceh sulit untuk diketahui, karena stigma sosial, langkanya pelaporan, dan akses terbatas ke wilayah itu.

Dewan Pusat Informasi bagi Referendum Aceh (SIRA) (sebuah NGO yang didanai oleh GAM) melaporkan empat kasus pemeriksaan oleh personil militer di Aceh.

Menurut SIRA, pada tanggal 7 Februari, anggota tentara memerkosa seorang penduduk desa di Julok, Aceh Timur. Komandan satuan lokal menanyai korban tetapi tidak ada informasi berkenaan dengan penyelidikan lebih lanjut. SIRA juga melaporkan pada tanggal 6 Mei, tentara menyerbu sebuah rumah di Kambam, Aceh Utara mencari seorang tersangka anggota GAM tetapi ketika tentara hanya menemukan isterinya, mereka menginterogasi dan memerkosanya, dilaporkan sebagai hukuman berkenaan dengan jawaban yang diberikannya sehubungan kegiatan dan keberadaan suaminya.

Tidak ada kemajuan yang dilaporkan dalam penyelidikan kasus tahun 2004 dimana anggota TNI yang berkali-kali melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 16 tahun di Kampung Meureu Baro-Indrapuri selama kurun waktu beberapa bulan, menyebabkan anak gadis itu hamil.

Pada bulan September polisi menuduh kepala polisi Bogor Bambang Wasgito menampar seorang bawahan yang tidak turun tangan dalam suatu serangan terhadap anak laki-laki Wasgito yang berumur 15 tahun. Sopir Wasgito juga dituduh melakukan serangan serius yang menyebabkan luka-luka parah.

Pada tanggal 29 April, personil Brimob menyerang anggota TNI sebagai pembalasan terhadap serangan sebelumnya oleh sekelompok tentara ke stasiun polisi di Cimanggis, Depok. Menurut informasi publik terakhir yang tersedia, polisi tidak mempunyai tersangka sampai akhir tahun.

Pada tanggal 21 Maret, dua orang tidak dikenal melemparkan granat tangan ke kawasan berpenduduk Muslim di kawasan Batu Merah, kota Ambon, melukai lima orang. Insiden itu mencetuskan pembalasan oleh penduduk Muslim, yang menyerang sebuah bis yang mengangkut warga Kristen di kawasan Kapaha yang berdekatan, melukai 14 orang seluruhnya.

Pada tanggal 26 April, di kota Poso dua ledakan kecil terjadi di depan dua kantor NGO, Kelompok Kerja Penanggulangan Konflik Poso dan Institut Pemberdayaan Masyarakat Madani. Polisi dan rakyat setempat berpendapat serangan itu berkaitan dengan pemilihan lokal mendatang atau kasus korupsi yang melibatkan dana pengungsi Poso.

Pada tanggal 24 Agustus, sebuah bom rakitan sendiri meledak dalam sebuah beca di pasar Mardikaa, Ambon, melukai sembilan orang dan merusakkan sepeda motor dan mobil yang diparkir berdekatan. Polisi melakukan lima penangkapan, empat di antaranya hanya beberapa jam setelah insiden itu. Saat mengejar keempat pelaku itu, polisi menembak dan melukai dua tersangka, satu diantaranya meninggal di rumah sakit. Pada akhir tahun polisi sedang menyelidiki tersangka perencana pengeboman itu.

Gerombolan masa acapkali menyelenggarakan hukum rimba, namun angka tentang kejadian seperti itu tidak tersedia. Insiden-insiden pencurian atau yang dianggap pencurian mencetuskan banyak kejadian

seperti itu. Misalnya, pada tanggal 13 Februari di Banyumas, Jawa Tengah, segerombolan masa memukuli dan melukai parah Suhartim setelah pemilik rumah melihat ia mendobrak masuk ke rumahnya. Pada tanggal 4 Juli di Sanur, Bali, gerombolan masa memukuli Putu Bayu Widiantara karena mencuri sebuah telepon selular. Tak ada tindakan resmi yang diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pemukulan ini.

Tidak seperti tahun sebelumnya, tidak ada laporan mengenai pasukan keamanan menandai rumah keluarga tersangka dengan tulisan "X" atau "GAM" berwarna merah.

Tidak ada kemajuan dalam penyelidikan tuduhan pembakaran balasan yang dilakukan oleh Brimob terhadap 80 toko dan rumah di Keude Seuneddon, Aceh Utara dalam sebuah insiden tahun 2003 yang terjadi menyusul pembunuhan 2 anggota Brimob.

Kondisi Penjara dan Pusat Penahanan

Kondisi dari 365 penjara dan pusat penahanan buruk, dan banyak yang dihuni oleh terlalu banyak tahanan. Tingkat huniannya seringkali mencapai dua atau tiga kali dari kapasitas yang direkomendasikan. Para pengawal secara teratur memperlakukan dengan buruk dan memeras uang dari narapidana. Terdapat banyak laporan bahwa pemerintah tidak memasok pangan yang cukup untuk tahanan, dan anggota keluarga sering membawa makanan untuk melengkapi kebutuhan pangan saudara mereka. Tahanan yang tidak patuh ditempatkan dalam pengasingan sampai 6 hari dan hanya diberi makan berupa nasi dan air.

Pada tanggal 30 Juli, Miftahudin Yulianto, seorang narapidana di penjara Salemba, meninggal setelah tidak memperoleh perhatian medis yang pantas.

Orang kaya atau berkedudukan mendapat akses perlakuan baik dalam penjara. Pada tahun itu tahanan paling terkenal di Indonesia, Hutomo "Tommy" Suharto, putra mantan presiden Suharto yang dijatuhi hukuman karena mengatur pembunuhan seorang hakim pada tahun 2004, kabarnya meninggalkan sel penjaranya di Jawa Tengah setiap bulan dengan helikopter ke Jakarta, dan tinggal di sebuah hotel mewah sementara mendapat perawatan di Rumah Sakit Angkatan Darat Subroto untuk mengobati tumor tidak ganas di belakang matanya.

Kebanyakan anak yang dijatuhi hukuman kejahatan serius menjalani hukuman mereka di penjara anak-anak. Namun demikian, dalam tahap penangkapan dan peradilan, pihak berwajib menahan remaja di pusat tahanan bersama orang dewasa (lihat bagian 5). Secara teoretis, penjara menahan mereka yang sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, sementara pusat penahanan menahan mereka yang sedang menunggu peradilan, namun dalam prakteknya, tahanan pra-peradilan kadang-kadang ditahan bersama-sama dengan tahanan yang sudah dijatuhi hukuman.

Tidak ada pembatasan resmi mengenai kunjungan ke penjara oleh pemantau hak asasi, dan petugas penjara memberikan berbagai tingkat akses. Komite Internasional Palang Merah melakukan beberapa kunjungan kepada narapidana dalam tahun itu.

d. Penangkapan atau Penahanan yang Sewenang-Wenang

Undang-undang memuat peraturan yang melarang penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang namun kekurangan mekanisme penegakannya, dan pihak berwajib secara rutin melanggar. Undang-undang memberi hak kepada tahanan untuk memberitahu keluarganya dengan segera dan memerinci bahwa surat perintah penangkapan harus ditunjukkan pada waktu penangkapan. Pengecualian dibolehkan kalau, misalnya, tersangka tertangkap ketika sedang melakukan kejahatan. Undang-undang memperbolehkan penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan; tetapi kadang-kadang pihak berwajib melakukan penangkapan tanpa surat perintah.

Peran Polisi dan Aparat Keamanan

Presiden mengangkat kepala polisi nasional, tetapi membutuhkan konfirmasi dari DPR. Kepala polisi melapor kepada presiden tetapi ia bukan anggota penuh kabinet. Polisi Nasional memiliki kira-kira 250 ribu personil yang dikerahkan ke seluruh 33 propinsi. Polisi mempertahankan hierarki sentral, dimana polisi

setempat secara resmi melapor ke markas besar nasional mereka dan bukan pada pemerintah lokal. Militer bertanggungjawab untuk pertahanan dari serangan luar namun juga memiliki tanggungjawab untuk keamanan domestik. Di Aceh polisi syariah, sebuah lembaga pada tingkat propinsi yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum syariah.

Sepanjang tahun itu polisi pada umumnya meningkatkan kemampuannya memerangi kejahatan dan menciduk lebih dari 45 tersangka serangan teroris. Namun secara keseluruhan profesionalisme polisi tetap rendah, begitu juga dengan penegakan hak asasi, serta efektivitas dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi. Kekebalan dari hukum dan korupsi tetap menjadi masalah signifikan. Ada beberapa kejadian dimana polisi gagal merespon terhadap kekerasan masa atau kekerasan yang berasal dari main hakim sendiri. Polisi biasanya menerima uang sogok, mulai dari pembayaran kecil-kecilan dalam kasus lalu lintas sampai ke sogokan besar dalam penyelidikan kriminal. Divisi Profesi dan Keamanan (Propam) kabarnya menyelidiki 90 petugas polisi di Jakarta yang menghasilkan 34 pemecatan dalam tahun itu. Hukuman lain berbeda-beda mulai dari demosi sampai ke penuntutan kriminal. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, polisi juga menyelidiki beberapa perwira tinggi polisi. Pada bulan Oktober Propam menangkap Brigadir Jenderal Polisi Ismoko karena praktek diskriminatif terhadap para tersangka dalam kasus penipuan Bank Negara Indonesia (BNI). Ia dikenakan tuduhan berdasarkan undang-undang kriminal dan pada akhir tahun sedang menunggu peradilan dirinya. Dalam kasus BNI yang sama, Komisaris Jenderal Suyitno Landung (mantan kepala Divisi Penyelidikan Kriminal dan kini, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional) ditangkap pada bulan Desember karena dicurigai menerima uang sogok.

Pada bulan Nopember Propam memaksa Inspektur Jenderal Polisi Binarto memasuki masa pensiun yang dipercepat; Binarto mengakui mengirim sebuah sms kepada kepala polisi di Surabaya dan memintanya supaya membebaskan tersangka dalam kasus penambangan kayu liar.

Pada bulan Desember Propam menyatakan Inspektur Jenderal Saleh Saaf tersangka dalam penyelidikan korupsi dalam pembelian alat komunikasi.

Penangkapan dan Penahanan

Seorang terdakwa boleh mempertanyakan legalitas penangkapan dan penahanan dirinya dalam sidang dengar pendapat pra-peradilan dan boleh menuntut pembayaran ganti rugi apabila penahanannya ternyata merupakan kesalahan, tetapi, terdakwa jarang memenangkan sidang dengar pendapat pra-peradilan dan hampir tidak pernah memperoleh ganti rugi setelah dibebaskan tanpa tuduhan. Pengadilan militer dan sipil jarang menerima naik banding berdasarkan klaim penangkapan dan penahanan yang tidak semestinya. Undang-undang membatasi jangka waktu penahanan pra-peradilan. Polisi diijinkan melakukan penahanan awal selama 20 hari, yang kemudian bisa diperpanjang menjadi 60 hari; jaksa penuntut boleh menahan seorang tersangka 30 hari pada mulanya, dengan kemungkinan 20 hari perpanjangan. Penuntut boleh memperpanjang jangka waktu penahanan polisi, dan sebuah pengadilan distrik boleh memperpanjang jangka waktu penahanan yang ditetapkan jaksa terhadap tersangka. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi boleh menahan terdakwa sampai 90 hari selama masa peradilan atau naik banding, sementara Mahkamah Agung boleh menahan seorang terdakwa 110 hari sementara naik bandingnya dipertimbangkan. Sebagai tambahan, undang-undang mengizinkan periode penahanan diperpanjang sampai 60 hari tambahan pada setiap tingkat kalau terdakwa menghadapi kemungkinan hukuman penjara 9 tahun atau lebih lama atau kalau orang itu diputuskan terganggu secara mental atau fisik. Pejabat umumnya menegakkan peraturan ini dalam prakteknya.

Di daerah-daerah konflik separatisme, seperti Aceh dan Papua, polisi acapkali dan dengan sewenang-wenang menahan orang tanpa surat perintah, tuduhan, atau keputusan pengadilan. Pejabat jarang sekali melepaskan terdakwa dari tahanan dengan uang jaminan, acapkali mencegah akses terdakwa ke pengacara selama penyelidikan berlangsung, dan membatasi atau mencegah akses ke bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum pro-bono.

Pada tanggal 3 Maret, pasukan Brimob menahan Muladi bin Sulaiman, seorang petani di Kabupaten Aceh Jaya yang dicurigai sebagai anggota GAM, dan ia dipukuli hingga kehilangan kesadarannya. Ia kemudian dipindahkan ke resor polisi Aceh Barat sebelum dibebaskan.

Amnesti

Pada tanggal 30 Agustus, pemerintah memberi pengampunan kepada lebih dari 1500 tahanan GAM. Sesuai dengan MOU pemerintah membebaskan tanpa syarat semua sisa narapidana dan tahanan lainnya yang ditahan sehubungan dengan konflik itu. Pemerintah memfasilitasi re-integrasi narapidana yang dibebaskan, dan hal ini terselenggara tanpa kekerasan. Pemerintah masih menahan sejumlah kecil personil GAM, yang katanya dijatuhi hukuman karena tuduhan kriminal.

e. Penolakan Peradilan Terbuka Secara Adil

Undang-undang menjamin independensi judisial. Dalam prakteknya, kehakiman semakin independen tetapi kadang-kadang masih dipengaruhi oleh cabang pemerintahan eksekutif, militer, bisnis dan politisi. Mahkamah Konstitusional memperlihatkan sikap independen yang signifikan dan, dalam beberapa kasus besar, mengambil keputusan yang berlawanan dengan pemerintah. Gaji rendah masih merangsang korupsi, dan hakim mengalami tekanan dari pejabat pemerintah, dan hal ini acapkali mempengaruhi keputusan kasus-kasus peradilan.

Di bawah Mahkamah Agung dijumpai pengadilan umum, agama, militer, dan administratif. Undang-undang memberi hak naik banding. Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan aspek aktual sebuah kasus tetapi cenderung meninjau penerapan undang-undang oleh pengadilan yang lebih rendah. Berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusional, yang diberi kekuasaan untuk meninjau apakah sebuah undang-undang konstitusional, memutuskan pertikaian diantara lembaga negara, membubarkan partai politik, memutuskan pertikaian tertentu mengenai pemilihan, dan memutuskan tuduhan pengkhianatan atau korupsi oleh presiden atau wakil presiden. Cabang judisial secara teoretis setara dengan cabang eksekutif dan legislatif, dan memiliki menyelenggarakan peninjauan judisial terhadap UU yang dihasilkan DPR; peraturan pemerintah; dan dekret presiden, menteri dan gubernur. Dalam prakteknya cabang judisial tidak memiliki pengaruh sebesar cabang eksekutif dan legislatif.

Di 2,418 pengadilan distrik di Indonesia, sebuah panil hakim menyelenggarakan pengadilan dengan mengajukan pertanyaan, mendengarkan bukti, dan memutuskan salah atau tidak salah, serta mempertimbangkan hukuman. Kadang-kadang, hakim membatalkan keputusan sebelumnya dalam proses naik banding, dan kadang-kadang memperpanjang atau memperpendek jangka waktu hukuman. Baik pembela maupun penuntut bisa melakukan naik banding terhadap keputusan hakim.

Prosedur Peradilan

Undang-undang menganut asas terdakwa tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Undang-undang juga mengizinkan pembebasan tahanan dengan jaminan, yang dimanfaatkan namun jarang sekali di daerah yang dilanda konflik separatisme. Pejabat pengadilan kadang-kadang menerima sogokan dan sebagai imbalannya tahanan dibebaskan dengan jaminan. Terdakwa punya hak untuk menanyai saksi dan memanggil saksi untuk pembela dirinya. Sebuah kekecualian diizinkan untuk kasus-kasus dimana jarak atau biaya dianggap terlalu besar untuk mendatangkan saksi ke pengadilan; dalam kasus demikian, keterangan tertulis dibawah sumpah boleh digunakan. Pengadilan mengizinkan pengakuan yang diperoleh lewat paksaan, khususnya di daerah konflik, dan terbatas pada pengajuan bukti oleh pembela. Terdakwa berhak menghindarkan pemberatan dirinya sendiri dengan menolak memberikan kesaksian, tetapi umumnya mereka diwajibkan memberikan kesaksian sebelum peradilan diakhiri. Tetapi dalam prakteknya, terdakwa biasanya menolak menjawab pertanyaan.

Undang-undang memberi terdakwa hak diwakili oleh pengacara mulai dari saat penahanan dan pada setiap tahap pemeriksaan, dan mensyaratkan bahwa pengacara harus ditunjuk dalam kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati atau hukuman penjara 15 tahun atau lebih. Dalam kasus yang melibatkan hukuman 5 tahun atau lebih, undang-undang mensyaratkan penunjukan pengacara apabila terdakwa tidak mampu dan minta pengacara. Teoretis, terdakwa yang tidak mampu bisa memperoleh bantuan hukum swasta, dan asosiasi advokat non-pemerintah menyediakan perwakilan hukum pro-bono untuk terdakwa yang tidak mampu. Misalnya, Lembaga Bantuan Hukum - Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) mewakili banyak perempuan yang tidak mampu membayar pengacara. Dalam banyak kasus, perlindungan prosedural, termasuk pencegahan pengakuan dengan paksaan, tidak memadai untuk menjamin peradilan yang adil.

Menjelang penerapan MOU, banyak tersangka anggota GAM tidak dipenuhi haknya untuk memperoleh peradilan yang adil. Terdakwa jarang didampingi pembela pada waktu interogasi berlangsung dan biasanya

tidak didampingi pembela pada waktu sidang pengadilan. Terduduk jarang bisa menghadapi penuduhnya. Jaksa penuntut biasanya mendasarkan kasusnya pada kesaksian yang diberikan oleh saksi kepada penyidik pemerintah; baik saksi maupun penyidik tidak hadir di pengadilan, dan hanya pernyataan tertulis saksi yang diajukan. Penuntut jarang mengajukan bukti fisik, yang mereka klaim tidak tersedia karena merupakan senjata militer. Pada tahun 2004 seorang pengacara dari sebuah lembaga bantuan hukum memberitahukan AI bahwa dari hampir 100 kasus yang ditangani oleh organisasinya hanya 2 saksi pembela yang bersedia untuk hadir.

Korupsi yang merajalela diseluruh sistem hukum. Penyogokan mempengaruhi penuntutan, keputusan pengadilan, dan keputusan hukuman dalam kasus-kasus sipil dan kriminal yang tidak terhitung banyaknya. Komisi Ombudsman Nasional (KON) melaporkan 36 persen dari keluhan yang mereka terima berkaitan dengan korupsi judicial, yang melibatkan hakim, panitera, dan pengacara. Misalnya, pengacara mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Teuku Syaifuddin Popon, tertangkap ketika menyerahkan 25 ribu dolar (250 juta rupiah) kepada dua panitera pengadilan tinggi Jakarta, Ramadhan Rizal dan Mochammad Soleh, guna memenangkan kasus kliennya. Popon, Rizal, dan Soleh semuanya dihadapkan ke pengadilan pada akhir tahun. Pada tanggal 30 September Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap lima pegawai Mahkamah Agung dan seorang pengacara dalam insiden penyogokan yang melibatkan Probosutedjo, saudara tiri mantan presiden Suharto. Menurut laporan pers, pejabat KPK menyita kurang lebih 480 ribu dolar (kira-kira 5 milyar rupiah), yang mereka duga akan digunakan untuk menyogok Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (lihat bagian 3). Probosutedjo mengaku membayar 600 ribu dolar (6 milyar rupiah) kepada pengacaranya untuk menyogok pengadilan, tetapi mengklaim ia berbuat demikian untuk membantu penyelidikan anti korupsi. Bagir Manan membantah menerima sogokan dari Probosutedjo.

Kebanyakan hakim memperoleh gaji \$180 sampai \$203 (1.8 juta sampai 2.03 juta rupiah) per bulan, sementara hakim dengan pengalaman kerja tiga dasawarsa menerima gaji kira-kira \$ 594 (5.94 juta rupiah) per bulan. Pribadi-pribadi penting dalam sistem pengadilan tidak saja menerima sogokan tetapi tampaknya juga menutup mata pada kantor pemerintah lainnya yang dicurigai melakukan korupsi.

Selain beberapa tentara yang diadili oleh pengadilan hak asasi, ratusan tentara berpangkat rendah dan kadang-kadang menengah diadili di pengadilan militer, termasuk karena pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan warga sipil atau terjadi ketika anggota tentara itu tidak bertugas. Kalau tentara dicurigai melakukan kejahatan, polisi militer menyelidiki dan kemudian menyerahkan temuan mereka kepada jaksa militer, yang memutuskan apakah akan mempersiapkan kasusnya atau tidak. Sementara secara administratif dikelola oleh TNI, jaksa dan hakim militer bertanggungjawab kepada Kantor Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk penerapan undang-undang. Tetapi, dibawah "sistem satu atap" yang diterapkan pada tahun 2004, Mahkamah Agung menyelenggarakan kontrol administratif terhadap pengadilan militer dan agama. Panel hakim militer yang beranggotakan tiga orang mendengar sidang pengadilan sementara pengadilan tinggi militer dan mahkamah agung militer mendengar sidang naik banding. Beberapa warga sipil mengecam masa hukuman penjara ringan yang diputuskan oleh pengadilan militer. Pejabat hukum TNI mencatat bahwa semua personil yang dijatuhi hukuman penjara tiga bulan atau lebih, lepas dari riwayat atau masa dinas mereka, dipecat dari dinas militer.

Empat pengadilan distrik mempertimbangkan dan memutuskan pelanggaran hak asasi yang besar. Undang-undang mengijinkan setiap pengadilan mempunyai lima anggota, termasuk tiga orang hakim hak asasi non-karir, yang ditunjuk untuk masa tugas lima tahun. Terhadap keputusan yang dibuat bisa diajukan naik banding ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Undang-undang mengijinkan pemakaian definisi yang diakui pada tingkat internasional sehubungan dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggungjawab komando, tetapi dalam hal ini tidak termasuk kejahatan perang sebagai suatu pelanggaran hak asasi yang besar.

Pada tanggal 8 dan 9 September, dalam keputusannya yang pertama, pengadilan hak asasi permanen yang pertama di Indonesia, yang diselenggarakan di Makasar, Sulawesi Selatan, memutuskan bahwa serangan polisi tahun 2000 terhadap hampir 100 korban di Abepura, Papua, tidak merupakan "kejahatan terhadap kemanusiaan"; pengadilan membatalkan semua tuduhan terhadap Brigadir Jenderal Brimob Johnny Wainal Usman dan Komisaris Tinggi Polisi Sulawesi Selatan Daud Sihombing. Pengadilan juga menolak permintaan korban bagi rehabilitasi dan kompensasi. Penuntut naik banding ke Mahkamah Agung, yang belum meninjau ulang keputusan itu pada akhir tahun (lihat bagian 1.a.).

Pada bulan Agustus 2003, Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc untuk Timor Timur mengakhiri fase peradilannya di Jakarta. Dari ke 18 tersangka, 6 dijatuhi hukuman pada tingkat pengadilan: Adam Damiri (3

tahun), Abilio Soares (3 tahun), Noer Muis (5 tahun), Eurico Guterres (10 tahun), Sudjarwo (5 tahun), dan Hulman Gultom (3 tahun). Para terdakwa dijatuhi hukuman sehubungan dengan kekejaman yang terjadi selama bulan April 1999 dan September 1999 di tiga lokasi di Timur Timor: Liquica, Dili, dan Suai. Pada bulan Juli 2004 Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan hukuman terhadap Damiri, Noer Muis, Hulman Gultom, dan Sudjarwo, dan mengurangi hukuman Guterres dari 10 tahun menjadi 5 tahun tetapi mengukuhkan hukuman terhadap Soares. Pada tahun 2004 Mahkamah Agung membebaskan Soares. Pada tahun itu Mahkamah Agung mengukuhkan keputusan pengadilan tinggi membebaskan Sudjarwo dan Gultom dan keputusan pengadilan membebaskan Tono Suratman. Jaksa penuntut tidak mengajukan naik banding atas kasus Damiri. Pada akhir tahun Mahkamah Agung masih meninjau kembali kasus Noer Muis dan Guterres.

Unit Kejahatan Serius Timur Timor mengenakan tuduhan terhadap 391 orang karena kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama dan sesudah referendum tahun 1999; tetapi 290 orang masih menjadi buronan dan kecil kemungkinan mereka dikembalikan ke Timur Timor untuk diadili. Pada tahun itu PBB mengirim sebuah Komisi Pakar ke Indonesia guna menilai pengadilan ad hoc dan Unit Kejahatan Serius, serta merekomendasikan langkah-langkah berikutnya guna mencapai pertanggungjawaban. Komisi itu menyarankan agar Indonesia mengadili kembali para pelaku tindak kekerasan dalam waktu enam bulan atau agar kasus-kasus itu diadili dihadapan sebuah pengadilan internasional. Komisi juga mempertimbangkan kemungkinan penyelidikan kode kriminal internasional yang khusus (yang akan memperbesar wewenang Pengadilan untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan sebelum pembentukannya) apabila rekomendasi yang disebutkan diatas tidak diselenggarakan.

Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Timor Timur membentuk sebuah Komisi Kebenaran dan Persahabatan (TFC) untuk membenahi pertanggungjawaban kejahatan 1999. Komisaris dari Indonesia termasuk seorang uskup Katolik, seorang diplomat senior, mantan anggota Komnas-HAM dan seorang jenderal purnawirawan. TFC telah mulai bekerja, tetapi tidak menyelenggarakan sidang dengar pendapat umum, atau mencapai tahap temuan pada akhir tahun.

Pada tahun 2003 pengadilan hak asasi ad hoc bagi peristiwa Tanjung Periok 1984, dimana puluhan dan mungkin ratusan orang ditembak dan tewas, mengadakan sidang peradilannya yang pertama di Jakarta. Sebuah panel yang terdiri dari 5 hakim mendengarkan kasus 16 terdakwa, termasuk Mayor Jenderal Angkatan Darat Purnawirawan Pranowo, Mayor Jenderal Angkatan Darat Purnawirawan Rudolf Adolf Butar-Butar; Mayor Jenderal Angkatan Darat Purnawirawan Sriyanto Mutrasan, Panglima Kopassus Angkatan Darat; dan perwira militer lainnya yang berpangkat lebih rendah serta personil tentara lainnya dibawah komando Kapten Sutrisno Mascung. Semua terdakwa menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun terhadap Butar-Butar dan 13 lainnya dinyatakan bersalah serta dihukum penjara 2 atau 3 tahun penjara. Jaksa penuntut meminta hukuman 10 tahun penjara. Pengadilan memutuskan Pranowo dan Muntrasan tidak bersalah. Pada bulan Juli pengadilan tinggi membatalkan kesemua 14 putusan hukuman dan mengukuhkan temuan pengadilan bahwa Pranowo Muntrasan tidak bersalah. Pada akhir tahun, ke 16 terdakwa masih bebas sementara Mahkamah Agung mempertimbangkan pengajuan naik banding tingkat kedua dari Kantor Kejaksaan Agung.

Pada bulan September 2004 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pemimpin redaksi majalah Tempo, Bambang Harymurti, bersalah melakukan fitnah kriminal dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara. NGO dan wartawan mengeluh bahwa peradilan seharusnya menerapkan Undang-Undang Pers 1999, dan bukan Undang-Undang Kriminal dalam kasus tersebut. Penggunaan Undang-Undang Pers akan memberi peluang kepada penuntut, Tomy Winata, hak untuk menjawab atau mengenakan denda terhadap Tempo, dan bukan hukuman penjara. Pada tahun itu Harymurti mengajukan naik banding tetapi kalah lagi di pengadilan tinggi. Pada akhir tahun, Harymurti masih bebas menunggu hasil pengajuan naik bandingnya yang kedua (lihat bagian 2.a.)

Pada bulan September 2004, DPR meluluskan undang-undang untuk membentuk sebuah "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" guna menyelidiki pelanggaran hak asasi sebelum membuat rekomendasi kepada presiden untuk memberi pengampunan bagi para pelanggar dan rehabilitasi korban mereka. Undang-undang itu akan memungkinkan komisi untuk merekomendasikan amnesti terhadap pelanggar yang mengaku bahkan dalam kasus dimana korban tidak setuju. Apabila komisi telah menyelesaikan sebuah kasus, kasus itu tidak bisa diajukan lagi ke sebuah pengadilan hak asasi. Pada tahun itu pemerintah mengambil langkah untuk membentuk komisi tersebut. Panitia pemilihan memperkecil jumlah calon menjadi 42 orang, dari kumpulan semula yang terdiri dari 1.883 calon; presiden dengan persetujuan DPR, pada akhirnya akan memilih 21 anggota komisi.

Pada bulan Oktober 2004 Hakim Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan meresmikan pengadilan syariah pertama di Aceh. Berdasarkan sistem baru itu, 19 pengadilan agama dan sebuah pengadilan naik banding akan mengadili kasus-kasus. Pengadilan ini hanya akan menyidangkan kasus-kasus yang melibatkan warga Muslim dan menggunakan dekrit yang disusun oleh pemerintah lokal Aceh dan bukan hukum pidana. Pada tahun itu dekrit baru gubernur dikeluarkan yang mengizinkan hukuman pukulan dengan rotan sebagai hukuman pengadilan syariah untuk orang yang didapati bersalah karena berjudi, minum alkohol, atau berada sendirian bersama jenis kelamin yang berlainan yang tidak ada hubungan pertalian (lihat bagian 1.c dan 2.c.).

Tahanan Politik

MOU 15 Agustus yang ditandatangani antara pemerintah dan pemberontak GAM mengharuskan pemerintah membebaskan "narapidana dan tahanan politik yang ditahan sehubungan dengan konflik itu..." Kelompok narapidana ini sebagian besar terdiri dari orang-orang yang ditahan oleh pemerintah berdasarkan tuduhan berasosiasi atau berpartisipasi dalam konflik pemisahan diri bersenjata ini, atau tuduhan tindak pengkhianatan yang berkaitan dengan konflik ini. Pemerintah menerapkan ketentuan ini, tetapi terus menahan sejumlah kecil orang-orang yang katanya dijatuhi hukuman karena melakukan pelanggaran kriminal.

f. Campur Tangan Sewenang-wenang dengan Masalah Pribadi, Keluarga, Rumah, atau Korespondensi.

Undang-undang mengharuskan surat perintah pengadilan untuk melakukan penggeledahan kecuali untuk kasus yang melibatkan subversi, kejahatan ekonomi, dan korupsi. Undang-undang juga mengizinkan pemeriksaan tanpa surat perintah pengadilan kalau situasinya "mendesak dan memaksa." Pejabat keamanan dari waktu ke waktu melakukan penggeledahan terhadap rumah dan kantor. Fihak berwajib dari waktu ke waktu menyelenggarakan pengamatan terhadap individu dan rumah mereka, serta memonitor pembicaraan telpon mereka. Pejabat yang korup kadang-kadang melakukan penggeledahan tubuh, pencurian, dan pemerasan dengan sewenang-wenang terhadap pekerja yang kembali dari luar negeri, khususnya perempuan, yang dilakukan pada jalur yang khusus diperuntukkan untuk pekerja yang baru kembali di bandara.

Pertikaian mengenai tanah menghasilkan tuduhan pengusiran secara tidak adil dan penggunaan kekerasan berlebihan oleh petugas keamanan. NGO Forum Penduduk Jakarta memperkirakan petugas keamanan mengusir paling sedikit 5 ribu orang selama tahun itu dibandingkan dengan 20 ribu pada tahun 2004.

Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang harus dibawa oleh setiap warga, mengidentifikasi agama pemegang KTP itu. NGO-NGO menuduh bahwa KTP meremehkan tradisi pluralistik Indonesia, dan membahayakan bagi pemegang KTP yang bepergian melewati daerah yang dilanda konflik antar agama. Anggota dari kelima agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah – Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha – sedikit atau tidak banyak menghadapi kesulitan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang tepat; tetapi, penganut agama lain sering ditolak pemberian KTPnya atau ditolak pemberian KTP yang secara tepat membubuhkan jenis kepercayaan mereka. Tambahan pula, pejabat tingkat rendah dan kepala desa yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan KTP itu sering minta sogokan bernilai kecil, atau membuat prosesnya menjadi terlalu birokratis, dan hal itu menimbulkan kesulitan untuk kelompok masyarakat terpinggirkan seperti pekerja yang berpindah-pindah, warga miskin, dan tuna wisma untuk memperoleh KTP.

Di banyak daerah, khususnya di Kalimantan dan Papua, penduduk setempat berpendapat program transmigrasi yang disponsori pemerintah mengganggu tata cara kehidupan tradisional mereka, pemanfaatan lahan, dan peluang ekonomi. Tidak ada keluarga baru yang bertransmigrasi sejak 2004. Pemerintah mendukung paling sedikit 87.678 rumah tangga pindah pada tahun-tahun sebelumnya dari daerah padat penduduk ke 369 kawasan yang lebih terpencil dan kurang berkembang di 24 propinsi.

Pemerintah menggunakan wewenangnya, dan kadang-kadang dengan ancaman, untuk mengambil alih penguasaan tanah bagi proyek pembangunan, acapkali tanpa ganti rugi yang adil. Dalam kasus lain, badan usaha milik negara dituduh membahayakan sumberdaya yang merupakan sumber penghidupan warga sekitarnya. Pada tanggal 3 Mei, Presiden Yudhoyono menandatangani sebuah dekrit mengenai penguasaan tanah untuk kepentingan umum, yang mengizinkan pemerintah menguasai tanah untuk proyek

pembangunan prasarana umum meskipun pemilik tanah tidak menyetujui jumlah ganti rugi yang diberikan. Sejumlah NGO berpendapat dekrit itu memenuhi kepentingan developer kaya dan merugikan rakyat miskin.

Bagian 2 Penghargaan terhadap Kebebasan Sipil, Termasuk:

a. Kebebasan Berbicara dan Kebebasan Pers

Undang-undang mengizinkan penyelenggaraan kebebasan berbicara dan kebebasan pers; namun, pemerintah dari waktu ke waktu membatasi hak-hak ini dalam prakteknya. Suatu media yang gigih dan independen, serta pada umumnya mengutarakan berbagai pandangan tanpa pembatasan ada di Indonesia. Tetapi, dalam tahun itu pemerintah memenjarakan paling sedikit tiga pengunjuk rasa anti pemerintah yang dihukum karena "menghina presiden" atau "menyebarkan kebencian terhadap pemerintah" dan empat lainnya karena mengibarkan bendera separatis. Selain itu, para politisi dan pengusaha kuat sering mengajukan tuntutan kriminal atau sipil terhadap wartawan yang menulis artikel, yang menurut pendapat mereka menghina atau bersifat menyerang diri mereka. Juga pada tahun itu beberapa wartawan menghadapi ancaman atau tindak kekerasan.

Pada bulan Mei, sebuah pengadilan menjatuhkan hukuman penjara terhadap dua orang mahasiswa aktivis karena menghina presiden. Pengadilan menghukum Monang Johannes Tambunan, aktivis mahasiswa dari Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia karena menyebut presiden seekor anjing dan seekor babi pada waktu demonstrasi tanggal 28 Januari di depan istana kepresidenan. Pada tanggal 26 Mei pengadilan menjatuhkan hukuman atas diri Bay Harkat Jonday Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, lima bulan dan dua hari penjara karena membakar gambar Presiden Yudhoyono and Wakil Presiden Jusuf Kalla sewaktu aksi protes menentang kenaikan harga bahan bakar bulan Desember 2004. Pada tanggal 10 Juni, Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan hukuman atas diri I Wayan Gendo Suardana, seorang mahasiswa fakultas hukum di Universitas Udayana, enam bulan penjara, karena membakar gambar presiden pada waktu unjuk rasa menentang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar.

Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap empat orang di Papua karena berkhianat menaikkan bendera separatis "Bintang Kejora". Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun terhadap Filep Semuel Karma dan memecatnya dari kepegawaian negeri; Yusak Pakage dihukum penjara 10 tahun; Moses Aspalek 6 tahun; dan Moses Holago 4 tahun (lihat bagian 2.b.).

Pada bulan Mei, menurut laporan pers, sebuah pengadilan menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara terhadap dua wartawan dari Lampung karena memfitnah Alzier Dianis Thabranie, pemimpin Partai Golkar cabang Lampung, dalam sebuah laporan mengenai usaha pembelian suara di Lampung ketika pemilihan presiden tahun 2004 berlangsung.

Mantan ketua BIN, Abdulla Hendropriyono, mengajukan tuntutan kriminal karena pencemaran nama terhadap diri Rachland Nashidik, direktur program dari The Indonesian Human Rights Monitor, dan Usman Hamid, koordinator untuk The Commission for Disappearances and Victims of Violence. Baik Nashidik maupun Hamid adalah anggota terkemuka dari tim fact-finding, yang dibentuk pemerintah, untuk menyelidiki pembunuhan pejuang hak asasi manusia Munir (lihat bagian 1.a.). Hendropriyono mengatakan keduanya telah menyebarkan rumor buruk mengenai dirinya dan mencemarkan namanya ketika pekerjaan tim sedang berlangsung. Polisi memeriksa Nashidik dan Hamid, tetapi pada akhir tahun mereka masih bebas.

Akbar Tanjung, mantan ketua DPR, menuntut Retno Listyarti, guru civic pada sekolah menengah atas, dan penerbit PT Erlangga karena menulis dan menerbitkan buku pelajaran yang dianggapnya mencemarkan nama. Buku itu menggunakan peradilan korupsi Akbar (dimana ia dinyatakan tidak bersalah setelah mengajukan naik-banding) untuk menggambarkan isu transparansi dan jaringan keamanan social. Akbar juga mendakwa penyertaan peradilan korupsi didalam buku pelajaran itu punya pengaruh psikologis pada salah satu putrinya, karena sekolahnya menggunakan buku itu. Dalam sebuah kesepakatan diluar pengadilan, Listyarti setuju untuk mengubah buku pelajaran itu.

Pada tanggal 6 Oktober, Hakim Ketua Bagir Manan memerintahkan hakim di seluruh Indonesia agar menjatuhkan hukuman denda dan bukan hukuman penjara terhadap wartawan yang dinyatakan bersalah dalam kasus kriminal berkaitan dengan perselisihan pers. Tetapi, ia mempertahankan penerapan undang-undang kejahatan, dan bukan undang-undang pers yang lebih liberal dalam kasus tertentu.

Menyusul bencana tsunami pada bulan Desember 2004, pemerintah melonggarkan pembatasan terhadap akses pers dalam dan luar negeri ke daerah yang terkena bencana tsunami di Aceh yang tadinya diberlakukan berdasarkan keadaan darurat sipil. Pemerintah mengakhiri keadaan darurat sipil di Aceh pada tanggal 18 Mei, menghapuskan pembatasan legal terhadap pers, pembatasan pindah, berkumpul, dan hak-hak sipil lainnya. Dalam prakteknya, kemampuan TNI untuk membatasi informasi mempengaruhi kemampuan wartawan untuk melaporkan dengan bebas, seperti yang juga terjadi akibat intervensi ad-hoc dari pejabat setempat.

Meskipun pemerintah tidak secara resmi membatasi para wartawan asing untuk berkunjung ke propinsi Papua dan Irian Jaya Barat, dalam prakteknya, pemerintah mengharuskan wartawan minta ijin lewat kementerian luar negeri atau, kalau berada diluar negeri, lewat kedutaan besar Indonesia yang terdekat. Pemerintah memberikan persetujuan pada beberapa permohonan, dan menolak lainnya. Beberapa wartawan berkunjung ke Papua tanpa ijin khusus pemerintah. Tidak ada laporan pembatasan wartawan yang berkunjung ke daerah yang dulunya dilanda konflik seperti Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi.

Para wartawan menghadapi ancaman kekerasan dan intimidasi dari polisi, tentara, pejabat pemerintah, pemberontak, perampok, mahasiswa dan warganegara biasa. Sampai bulan Agustus, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat terdapat paling sedikit 14 serangan fisik terhadap wartawan, dan 15 tindak non-fisik termasuk ancaman dengan kata-kata dan tuntutan ke pengadilan. Pada bulan Agustus, I Wayan Puspa Negara, anggota dari DPR-D Badung, mengancam akan menembak Ashadi Ikhsa, wartawan harian Nusa, karena menulis artikel berjudul "Pemerintah Daerah Yang Baru Meminta Anggaran Lebih Besar untuk Sandang, Hingga Rp. 28 juta." Pada bulan Mei orang-orang tak dikenal berulang kali menelpon Heri, wartawan kantor berita nasional Antara, dan mengancam akan memukul kepalanya jika ia tidak berhenti menulis "berita-berita buruk."

Pada tahun 2003 orang-orang yang ada hubungannya dengan pengusaha Tomy Winata memasuki kantor pusat majalah *Tempo* di Jakarta dan mengkritik artikel yang mengesankan bahwa Winata akan memperoleh keuntungan dari kebakaran yang memusnahkan sebuah pasar di Jakarta. Mereka juga memukul beberapa wartawan *Tempo*, termasuk pemimpin redaksi Bambang Harymurti di kantor itu dan kemudian di kantor polisi. Pengacara *Tempo* melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib dan menuntut para penyerang itu, tetapi hakim pengadilan membebaskan pemimpin kelompok itu dari semua tuduhan. Pengacara Winata membalas dengan mengajukan empat tuntutan (dua perdata dan dua pidana), yang menurut aktivis pers bebas merupakan usaha untuk mengancam media. Pada bulan September 2004 Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan keputusan dua pengadilan negeri dalam tuntutan perdata terhadap *Tempo*, dengan keputusan yang memenangkan *Tempo* dan membatalkan hukuman denda yang dijatuhkan pengadilan negeri terhadap majalah itu. Namun, dua hari kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan *Tempo* bersalah sehubungan dengan pencemaran nama, dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Bambang Harymurti; pengadilan membebaskan wartawan *Tempo* Ahmad Taufik dan Teuku Iskandar Ali. Para pengamat hak asasi manusia melukiskan vonis itu sebagai tamparan terhadap kebebasan pers di Indonesia dan mengecam keputusan jaksa penuntut untuk menggunakan undang-undang pidana terhadap kasus fitnah itu dan bukan Undang-undang Pers 1999. Harymurti mengajukan naik banding tetapi pengadilan tinggi mempertahankan vonis itu. Pada akhir tahun, Harymurti masih bebas menunggu keputusan Mahkamah Agung terhadap permohonan naik bandingnya yang kedua.

Pada tanggal 25 Juni, kira-kira dua ribu orang yang menamakan diri masyarakat Muslim Kota Palu, melancarkan unjuk rasa terhadap sebuah kolom opini berjudul "Islam, Agama Yang Gagal" tulisan Rus'an, dosen di Universitas Muhammadiyah di Palu, isinya menekankan masalah korupsi di Indonesia. Akibatnya, manajemen dari harian Sulawesi Tengah yang terbesar, *Radar Sulteng*, memutuskan tidak menerbitkan surat kabar itu selama tiga hari. Polisi setelah menanyai sejumlah saksi, termasuk saksi pakar dari Majelis Ulama Indonesia cabang Sulawesi Tengah, menuduh Rus'an menghina agama Islam. Tetapi, MUI kemudian menarik kembali tuduhan itu dan membebaskan dirinya.

Sepanjang tahun itu pemerintah tidak mengambil langkah hukum terhadap orang yang bertanggung jawab melakukan pidana terhadap wartawan pada tahun 2004. Pada tahun 2003 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Gubernur Jakarta Sutiyoso untuk minta maaf kepada wartawan yang di ancam oleh seorang anggota ketertiban umum kota yang mencoba mencegah dirinya meliput sebuah pengusiran di tahun 2002. Sutiyoso kalah dalam pengajuan naik bandingnya ke pengadilan tinggi, dan dua kali mengajukan naik banding ke Mahkamah Agung. Pengajuan naik banding yang kedua masih dipertimbangkan pada akhir tahun.

Pada tahun 2004 pemerintah menerapkan undang-undang penyiaran, yang mencakup langkah pemberian lisensi untuk frekuensi tambahan dan membentuk sebuah komisi penyiaran yang independen. Sejak pembentukannya, Komisi Penyiaran tidak efektif karena anggaran yang tidak memadai dan ketidakpastian hukum mengenai wewenangnya.

Meskipun terjadi insiden kekerasan dan intimidasi terhadap pers, persatuan dikalangan wartawan dan komitmen mereka untuk melindungi rekan-rekan mereka bertambah kuat. Beberapa anggota pers meneruskan pelaporan yang agresif mengenai isu-isu tertentu seperti korupsi, kasus pembunuhan Munir, dan kerusakan lingkungan. Media daerah terus berkembang. Sebagai tambahan, penerbitan Islam yang moderat terus bertambah, baik dari segi oplag maupun popularitasnya.

Tak ada pembatasan pemerintah terhadap internet dan kebebasan akademis

Lembaga Sensor Film yang di supervisi oleh pemerintah meneruskan sensor film domestik dan impor dari segi pornografisnya atau dari segi agamanya. Pada bulan Desember pemerintah melarang dua film mengenai Timor Timur yang dipertunjukkan dalam festival film di Jakarta. Penyelenggara festival film ini mengutip pemerintah yang mengatakan bahwa film-film ini “mengingatkan rakyat pada luka-luka lama.”

Menurut undang-undang, ajaran komunis tidak boleh disebar luaskan atau dikembangkan; tetapi, pada tanggal 4 Februari, tanpa campur tangan pemerintah, mantan presiden Abdurrahman Wahid meluncurkan penerbitan sebuah versi bahasa Indonesia dari buku Karl Marx berjudul *Das Kapital*.

Dalam beberapa kesempatan selama tahun ini, sebuah kelompok ekstremis, Front Pembela Islam (FPI), berusaha membatasi kebebasan mengutarakan pendapat lewat ancaman. Pada bulan Juni FPI berusaha mengganggu sebuah kontes kecantikan untuk tranvestit (wadam). Pada bulan September FPI mengancam seorang kurator seni agar menutup karya seni yang mereka anggap tidak sopan. Dalam kedua kasus ini FPI mengajukan tuntutan berupa penghinaan Islam kepada polisi.

Beberapa kelompok Muslim, yang dipimpin FPI, juga melaporkan sebuah kelompok musik rock yang populer kepada polisi dengan tuduhan penghujatan pada tanggal 26 April; kelompok ini dituruh menggunakan kata “Allah” dalam tulisan Arab di sampul album mereka. Kelompok-kelompok Muslim ini juga mengajukan pengaduan bahwa band ini, selama konser mereka berlangsung, menginjak kata itu, yang ditulis dengan cat di panggung. Band ini kemudian merubah sampul album mereka. Pada bulan Juni, penyanyi utama dari band yang sama diadukan oleh sebuah organisasi Hindu, karena menggunakan gambar dewa Hindu pada sampul albumnya. Penyanyi ini minta maaf dan mengubah sampul albumnya.

b. Kebebasan untuk Berkumpul dan Berasosiasi Secara Damai.

Kebebasan Berkumpul

Undang-undang menjamin kebebasan untuk berkumpul, dan pemerintah pada umumnya menghormati hak tersebut, tetapi pemerintah membatasi hak itu di daerah yang dilanda konflik. Undang-undang umumnya tidak mewajibkan pengeluaran surat ijin jika hendak mengadakan pertemuan yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan; tetapi, pertemuan yang dihadiri oleh lima orang atau lebih yang berhubungan dengan politik, perburuhan, atau kebijakan umum membutuhkan pemberitahuan kepada polisi, dan penyelenggaraan unjuk rasa membutuhkan ijin.

Walaupun Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengijinkan pengibaran bendera yang melambangkan identitas kebudayaan Papua, polisi telah menahan Philep Karma dan Yusak Pakage karena mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua, yang dikaitkan dengan perjuangan separatis bersenjata, (lihat bagian 2.a.) pada bulan Desember 2004. Pada tanggal 1 Desember, polisi menolak ijin untuk penyelenggaraan sebuah unjuk rasa pro separatis di Abepura, dan mencegah beberapa ratus demonstran menduduki lokasi untuk demonstrasi itu. Pada hari yang sama, sebuah demonstrasi mahasiswa di Jayapura berlangsung tanpa insiden.

Pada tahun itu ada laporan mengenai penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi untuk mengendalikan demonstrasi. Pada tanggal 10 Mei, sebuah sidang pengadilan di Jayapura yang mengadili Karma dan Pakage berakhir dengan keributan ketika masa melemparkan batu kehalaman pengadilan, dan anggota

polisi yang menjaga pengadilan menembakkan tembakan peringatan. Kekerasan yang menyusul melukai puluhan orang, termasuk 10 anggota polisi. Kepala Kepolisian Nasional menggarisbawahi bahwa polisi telah bertindak berlebihan, dan kepala polisi Jayapura Son Ani serta bawahannya Novly Pitooy di pecat dari jabatan mereka. Sembilan anggota polisi dengan pangkat lebih rendah mengalami demosi serta ditahan karena melanggar hak asasi dan prosedur. Pada tanggal 26 Mei, Pengadilan Negeri Jayapura menghukum Karma dan Pakage 15 dan 10 tahun penjara masing-masing karena melakukan pengkhianatan.

Dalam kejadian lainnya polisi menunjukkan kesabaran dalam menghadapi demonstrasi yang disertai kekerasan. Misalnya, di Lombok Tengah, pada tanggal 19 September, ketika terjadi pertikaian antara pemilik tanah dan pejabat bandara, beberapa ratus petani menyerang polisi dengan batu dan panah. Polisi membalas dengan menembakkan peluru karet dan mengambil langkah pengendalian masa yang tidak mematikan. Tidak ada pengunjuk rasa yang mengalami luka-luka serius.

Di Aceh sebelum keadaan darurat sipil berakhir pada tanggal 18 Mei, beberapa ijin untuk berkumpul ditolak apabila pertemuan itu dianggap bersifat politik. Pada bulan April, penguasa sipil menolak permintaan the Consortium for Assisting Refugees and Displaced in Indonesia untuk ijin menyelenggarakan lokakarya dengan tema standar internasional untuk perawatan pengungsi. Penguasa tidak memberi alasan penolakannya.

Sejaknya berakhirnya pemberlakuan keadaan darurat sipil dan khususnya setelah penandatanganan MOU pada bulan Agustus, rapat umum berlangsung sering kali dan tanpa insiden. Sebagai hasil MOU, penguasa memberi Muhammad Nazar, ketua dari SIRA, amnesti dan membebaskannya pada tanggal 30 Agustus. Penguasa menahan Nazar pada bulan Pebruari 2003 karena merencanakan rapat umum di Lhokseumawe, Aceh.

Kebebasan Berorganisasi

Undang-undang menjamin kebebasan berasosiasi, dan pemerintah umumnya menghormati hak itu dalam prakteknya. Partai Komunis Indonesia dilarang pada tahun 1966.

c. Kebebasan Beragama

Undang-undang menjamin "setiap orang berhak menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaan masing-masing" dan dinyatakan bahwa "negara berdasarkan Ketuhanan yang maha esa." Pemerintah pada umumnya menghormati peraturan itu, tetapi hanya lima keyakinan utama - Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha - yang diakui secara resmi dalam bentuk perwakilan di Departemen Agama. Kelompok agama lain boleh mendaftar pada pemerintah, tetapi hanya di Departemen Dalam Negeri dan sebagai organisasi sosial saja. Kelompok-kelompok ini mengalami diskriminasi secara resmi dan sosial. Undang-undang tidak mengakui ateisme, dan dalam prakteknya, setiap orang harus mengakui salah satu dari kelima kepercayaan yang diakui oleh Pemerintah.

Kantor catatan sipil masih terus melakukan diskriminasi terhadap anggota dari agama minoritas. Pejabat catatan sipil menolak untuk mencatat perkawinan atau kelahiran dari penganut animisme, Kong Hu Cu, anggota dari aliran Baha'i, dan lain-lainnya karena mereka tidak termasuk dalam salah satu dari ke lima kepercayaan yang secara resmi diakui. Menusut asosiasi Hindu, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, penganut agama Hindu, khususnya di Lampung Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan, dan beberapa daerah di Jawa Timur, meskipun ada pengakuan resmi dari agama mereka, kadang-kadang harus melakukan perjalanan untuk mendaftarkan perkawinan atau kelahiran karena pejabat setempat tidak bisa atau tidak mau melaksanakan pencatatan itu. Orang-orang yang memiliki kepercayaan yang bukan merupakan salah satu dari kelima agama resmi itu dan juga orang-orang keturunan Cina mendapat kesulitan memperoleh KTP, yang diperlukan untuk mencatatkan perkawinan, kelahiran, atau perceraian. Beberapa NGO dan kelompok advokasi agama mendesak pemerintah agar menghapuskan butir agama dari KTP (lihat bagian 1.f.).

Laki-laki dan perempuan yang berbeda agama menghadapi kesulitan kalau menikah atau mencatatkan perkawinan mereka. Pemerintah menolak untuk mendaftarkan sebuah perkawinan sebelum upacara keagamaan perkawinan diselenggarakan. Tetapi, sedikit sekali pejabat agama yang bersedia mengambil bagian dalam perkawinan yang melibatkan laki-laki dan perempuan dengan keyakinan yang berbeda. Oleh karena alasan ini, beberapa calon pengantin beralih ke agama pasangan mereka. Lainnya memecahkan

persoalan ini dengan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk menyelenggarakan perkawinan mereka. Pada bulan Juli Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah fatwa yang mempertegas larangan dari tahun 1980 mengenai perkawinan diantara orang-orang yang berbeda kepercayaan. Fatwa MUI berpengaruh tetapi tidak memiliki sanksi hukum.

Pada tanggal 1 September, pengadilan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara terhadap tiga perempuan masing-masing karena berusaha menyebarkan agama dengan mengikut sertakan anak Muslim dalam kegiatan Sekolah Minggu Kristen, meskipun dengan ijin orang tua mereka. Pada tanggal 22 Nopember, ketiga perempuan ini kalah dalam pengajuan naik banding mereka, dan pada akhir tahun pengajuan naik banding mereka ke Mahkamah Agung masih sedang dipertimbangkan.

Pada bulan Nopember seorang warganegara asing dan warganegara Indonesia yang bekerja pada proyek bendungan Madura ditahan dengan tuduhan mencoba mengkorupkan masyarakat Muslim. Hingga akhir tahun kemungkinan penuduhan masih sedang dipertimbangkan.

Sepanjang tahun pemerintah tidak mengambil langkah konkrit untuk melaksanakan peraturan kontroversial dari undang-undang pendidikan yang mengharuskan sekolah-sekolah memberi pendidikan keagamaan kepada murid-murid sesuai kepercayaan masing-masing.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, beberapa partai politik menyarankan amandemen undang-undang dasar untuk melaksanakan hukum syaria di seluruh negara, tetapi kebanyakan anggota DPR dan organisasi sosial Muslim terbesar di Indonesia menentang usul itu. Pada tanggal 28 Maret, Kongres Islam Ketiga Sulawesi Selatan mendesak pemerintah daerah agar melaksanakan hukum syaria di seluruh propinsi itu. Namun, seperti juga tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah tidak menjawab desakan itu.

Di propinsi Aceh, pemerintah meneruskan pelaksanaan pengadilan syaria, yang hanya mendengarkan kasus-kasus yang melibatkan warga Muslim dan tidak memberlakukan hukum pidana tetapi *qanun*, yang dirumuskan oleh pemerintah setempat. Qanun mencakup isu seperti "tingkah laku tak bermoral." Misalnya, hubungan diluar nikah antara laki-laki dan perempuan bisa dihukum dengan penderaan didepan umum atau denda sampai 555 dolar (lima setengah juta rupiah). Qanun lainnya melarang perjudian, dan produksi, distribusi atau konsumsi minuman beralkohol. Seorang warga Muslim yang dibuktikan bersalah minum alkohol bisa didera dengan 40 kali cambukan. Pada tanggal 26 Agustus, penguasa mencambuk satu pasangan muda yang belum menikah sebanyak 45 kali di alun-alun Takengon, Aceh Tengah karena melanggar qanun tingka laku tak bermoral dan konsumsi alkohol selagi berada dalam kendaraan mereka. Pers melaporkan kedua perempuan pingsan akibat cambukan itu. Selama tahun berjalan, sejumlah 52 orang dipukul: 6 karena bersama dengan orang dari sex yang berlawanan dan bukan keluarga, 7 karena konsumsi alkohol, dan 39 karena melakukan perjudian.

Pada tanggal 20 Mei, 60 anggota kantor syaria Banda Aceh, didukung oleh polisi setempat, memberlakukan pemakaian jilbab oleh perempuan Muslim didepan DPR daerah dan sebuah bangunan pemerintah lainnya. Menurut surat kabar *Serambi Indonesia*, ratusan perempuan ditahan sebentar dan di kuliah mengenai syaria.

Dibeberapa kota diluar Aceh, pemimpin setempat juga menerapkan praktek agama Islam yang ketat. Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dua tahun setelah penerapan hukum syaria, bupati mengatakan bahwa 100 persen perempuan mengenakan jilbab. Hukum ini tidak berlaku terhadap warga bukan Muslim dan tidak ditegakkan di daerah yang banyak pengunjung turisnya. Di Padang, Sumatra Barat, walikota menginstruksikan semua perempuan Muslim mengenakan jilbab; pejabat lokal menegakkan instruksi ini.

Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara terhadap beberapa orang karena menghina Islam. Pada bulan Agustus pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun terhadap Yusman Roy karena bersembahyang dalam bahasa Indonesia, yang menurut ulama Muslim dikatakan merusak kemurnian agama Islam yang berasal dari Arab. Pada bulan September sebuah pengadilan Jawa Timur menjatuhkan hukuman penjara terhadap 6 pembimbing pengobatan pecandu narkoba dan penyakit kanker 3 tahun masing-masing karena melanggar syariat Islam. Sebuah fatwa dari MUI setempat melukiskan ajaran rehabilitasi pusat pengobatan mereka sebagai bid'ah. Polisi menahan para pembimbing itu ketika mereka mencoba mempertahankan diri dari ratusan orang yang menyerang pusat pengobatan itu.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Ramadan, banyak pemerintah daerah memerintahkan agar menutup ataupun membatasi jam operasi berbagai jenis tempat hiburan. Misalnya, kotapraja di Kendari, Medan, Palembang dan Pekanbaru memerintahkan penutupan semua diskotek, panti pijat, karaoke, kedai minum dan bar selama bulan Ramadan. Tetapi penguasa mengatakan mereka mengizinkan bar dan karaoke di hotel-hotel yang melayani turis luar negeri tetap buka. Pemerintah di Medan memerintahkan penutupan tempat-tempat seperti itu pada tanggal 24 dan 25 Desember dalam rangka memperingati Hari Natal. Penegakan perintah itu berbeda-beda.

Pelanggaran Sosial dan Diskriminasi

Sering ada usaha untuk menutup greja-greja tidak terdaftar sepanjang tahun. Lewat ancaman dan kadang-kadang kekerasan, FPI dan Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan menutup puluhan tempat beribadah Protestan yang tidak memiliki ijin di Jawa Barat. Polisi tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan penutupan itu, dan dalam kasus tertentu, membantu penutupan itu. Banyak dari gereja-gereja ini dibuka kembali kemudian.

Pada tanggal 15 Juli segerombolan orang dibawah panji bertuliskan "Kelompok Solidaritas Muslim Indonesia" menyerang kompleks Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Bogor, Jawa Barat. Dipersenjatai dengan batu dan tongkat, penyerang merusak bangunan milik Ahmadiyah dan membakar sebuah asrama perempuan, meskipun polisi hadir disana dengan kekuatan yang besar. Serangan ini menyusul serangan pada tanggal 9 Juli yang gagal terhadap properti Ahmadiyah yang sama oleh orang-orang yang terkait dengan FPI. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap orang-orang yang terlibat kedua serangan itu, dan kompleks Ahmadiyah masih merupakan tempat tertutup sampai akhir tahun.

Para penyerang membenarkan aksi mereka dengan merujuk pada fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1980 oleh MUI yang menyatakan golongan Ahmadiyah sebagai penyeleweng dari agama Islam. Fatwa itu, yang diperbaharui pada bulan Agustus, tidak memiliki kekuatan hukum. Kekerasan ini menimbulkan kekhawatiran kemungkinan terjadinya serangan terhadap anggota Ahmadiyah di daerah lainnya. Di Bandung, Jawa Barat, lebih dari seribu pengikut Ahmadiyah minta perlindungan polisi untuk mengamankan dua mesjid mereka di wilayah Cikutra dan Bojongloa. Mereka juga mengurangi kegiatan upacara keagamaan mereka di mesjid. Komnas HAM telah merintis penyelidikan terhadap serangan ke kampus JAI.

Pada tanggal 19 September, di Cianjur, Jawa Barat, segerombolan orang dilaporkan menyerang dan merusak sebuah mesjid Ahmadiyah dan beberapa rumah dan mobil milik anggota Ahmadiyah. Tidak seperti serangan bulan Juli, polisi dilaporkan menahan 45 tersangka dan sedang berusaha mengajukan tuntutan kejahatan terhadap 12 orang yang dituduh sebagai pemimpin komplotan penyerang ini. Tak lama sesudah serangan itu, pemerintah setempat di Kabupaten Cianjur melarang semua kegiatan Ahmadiyah, dengan alasan untuk melindungi anggota Ahmadiyah dari serangan lebih lanjut.

Pada tanggal 21 Oktober, di Sulawesi Tengah, seorang pengendara sepeda motor melepaskan tembakan ke arah sebuah rumah yang digunakan untuk peribadahan sebuah jemaah Kristen; pemilik rumah itu mengalami luka-luka.

Kekerasan yang didorong oleh agama dan tindak main hakim sendiri di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara tidak terjadi sesering tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, di Sulawesi Tengah masih terus terjadi pengeboman, penembakan, dan kekerasan lain secara sporadis, meskipun terdapat dukungan masyarakat yang luas bagi pemulihan keamanan dan rekonsiliasi. Pada tanggal 29 Oktober, tiga gadis sekolah remaja Kristen di pancung di dekat Poso, Sulawesi Tengah. Beberapa hari kemudian, dua gadis remaja, satu Muslim dan lainnya Kristen, ditembak dan tewas disebuah pemberhentian bis di Poso. Pada pekan yang sama, dosen dari universitas di Palu dan istrinya di tembak dan mengalami luka-luka. Pada tanggal 31 Desember, orang tak dikenal mengebom pasar babi dikota Palu menewaskan 7 orang dan melukai lebih dari 50.

Pada bulan Maret, walaupun dicapai persetujuan antara pemimpin Muslim dan Hindu di Bali yang menyerukan agar pengikut mereka menghormati baik perayaan warga Hindu Nyepi dan sembahyang Jumat warga Muslim, beberapa desa melarang warga Muslim meninggalkan rumah untuk melakukan sembahyang Jumat di mesjid, dan mengancam dengan denda apabila melakukan hal itu. MUI setempat di Jimbaran menyerukan kepada warga Muslim untuk keluar dari desa sebelum hari Jumat agar mereka bisa melakukan kewajiban sembahyang Jumat mereka.

Masyarakat keturunan Yahudi kecil sekali. Sabili, sebuah penerbitan Islam yang radikal dan majalah kedua terbesar dari segi oplag di Indonesia, menerbitkan artikel yang mengandung pernyataan dan tema anti-Semit.

Untuk pembahasan yang lebih terperinci lihat *2005 International Religious Freedom Report*.

d. Kebebasan Bergerak Di Dalam Negeri, Berpergian ke Luar Negeri, Emigrasi, dan Repatriasi.

Undang-undang dasar mengizinkan pemerintah mencegah seseorang masuk atau keluar negara, dan kadang-kadang pemerintah membatasi kebebasan pindah. Undang-undang untuk Mengatasi Keadaan Berbahaya memberi kekuasaan luas kepada militer dalam keadaan darurat, termasuk kekuasaan untuk membatasi lalu lintas darat, udara dan laut, tetapi pemerintah tidak menggunakan kekuasaan ini.

Pemerintah terus membatasi kebebasan bergerak bagi warga negara asing melalui sistem "surat jalan," yang perlu untuk Papua. Penegakannya tidak konsisten.

Pada bulan Mei 2003 Megawati, yang ketika itu menjabat sebagai presiden, mengeluarkan dekrit yang mengakhiri undang-undang darurat militer di Aceh dan memberlakukan undang-undang darurat sipil. Dekrit itu mengembalikan keseluruhan wewenang pemerintah di propinsi itu kepada gubernur, tetapi Pemerintah Darurat Sipil Daerah (PDSD) memiliki wewenang untuk memberlakukan langkah darurat untuk mengendalikan perjalanan, perdagangan, pengangkutan, dan kegiatan sipil lainnya. Pemerintah secara resmi mengakhiri keadaan darurat sipil dan PDSD pada tanggal 18 Mei. Menyusul penanda-tanganan MOU, pihak penguasa menarik mundur semua kesatuan TNI yang bukan berasal dari daerah itu dan mengurangi peran TNI menjadi perlindungan terhadap ancaman dari luar saja.

Pemerintah mengendalikan pergerakan penduduk di Aceh melalui penggunaan kartu tanda pengenal nasional yang khusus untuk Aceh. Kartu itu harus ditandatangani oleh komandan militer, kepala polisi dan kepala desa setempat. Rakyat Aceh yang hendak bepergian atau meninggalkan daerah itu harus menunjukkan kartu itu di pos-pos pemeriksaan yang terdapat di sepanjang jalan utama. Jika gagal menunjukkan kartu itu seseorang dapat ditahan. Pada prakteknya rakyat dapat memperoleh kartu itu secara mudah, dan tidak ada bukti bahwa kebijakan itu mengakibatkan terbatasnya pergerakan di Aceh. Mereka yang tinggal di luar Banda Aceh juga perlu meminta surat-jalan dari polisi yang menerangkan tujuan dan lamanya perjalanan disamping menyebutkan nama orang-orang yang akan ditemui. Di bawah perjanjian (MOU) yang telah ditandatangani, surat jalan tidak diperlukan lagi dan kartu tanda pengenal yang khusus untuk Aceh bukan merupakan persyaratan yang resmi lagi. Tetapi, dalam prakteknya pemerintah tidak mengeluarkan kartu tanda pengenal yang biasa, dan rakyat Aceh terus menggunakan kartu khusus itu pada akhir tahun.

Hubungan antara warga Madura dan pribumi Dayak tetap tidak baik. Di Kalimantan Tengah, kekerasan etnis tahun 2001 menyebabkan kurang lebih 130 ribu warga etnik Madura mengungsi, terutama ke pulau Madura dan Jawa Timur. Menurut Oxfam dan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, antara 30 sampai 87 ribu warga Madura telah kembali ke Kalimantan Tengah. Sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah menetapkan warga Madura yang kembali ke daerah itu dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis dengan anggota masyarakat sekitarnya; di akui dan di terima oleh penduduk pribumi serta masyarakat lokal; serta mematuhi nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi budaya lokal. Peraturan ini juga mewajibkan mereka yang kembali untuk mendaftar pada pemerintah setempat, tetapi hanya mereka yang memiliki kartu identitas diri, rumah, dan lapangan pekerjaan yang tetap boleh melakukan hal itu. Kota Sambas di Kalimantan Barat masih tetap tertutup bagi bekas penduduk asal Madura.

Pemerintah mencegah paling sedikit 600 orang meninggalkan negara selama tahun itu. Kantor Kejaksaan Agung dan kantor kejaksaan tinggi mencegah kebanyakan keberangkatan itu. Beberapa dari mereka yang dilarang meninggalkan negara adalah pembayar pajak yang ingkar, orang yang dijatuhi hukuman atau didakwa, dan orang yang terlibat dalam sengketa hukum.

Pada bulan Juni 2004 pemerintah mengusir Sidney Jones, direktur Indonesia untuk NGO internasional International Crisis Group. Pada bulan Juli Jones kembali serta meneruskan pekerjaannya di Indonesia. Ia kemudian meninggalkan Indonesia secara sukarela dan untuk waktu sebentar ia dilarang memasuki Indonesia pada bulan Nopember, tetapi pembatasan ini di cabut beberapa hari kemudian.

Pada bulan Januari, sebulan setelah bencana-alam tsunami melanda, pihak penguasa di Aceh menahan sebentar atau minta agar pergi, sekurang-kurangnya lima wartawan asing. Pada tanggal 7 Januari, tentara minta Martin Chulov dan Renee Nowytager dari surat kabar *The Australian* untuk pergi. Pada tanggal 23 Januari, penguasa mengatakan wartawan free-lance William Nessen melanggar larangan yang dikenakan terhadap dirinya pada bulan Agustus 2003 dan mengusirnya dari Aceh. Pada bulan Maret pemerintah melarang Dr. Erward Aspinall, seorang dosen di Universitas Sydney dan seorang pakar Indonesia, memasuki Indonesia. Namanya masuk daftar-hitam. Pada tanggal 8 September, unit anti-teror polisi di Maluku menahan Rohan Kumar Gunaratna, seorang professor yang tinggal di Singapura dan ahli terorisme, karena tidak bisa menunjukkan surat yang mengijinkannya mengadakan riset terhadap sel-sel teroris di Propinsi Maluku. Penguasa menuduh Gunaratna melanggar peraturan imigrasi dan mendeportasi dirinya.

Undang-undang dasar melarang pengasingan secara paksa, dan pemerintah tidak menggunakan ketentuan itu.

Pengungsi Dalam Negeri

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan, terdapat 977,395 pengungsi dalam negeri (IDPs) dan dari jumlah itu 561,478 berada di Aceh, hampir semuanya akibat bencana tsunami pada bulan Desember 2004. Beberapa IDP dari Aceh tinggal dalam penampungan darurat, sementara lainnya menumpang pada keluarga atau bergabung dengan masyarakat setempat. Pemerintah menangani berbagai aspek dari krisis ini, tetapi masih bergantung pada organisasi internasional dan donor untuk membantu pemenuhan sebagian besar kebutuhan pengungsi ini. Pengungsi memiliki tiga opsi: kembali ketempat asal mereka, mulai hidup baru di lokasi sekarang dengan bantuan pemerintah, atau melakukan relokasi ke bagian lainnya dari Aceh apabila kembali ketempat asal tidak dimungkinkan.

Perlindungan Pengungsi

Undang-undang tidak mengatur pemberian suaka atau status pengungsi sesuai Konvensi PBB 1951 berkenaan dengan Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967, dan pemerintah tidak melembagakan sebuah sistem yang memberi perlindungan kepada para pengungsi. Tetapi, dalam prakteknya, tidak ada laporan mengenai pemulangan orang secara paksa ke sebuah negara dimana mereka terancam penganiayaan. Pemerintah bekerjasama dengan Komisararis Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), yang mempunyai kantor perwakilan di Jakarta, untuk membantu pengungsi atau pencari perlindungan suaka. Hingga akhir tahun di Indonesia terdapat 89 pengungsi yang diakui PBB dan 58 pencari suaka. Beberapa adalah pemohon suaka, lainnya adalah anggota keluarga mereka. Kebanyakan berasal dari Irak, Afghanistan, atau Sri Lanka. Selama tahun itu UNHCR mengalihkan perhatian utamanya dari bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka ini ke bantuan untuk korban tsunami. Tetapi badan PBB itu juga membantu pemukiman kembali 75 pengungsi.

Angka di atas tidak termasuk kira-kira 28 ribu bekas pengungsi dari Timor Timur yang tinggal di Timor Barat akhir tahun itu, menurut UNHCR dan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana serta IDPs Management Secretariat. Pada tahun 2003 pemerintah dan UNHCR menyatakan bahwa rakyat Timor Timur yang berada di Timor Barat tidak lagi dianggap sebagai pengungsi, dan pada tanggal 31 Desember, UNHCR mengakhiri program bantuan enam tahun di Timor Barat.

Bagian 3 Menghormati Hak-hak Politik: Hak Warganegara untuk Mengubah Pemerintah Mereka

Undang-undang memberi hak kepada warganegara untuk mengubah pemerintah mereka secara damai, dan warganegara menggunakan hak mereka itu melalui pemilihan secara periodik, bebas dan adil yang diadakan atas dasar hak-pilih untuk semua.

Undang-undang dasar menetapkan pemilihan-umum setiap lima tahun. TNI kehilangan hak memiliki kursi di DPR sejak bulan Oktober 2004 dengan pelantikan badan legislatif yang baru. Anggota DPR juga menjadi anggota MPR, yang sampai bulan Oktober 2004 juga mencakup wakil-wakil daerah dan yang ditunjuk pemerintah. Pada bulan Oktober 2004 MPR menjadi sebuah badan yang sepenuhnya dipilih rakyat dan terdiri dari 550 anggota DPR (50 kursi ditambah menyusul diberlakukannya sebuah undang-undang tahun 2003) dan ke 128 anggota dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik

Pengamat dalam negeri dan internasional memonitor pemilihan umum yang pertama, yang berlangsung secara damai dan langsung untuk memilih wakil-wakil pada tingkat propinsi dan kabupaten yang dimulai pada bulan Juni. Pada akhir tahun pemerintah telah menyelenggarakan 149 pemilihan lokal: 7 gubernur, 26 walikota, dan 116 bupati. Pengamat umumnya menilai pemilihan lokal berjalan dengan bebas dan adil, dan, dengan beberapa kekecualian, tanpa insiden yang mempengaruhi hasilnya.

Kebanyakan tindak kekerasan yang terjadi melibatkan para pendukung calon yang kalah, yang menyerang kantor pemilihan setempat. Sebuah kerusuhan meletus di Kabupaten Kaur, propinsi Bengkulu, dimana pendukung dari calon yang kalah membakar gedung pemerintah dan umum. Di Depok, Jawa Barat, sebuah keputusan pengadilan Jawa Barat yang kontroversial membatalkan hasil pemilihan walikota. Sebuah penyelidikan terhadap keputusan pengadilan itu menunjukkan adanya ketidak beresan dan disarankan agar sanksi diberlakukan terhadap hakim. Pada bulan Desember Mahkamah Agung membatalkan keputusan pengadilan tinggi Jawa Barat itu. Pihak yang kalah bermaksud untuk mengajukan naik banding, dan alasannya, menurut undang-undang pemilihan keputusan pengadilan tinggi merupakan keputusan akhir. Pada akhir tahun walikota yang baru masih belum dilantik.

Pada bulan Oktober 2004 Presiden Yudhoyono menjadi kepala negara pertama yang dipilih secara langsung. Peninjau dalam negeri dan luar negeri memantau pemilihan-umum dewan perwakilan rakyat dan presiden, yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan yang independen, dan dinilai pemilihan berjalan dengan bebas dan adil. Pemilihan nasional itu diikuti oleh tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, tidak ada kekerasan yang menyolok, dan rakyat banyak menerima hasilnya.

Semua warganegara dewasa berhak memilih kecuali narapidana yang menjalani hukuman penjara lima tahun atau lebih, orang yang menderita sakit mental, serta orang-orang yang hak pilihnya dicabut oleh keputusan pengadilan dan tidak dapat diubah lagi. Bekas anggota Partai Komunis Indonesia yang dilarang, diijinkan memberikan suara, dan, menyusul keputusan Pengadilan Konstitusional bulan Nopember 2004, mereka juga boleh mencalonkan diri.

Tidak ada pembatasan hukum terhadap peran perempuan dalam politik. Sebagai perempuan, Megawati Soekarnoputri menjabat presiden dari bulan Juli 2001 hingga Oktober 2004. Pada tahun itu perempuan menduduki 4 dari 36 kursi kabinet. Undang-undang pemilihan yang kini berlaku memuat seruan yang tidak mengikat agar partai memilih perempuan untuk paling sedikit 30 persen dari lowongan calon dari partai mereka. Dalam pemilihan tahun 2004, 61 perempuan terpilih menduduki kursi DPR yang seluruhnya berjumlah 550, ini merupakan peningkatan dari 1999 ketika 44 perempuan menduduki kursi DPR dari keseluruhan 500 kursi. Di DPD, terdapat 27 wakil perempuan dari keseluruhan kursi sebanyak 128 buah. Perempuan memenangkan dua jabatan bupati dalam pemilihan lokal.

Tidak ada pembatasan hukum mengenai peran minoritas dalam politik. Tidak ada statistik resmi mengenai latar-belakang etnis anggota DPR. Kabinet Presiden Yudhoyono kebanyakan terdiri dari orang suku Jawa, dan lainnya adalah Sunda, Bugis, Batak, Aceh, Papua, Bali, Arab, atau Cina.

Di Papua pemerintah menerapkan undang-undang otonomi khusus, yang antara lain, menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh dari industri tambang di wilayah itu untuk dikembalikan kepada pemerintah propinsi dan kabupaten serta digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan proyek pra-sarana yang ditujukan untuk kesejahteraan penduduk asli. Undang-undang otonomi khusus juga mengatur pembentukan Majelis Masyarakat Papua yang akan memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan, perumusan undang-undang, dan pengangkatan yang mempengaruhi penduduk asli Papua, serta akan mulai bekerja pada tanggal 11 Nopember. Meskipun demikian, ketidak puasan besar dengan kebijakan pemerintah pusat masih tetap ada. Ribuan warga Papua ikut serta dalam demonstrasi anti-pemerintah pada tanggal 12 Agustus.

Pembentukan oleh pemerintah pusat sebuah propinsi baru, Irian Jaya Barat, yang diambil dari Papua lewat kondisi politik dan hukum yang kontroversial, masih tetap menjadi sumber pertikaian. Sebuah keputusan pengadilan konstitusional pada bulan Nopember 2004 menetapkan bahwa sementara pembentukan Irian Jaya Barat tidak sah, propinsi itu masih bisa berfungsi karena lembaga-lembaganya sudah terbentuk. Pada tanggal 24 Nopember, pejabat pemerintah pusat dan propinsi dilaporkan menyepakati bahwa kedua propinsi itu akan berfungsi sebagai sebuah kesatuan budaya, ekonomi, dan sosial, dan pemisahannya

semata-mata bersifat administratif; tetapi pada akhir tahun masalah ini masih dibicarakan dikalangan pemerintahan pusat dan propinsi serta Majelis Masyarakat Papua.

Korupsi dan Transparansi Pemerintah

Terdapat anggapan luas di dalam dan luar negeri bahwa korupsi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam 100 hari yang pertama menjabat sebagai Presiden, Presiden menyatakan bahwa pembrantasan korupsi merupakan salah satu sasarannya, dan ia kemudian membentuk Komisi Pembrantasan Korupsi dengan wewenang penyelidikan yang luas. Kantor Kejaksaan Agung memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang besar. Dalam tahun itu pemerintah melakukan penuntutan kasus korupsi terhadap 2 gubernur, termasuk gubernur Aceh Abdullah Puteh, yang kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum 10 tahun penjara. Pemerintah juga menuntut dan menjatuhkan hukuman terhadap empat anggota dari Komisi Pemilihan Umum termasuk Ketua Nazaruddin Syamsuddin dan Komisaris Mulyana Kusumah, karena praktek korupsi terkait dengan pembelian oleh KPU. Pemerintah juga mulai menuntut mantan menteri agama Said Aqil Hussein Munawar karena penyelewengan dana dan menahan staf Mahkamah Agung karena menerima sogokan (lihat bagian 1.e.).

Kecuali di Aceh, AJI melaporkan tidak ada masalah mendapatkan dokumen resmi yang tidak dirahasiakan dari pemerintah.

Bagian 4 Sikap Pemerintah Sehubungan Penyelidikan Internasional dan Non-pemerintah Terhadap Tuduhan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pemerintah bertemu dengan NGO lokal, menjawab pertanyaan mereka, dan mengambil beberapa langkah untuk menjawab keprihatinan NGO. Ketika aktivis HAM yang terkenal, Munir, dibunuh pada tahun 2004, presiden bertemu dengan koalisi orang-orang yang prihatin dengan nasib Munir dan membentuk tim pencari fakta (TPF) yang terdiri dari anggota masyarakat NGO yang terkemuka, penuntut, dan seorang perwira polisi senior. Tetapi, pada akhir tahun, presiden belum merilis laporan TPF, yang menurut laporan pers, menyerukan penyelidikan terhadap pejabat Badan Intelijen Negara baik yang masih aktif maupun mantan sehubungan dengan pembunuhan Munir (lihat bagian 1.a.). Presiden juga bertemu dengan organisasi-organisasi keagamaan untuk membicarakan keprihatinan mereka sehubungan dengan penutupan greja dengan paksa, dan memerintahkan menteri agama untuk meninjau kembali dekrit bersama para menteri yang mengharuskan rumah ibadah memperoleh persetujuan masyarakat dulu sebelum dibangun (lihat bagian 2.c.). Pada akhir tahun dekrit bersama para menteri yang diubah belum dirilis.

Organisasi HAM dalam negeri dilaporkan mengalami pengawasan, ancaman, dan campurtangan dari pemerintah; tetapi, mereka secara aktif melakukan advokasi bagi peningkatan kinerja HAM pemerintah. Sebelum keputusan pengadilan dijatuhkan dalam peradilan Pollycarpus (lihat bagian 1.a.), Komnas HAM melaporkan sejak tahun 2000, 14 aktivis HAM dibunuh, dan belum ada pelaku yang diajukan kemeja hijau. Tak ada laporan mengenai pembunuhan aktivis HAM selama tahun itu.

Seorang aktivis terkemuka, anggota TPF yang menyelidiki kematian Munir, serta juga istri Munir, dilaporkan menerima berbagai ancaman pembunuhan dari orang yang tidak dikenal.

NGO di Papua melaporkan pengawasan yang meluas oleh pejabat intelijen dan juga ancaman serta intimidasi. Aktivis melaporkan bahwa pejabat intelijen secara sembunyi-sembunyi mengambil foto mereka, dan kadang-kadang menyanai teman-teman dan anggota keluarga mereka seputar keberadaan dan kegiatan mereka.

Di Aceh terjadi peningkatan besar dari NGO internasional dan dalam negeri untuk membantu pemberian pertolongan dan pekerjaan rekonstruksi menyusul bencana gempa bumi dan tsunami bulan Desember 2004. Tidak ada laporan mengenai campur tangan pemerintah; tetapi, kebanyakan NGO internasional dan lokal melaporkan mereka tidak menyelenggarakan pekerjaan yang berkaitan dengan HAM di Aceh, karena khawatir kehilangan ijin untuk tinggal di wilayah itu.

Pemerintah pada umumnya menganggap penyelidikan dari luar atau kritik dari luar negeri terhadap catatan HAM nya sebagai campurtangan dalam urusan dalam negeri. Pasukan keamanan dan badan intelijen cenderung mencurigai organisasi HAM luar negeri, khususnya yang beroperasi di wilayah yang dilanda konflik. Pihak pemerintah yang memonitor warga asing terlihat terjadi di wilayah konflik. Beberapa

organisasi HAM dalam negeri mengutarakan keprihatinan mereka tentang kemungkinan konsekuensi negatif akibat berhubungan dengan warga asing.

Sejumlah lembaga pemerintah dan badan-badan terkait membicarakan masalah HAM, termasuk disini Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, Kementerian pemberdayaan perempuan, serta Komnas HAM. Tetapi pada tahun 2003, usaha Komnas HAM untuk mengekspose pelanggaran HAM dan mengajukan pelakunya untuk bertanggung jawab di hambat oleh sejumlah keputusan pengadilan seputar masalah yurisdiksi atau kewenangan. Misalnya, pada bulan Juni 2003, sebuah pengadilan di Jakarta menolak mengeluarkan surat perintah menghadap pengadilan terhadap perwira militer baik yang aktif maupun mantan, yang sebelumnya tidak menghiraukan panggilan Komnas HAM untuk ditanyai mengenai kerusuhan tahun 1998, yang menewaskan lebih dari 1200 jiwa. Pada bulan Juni TNI menyatakan fihaknya tidak bisa bekerja sama dengan usaha Komnas HAM untuk memanggil para jenderal baik yang aktif maupun purnawirawan untuk menjawab pertanyaan mengenai penculikan aktivis pro-demokrasi antara tahun 1997 dan 1998. TNI bersikeras bahwa Komnas HAM harus memperoleh ijin dari DPR sebelum bisa memanggil jenderal baik yang aktif maupun purnawirawan untuk ditanyai. (lihat bagian 1.b.). Menurut undang-undang pelanggaran HAM yang parah yang terjadi sebelum tahun 2000 hanya bisa diselidiki oleh pengadilan HAM ad-hoc, dan bukan oleh Komnas HAM. Pengadilan seperti itu hanya bisa dibentuk berdasarkan usulan DPR, tetapi agar DPR memiliki informasi yang cukup mengenai insiden itu guna menyetujui pembentukan pengadilan semacam itu, sebuah penyelidikan yang menyeluruh dibutuhkan. Kemacetan yang terjadi terus berlangsung dan menghambat kemajuan untuk memperoleh pertanggungjawaban.

Pada tahun itu pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan, bekerja sama dengan Timor Timur, sebuah Komisi Kebenaran dan Persahabatan bilateral (lihat bagian 1.e.).

Bagian 5 Diskriminasi, Pelanggaran Sosial, dan Perdagangan Manusia

Undang-undang dasar tidak secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan gender, suku, cacad tubuh, bahasa, atau status sosial. UUD menjamin hak yang sama untuk setiap warganegara, baik pribumi maupun keturunan asing. Tetapi, dalam prakteknya, pemerintah gagal membela hak-hak ini secara memadai.

Perempuan

Undang-undang melarang pelanggaran domestik dan bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap perempuan. Tetapi, pemerkosaan dan kekerasan rumah tangga merupakan permasalahan.

Kekerasan terhadap perempuan sangat sedikit dokumentasinya. Angka-angka dari seluruh negara tidak tersedia. NGO Mitra Perempuan melaporkan pusat penanganan krisis perempuan mencatat 329 kasus di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, dan pers setempat melaporkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Di Jawa Timur, insiden kekerasan terhadap perempuan meningkat baik dari segi jumlahnya maupun dari segi parahnya. Pusat pelayanan terintegrasi Jawa Timur melaporkan 63 kejadian. Kebanyakan NGO di Jawa Timur yang menangani isu-isu perempuan dan anak yakin angkanya jauh lebih tinggi, mengingat bahwa kebanyakan korban memilih untuk diam saja. Dalam tahun itu tiga kasus diselidiki berdasarkan undang-undang kekerasan domestik tahun 2004; tetapi tidak ada penuntutan sampai akhir tahun. Dua jenis pusat krisis tersedia untuk perempuan yang mengalami pelanggaran: pusat yang dikelola pemerintah di rumah sakit, dan pusat NGO di masyarakat.

Pemeriksaan merupakan permasalahan. Meskipun perbuatan itu diancam hukuman 4 sampai 12 tahun penjara, dan pemerintah memenjarakan pelakunya untuk pemerkosaan dan percobaan pemerkosa, kebanyakan pemerkosa yang dijatuhi hukuman di hukum dengan hukuman minimum atau kurang. Angka diseluruh negeri yang bisa dipertanggungjawabkan tidak ada. Definisi menurut hukum dari pemerkosaan sempit dan tidak mengikut sertakan tindak-tandak yang biasanya diperlakukan sebagai perbuatan pemerkosaan di negara-negara lain.

Pemeriksaan oleh anggota pasukan keamanan terjadi di Aceh. Aktivis HAM mengungkapkan keprihatinan bahwa pemerkosaan tidak banyak dilaporkan di propinsi itu, sebagian disebabkan oleh keengganan dari para korban untuk memberi kesaksian. SIRA menuduh personil militer melakukan empat pemerkosaan di Aceh, tetapi tidak ada kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual dilaporkan kepada yang berwajib. Selama tahun itu TNI tidak mengajukan tuntutan anggotanya karena melakukan pemerkosaan.

Diseluruh negeri, polisi mengoperasikan lebih dari 200 “ruang pelayanan khusus” atau “women’s desk” dimana anggota polisi perempuan menerima laporan kejahatan dari korban perempuan dan anak mengenai pelanggaran seksual atau perdagangan manusia, dan dimana para korban memperoleh perlindungan sementara. Dalam tahun itu polisi telah membuka sebuah pusat rehabilitasi korban perdagangan manusia di sebuah rumah sakit polisi di Jakarta, dan sebuah pusat yang mirip lainnya di Surabaya.

Kebijakan negara dan undang-undang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak, kewajiban serta peluang yang sama dengan laki-laki. Tetapi, hukum juga menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pembangunan tidak boleh bertentangan dengan peran mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pendidikan dari generasi yang lebih muda. Undang-undang perkawinan menunjuk laki-laki sebagai kepala keluarga. Perempuan di banyak daerah, khususnya di Papua, mengeluh mengenai perlakuan yang berbeda didasarkan pada gender.

Diferensiasi hukum antara perempuan dan gadis tidak jelas. Undang-undang menetapkan usia minimum untuk menikah 16 tahun untuk perempuan (dan 19 untuk laki-laki), tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang dibawah usia 18 dianggap anak-anak. Seorang gadis yang menikah punya status dewasa. Gadis-gadis sering menikah sebelum mencapai usia 16, khususnya di daerah pedesaan.

Female genital mutilation (FGM) atau pemotongan kemaluan perempuan, juga dikenal sebagai penyunatan perempuan, dipraktikkan di beberapa bagian dari Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Komplikasi akibat hal ini dilaporkan minimal. Dua jenis profesi, bidan dan dukun tradisional, menyelenggarakan hal ini. Peneliti mengatakan prosedur yang dilakukan bidan meliputi penyobekan, pemotongan, atau penusukan bagian kemaluan tetapi tidak dilakukan pengambilan jaringan. Kebanyakan dukun tradisional, sebaliknya, mengatakan, mereka biasanya mengambil jaringan, tetapi sejauh mana pengambilan dilakukan tidak jelas. Juga tidak jelas apakah jaringan yang diambil itu berasal dari klitoris, labia minora, atau tempat lain. Beberapa aktivis NGO membantah terjadi pemotongan, katanya upacara ini sebagaimana di praktikkan di negeri ini bersifat simbolik.

Pelacuran tidak secara khusus diatur dalam undang-undang. Tetapi banyak pejabat menginterpretasikan “kejahatan terhadap kepatutan/moralitas” berlaku terhadap pelacuran. Pelacuran anak-anak melanggar hukum. Meskipun pelacuran bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama, praktek pelacuran meluas dan ditolerir. Pasukan keamanan dilaporkan ikut serta dalam mengoperasikan rumah pelacuran atau menyediakan perlindungan sehingga kebal dari penuntutan hukum. Turisme seks internasional juga diselenggarakan, terutama di pulau Batam dan Karimun, keduanya didekat Singapura.

Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, pelecehan seksual merupakan pelanggaran hukum dan bisa dikenakan tindakan dibawah Hukum Pidana. Pada tahun 2004 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengatakan 90 persen perempuan dan 25 persen laki-laki telah jadi korban pelecehan seksual ditempat kerja.

Perceraian boleh dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Warga Muslim yang berniat bercerai umumnya menghubungi pengadilan syaria sebagai cara yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan pengadilan negara. Akibat sikap dan penilaian subyektif, perempuan acapkali menghadapi beban pembuktian yang lebih besar dibandingkan laki-laki, khususnya dalam pengadilan syaria. Meskipun baik pengadilan Islam maupun negara dua-duanya mempertimbangkan pemberian tunjangan alimoni, banyak yang tidak menerima tunjangan, karena tidak ada sistem yang menegakkan peraturan seperti itu. Laki-laki maupun perempuan memisahkan harta mereka sebelum pernikahan. Apabila tidak ada persetujuan pembagian harta sebelum pernikahan (prenuptial agreement) maka harta yang dimiliki bersama dibagi dua. Undang-undang mensyaratkan seorang perempuan yang bercerai harus menunggu untuk jangka waktu tertentu sebelum bisa menikah kembali; seorang lelaki bisa segera menikah kembali.

Undang-undang menetapkan kewarganegaraan anak diturunkan semata-mata dari ayahnya. Anak-anak dari ibu berkewarganegaraan Indonesia dan ayah asing dianggap warga asing dan harus memiliki visa agar bisa tinggal di dalam negeri sampai usia 18 tahun, saat mereka bisa mengajukan permohonan jadi warganegara. Anak-anak ini dilarang masuk sekolah negeri. Dalam kasus dimana seorang ibu warganegara tinggal diluar negeri dengan suaminya warga asing, perceraian bisa melibatkan masalah pemeliharaan atau keikutsertaan anak (custody). Anak-anak dari perempuan luar negeri yang menikah dengan laki-laki warganegara juga menimbulkan kesulitan. Seorang perempuan luar negeri yang menikah dengan seorang laki-laki warganegara bisa memperoleh kewarganegaraan setelah satu tahun.

Sepanjang tahun itu pemerintah meneruskan penerapan syariah di Aceh (lihat bagian 2.c.). Pengaruh yang paling nyata terhadap hak-hak perempuan adalah penegakan aturan berpakaian. Setelah mengeluarkan dua peringatan pada perempuan mengenai pelanggaran aturan berpakaian, penguasa akan mengalihkan perkaranya ke pengadilan syariah. Di Banda Aceh polisi menahan sebentar perempuan yang dianggap berpakaian tidak layak di kantor penegakan syariah, dimana perempuan dikuliah mengenai pakaian yang pantas. Pemerintah lokal dan kelompok-kelompok tertentu di daerah lain juga melakukan kampanye konformitas perempuan dengan aturan syariah. Beberapa perempuan mengatakan kepada wartawan bahwa mereka merasa dipermalukan ketika ditahan karena melanggar aturan berpakaian.

Perempuan menghadapi diskriminasi di tempat kerja, baik dari segi perekrutan maupun dari segi pembayaran gaji. Pada tahun 2003, kantor di Jakarta dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan rata-rata pendapatan perempuan 68 persen dari laki-laki. Menurut pemerintah, 41 persen dari semua pegawai negeri adalah perempuan, tetapi perempuan hanya menduduki 7 persen dari jabatan pemerintahan senior.

Beberapa aktivis mengatakan dalam sektor manufaktur, majikan menempatkan perempuan dalam lapangan pekerjaan yang dibayar lebih rendah dan tingkatnya lebih rendah pula. Banyak pekerja pabrik perempuan di rekrut sebagai buruh harian dan bukan sebagai pegawai penuh waktu yang permanen, serta perusahaan tidak diharuskan memberi tunjangan seperti cuti hamil pada pekerja harian. Menurut Biro Pusat Statistik, sepanjang tahun tingkat pengangguran lebih tinggi untuk laki-laki dibandingkan perempuan. Menurut undang-undang, apabila suami dan istri, kedua-duanya bekerja untuk sebuah lembaga pemerintah, maka tunjangan kepala rumah tangga diberikan kepada suami.

Sejumlah organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan atau menangani isu-isu perempuan termasuk Solidaritas Perempuan, Mitra Perempuan, LBH-APIK, dan the International Catholic Migration Commission (ICMC). Selama tahun itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang anti-perdagangan manusia. Kementerian juga mengerjakan isu-isu seperti perlindungan anak, termasuk dari segi perdagangan anak.

Anak-Anak

Pemerintah menyatakan komitmen terhadap hak anak-anak, pendidikan, dan kesejahteraan, tetapi menyediakan sumber daya yang tidak mencukupi untuk memenuhi komitmen tersebut. Dalam prakteknya, kebanyakan sekolah tidak gratis, dan kemiskinan membuat pendidikan tidak tercapai oleh banyak anak. Buruh anak dan pelecehan seksual merupakan masalah serius. Meskipun perempuan dan laki-laki seakan-akan mempunyai peluang pendidikan yang sama, laki-laki punya kemungkinan lebih besar menyelesaikan sekolah. Pada tahun 2003 pemimpin dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan masalah paling mendesak terkait dengan remaja Indonesia adalah: buruh anak, perdagangan anak, pelacuran anak, anak jalanan, anak di daerah konflik, dan anak yang kekurangan gizi. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur eksploitasi ekonomi dan seksual anak-anak dan juga adopsi, perwalian, serta masalah-masalah lain; tetapi beberapa pemerintahan propinsi tidak menegakkan peraturan itu.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tidak ada laporan anak-anak yang dimanfaatkan sebagai perisai manusia atau sebagai pasukan tempur; tetapi seorang anak tewas dalam pertempuran di Aceh (lihat bagian 1.a.).

Berdasarkan hukum, anak-anak harus mengikuti pendidikan enam tahun sekolah dasar, dan tiga tahun sekolah menengah pertama; tetapi, dalam prakteknya, pemerintah tidak menegakkan persyaratan itu. Menurut Survei Sosio-Ekonomi Rumah Tangga Nasional tahun 2004, tingkat pendaftaran sekolah mencapai 96,1 persen untuk anak-anak berusia 7 sampai 12, 79,2 persen untuk anak-anak berusia 13 sampai 15, dan 49,8 persen untuk anak-anak berusia 16 sampai 18.

Uang sekolah bulanan untuk sekolah negeri berbeda-beda dari satu propinsi ke propinsi lainnya dan didasarkan pada pendapatan rata-rata. Beberapa orang tua menemui kesulitan mengirim anaknya ke sekolah. Uang sekolah, transportasi, dan bahan-bahan pelajaran bisa menghabiskan biaya sebesar 400 sampai 700 dolar (4 juta sampai 7 juta rupiah) per tahunnya untuk setiap siswa sekolah dasar dan menengah. Pada bulan Juni ILO menyelenggarakan sebuah survei buruh anak terbatas di lima propinsi (Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan), yang menunjukkan satu dari lima anak usia sekolah dari keluarga berpenghasilan rendah tidak memiliki akses ke pendidikan

dan mengalami berbagai jenis eksploitasi di tempat kerja – baik dalam sektor formal maupun informal. Survei juga menunjukkan bahwa dari 2.438 anak usia sekolah dibawah 15 tahun, 19 persen tidak bersekolah. Tidak jelas berapa banyak anak terpaksa meninggalkan sekolah guna membantu penghidupan keluarga. Di beberapa daerah terpencil di Jawa Timur tidak adanya sekolah di lokasi yang dekat menyebabkan tingkat putus sekolah mencapai 50 persen, dan menyebabkan anak-anak mencari pekerjaan. Di beberapa daerah, orang tua dan kelompok pengamat mengeluh bahwa korupsi dikalangan pegawai negeri menyebabkan merosotnya kualitas pendidikan. Dalam tahun itu tsunami dan pengaruh dari konflik telah mengganggu pendidikan beberapa anak.

Banyak anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat. Kekurangan gizi merupakan masalah yang serius. Tingkat kematian bayi tetap tinggi. Menurut survei demografik dan kesehatan yang diterbitkan pada bulan Desember 2003, ditemukan 35 kematian untuk setiap seribu kelahiran bayi. Ditemukan perbaikan dalam tingkat kematian dibawah usia 5 tahun, tetapi langkanya perbaikan dalam angka kematian bayi telah menyebabkan pemerintah memusatkan perhatiannya pada perawatan kesehatan bayi.

Musim kemarau yang parah memperburuk situasi kekurangan gizi di Nusa Tenggara Timur tahun ini. Jumlah anak-anak yang diperkirakan menderita kekurangan gizi di Nusa Tenggara Timur lebih dari 12 ribu, dan paling sedikit 59 bayi meninggal karena kekurangan gizi yang bersifat akut selama tahun itu.

Pelecehan anak dilarang oleh undang-undang, tetapi usaha pemerintah untuk memeranginya pada umumnya lamban dan tidak efektif. NGO melaporkan bahwa dibutuhkan waktu yang lama untuk mengajukan kasus pemerkosaan anak ke pengadilan dan mekanisme untuk pelaporan dan penanganan pelecehan anak tidak jelas.

Badan Perlindungan Anak Jawa Timur mencatat 389 kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Timur selama tahun itu. Polisi Jawa Timur mencatat 137 kasus kekerasan terhadap anak, dalam kebanyakan kasus, pelakunya adalah orang tua korban.

Eksplorasi seksual anak untuk tujuan komersial masih terus menjadi masalah yang serius. Jumlah pelacur anak di seluruh negeri tidak diketahui; tetapi, sebuah taksiran ILO tahun 2004 memperkirakan ada sekitar 21 ribu pelacur anak di pulau Jawa. Pada tahun 2003 sebuah tim NGO dan pejabat pemerintah mengunjungi sebuah kompleks pelacuran di propinsi Riau dan ditaksir bahwa 30 sampai 40 persen dari ke 365 pekerja seks disana berusia dibawah 18 tahun. Banyak gadis remaja ini di paksa atau mendapatkan diri mereka terperangkap dalam ikatan hutang. Kadang-kadang pejabat penegak hukum memperlakukan pekerja seks anak-anak sebagai penjahat dan bukannya sebagai korban. Aktivistis hak-hak perempuan dan kelompok keagamaan menuduh pemerintah, khususnya polisi dan tentara, mengoperasikan atau melindungi rumah pelacuran yang mempekerjakan pelacur dibawah umur. Pegawai negeri yang korup mengeluarkan kartu identitas untuk gadis dibawah umur, sehingga mempermudah masuknya mereka dalam dunia perdagangan seks. Menurut pejabat biro statistik Jawa Timur, terdapat kira-kira 4 ribu pelacur anak di Jawa Timur, 30 persen dari jumlah pelacur yang terdaftar; ada sekitar 3000 pelacur anak di Jawa Tengah; and 194 dikota Yogyakarta. Juga ada laporan mengenai eksploitasi seksual anak laki-laki. Beberapa NGO melaporkan jaringan pedofil yang aktif beroperasi di Bali, dan pejabat menahan dan mengadili paling sedikit satu laki-laki, warganegara Prancis, untuk kegiatan pedofilia disana.

Dalam tahun itu ada kasus-kasus dimana makelar pemberi kerja membayar orang tua, uang muka dari gaji dimasa depan yang akan diperoleh anak-anak gadis mereka. Anak ini dibebani kewajiban membayar kembali makelar pemberi kerja itu. Peneliti menguraikan “budaya pelacuran” dibagian tertentu dari negeri, dimana orang tua mendesak anak gadis mereka untuk bekerja sebagai pelacur di kota besar dan mengirim hasil perolehannya kerumah.

Para pengamat NGO mengatakan banyak gadis dipaksa masuk dunia pelacuran setelah kegagalan perkawinan yang mereka jalani ketika berusia 10 sampai 14 tahun. Tidak ada pelanggaran nyata dari hukum, karena dokumentasi menunjukkan diri mereka sebagai orang dewasa mengingat mereka pernah menikah.

Buruh anak merupakan masalah. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaporkan ditemukan 4,5 juta buruh anak dalam survei buruh nasional; tetapi, pada tahun 2003 ILO melaporkan 8 juta anak dibawah usia 18 tahun melakukan pekerjaan yang diperuntukkan orang dewasa (lihat bagian 6.d.).

Dalam tahun ini semua pengadilan negeri mempunyai pengadilan anak-anak.

Di Jawa Timur, NGO-NGO lokal melaporkan pemerintah memberikan sedikit perhatian pada hak-hak dari pelanggar anak muda. Di Surabaya pemerintah menahan pelanggar anak muda dalam penjara yang sama seperti penjahat dewasa selama masa peradilan. Hanya ada satu penjara anak-anak di Jawa Timur, lokasinya di Blitar. Sejak bulan Juli, terdapat 107 anak muda di penjara Blitar itu, kebanyakan berasal dari Malang dan Blitar. Kebanyakan tahanan anak muda dari Surabaya ditahan di fasilitas lembaga permasyarakatan untuk orang dewasa di Surabaya. Anak-anak muda ini kadang-kadang mengalami pelecehan selama ditahan. Pada bulan Juli surat kabar lokal melaporkan empat anak muda di daerah Rungkut, Surabaya, menyatakan polisi melukai lutut dan kaki mereka ketika berlangsung interogasi di kantor polisi setempat. Kepala polisi setempat membantah tuduhan itu.

Menurut Departemen Sosial, terdapat 46.800 anak jalanan di 21 propinsi. Sejumlah besar anak jalanan tampak nyata di Jakarta dan propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. Surabaya di Jawa Timur, merupakan tempat asal sekitar 8 ribu anak jalanan, banyak dilaporkan terancam oleh pelecehan seksual dan kekerasan. Sekitar 40 tempat perlindungan di propinsi itu memberikan pelayanan untuk anak-anak itu. Pemerintah Jakarta Kota membuka tempat perlindungan pada tahun 2004 dengan kapasitas kurang lebih 200 anak. Pemerintah meneruskan pendanaan tempat perlindungan lain yang dikelola oleh NGO setempat, dan membayar biaya pendidikan dari beberapa anak jalanan.

Sejumlah NGO mempromosikan hak anak-anak, termasuk Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.

Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia melanggar hukum menurut undang-undang; tetapi, undang-undang tidak menyeluruh sehubungan dengan definisi perdagangan manusia. Selama tahun itu banyak orang diperdagangkan dari, ke, dan di dalam negeri untuk tujuan pelacuran dan kerja paksa, termasuk kasus ikatan hutang. Perdagangan internal merupakan masalah yang signifikan.

Selama tahun itu pemerintah meneruskan penerapan Rencana Aksi Nasional 2002-07 untuk memerangi perdagangan perempuan dan anak-anak. Rencana ini menguraikan peran khusus untuk pemerintah dan masyarakat madani pada tingkat nasional dan daerah, serta termasuk sasaran untuk penyusunan hukum dan penegakannya. Undang-Undang Perlindungan Anak melarang eksploitasi ekonomi dan seksual anak-anak serta juga perdagangan anak. Undang-undang ini memperinci penalti kejahatan yang berat dan hukuman penjara untuk orang-orang yang melanggar hak anak-anak, termasuk perdagangan manusia. Pemerintah dengan bantuan NGO, menyelenggarakan pendidikan masyarakat mengenai perdagangan manusia. Beberapa propinsi dan pemerintahan daerah telah menyusun peraturan anti-perdagangan manusia yang baru dan rencana pelaksanaannya.

Hukum pidana tidak memiliki definisi hukum yang memadai untuk perdagangan manusia. Pusat Solidaritas dan ICMC menunjuk undang-undang yang bisa diterapkan dalam kasus perdagangan manusia dan pelanggaran terkait. Hukum pidana melarang perdagangan perempuan dan anak laki dibawah umur tetapi tidak menyinggung perempuan dibawah umur. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan hukuman penjara antara 3 sampai 15 tahun ditambah denda untuk pelaku perdagangan anak-anak. Dalam banyak kasus yang melibatkan korban dibawah umur, polisi dan penuntut menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, ini merupakan perubahan dari sebelumnya yang lebih mengandalkan pada hukum pidana dengan pedoman hukuman yang lebih lemah. Sebelum tahun 2004 hakim jarang menjatuhkan hukuman pada pelaku perdagangan manusia lebih dari tiga tahun penjara; tetapi selama tahun itu hakim telah menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku perdagangan anak-anak, dan beberapa vonis menghasilkan hukuman lima atau enam tahun penjara.

Angka yang bisa diandalkan tidak tersedia sehubungan dengan jumlah orang yang diperdagangkan. Sebuah studi oleh Pusat Solidaritas dan ICMC menaksir antara 2,4 sampai 3,7 juta perempuan dan anak-anak bekerja dalam bidang pekerjaan yang penuh ancaman dan risiko seperti pekerja migran, pekerja seks, dan pekerja domestik anak-anak (lihat bagian 5, Anak-Anak). Dalam kategori ini taksiran jumlah anak-anak berkisar antara 254 ribu sampai 422 ribu. Ini bukan taksiran korban tetapi taksiran jumlah perempuan dan anak-anak yang terancam oleh perdagangan manusia.

Menurut Pusat Solidaritas Buruh Internasional yang didanai oleh federasi buruh luar negeri, ratusan nelayan Birma, yang dipaksa bekerja di kapal ikan Thai, melarikan diri atau ditinggalkan di Tual, sebuah pulau kecil di propinsi Maluku, dimana mereka hidup dalam kondisi yang sulit. Pada tahun 2004 pejabat imigrasi secara paksa merepatriasi sejumlah nelayan Birma ke Thailand lewat kapal ikan luar negeri. Selama tahun itu Persatuan Pelaut Birma menaksir masih ada lebih dari 100 pelaut Birma yang tinggal dekat Tual tetapi diperkirakan mereka tidak akan direpatriasikan.

Dalam tahun itu pemerintah, NGO, dan media melaporkan bahwa perempuan diperdagangkan ke Malaysia, Jepang, Timur Tengah (termasuk Arab Saudi dan Kuwait), Taiwan, Hongkong, Singapura, dan tujuan lainnya. Malaysia merupakan tujuan bagi perempuan, korban perdagangan manusia, terbesar, dan kasus-kasus mereka didokumentasi secara kredibel. Perempuan yang kemungkinan diperdagangkan ke Indonesia adalah pelacur luar negeri dari Cina, Thailand, Eropa Timur, dan Asia Tengah.

Pada tahun 2004 polisi menyelidiki 141 tersangka pedagang manusia, sementara penuntut telah mengajukan 51 kasus. Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap paling sedikit 45 tersangka, peningkatan dari 25 pada tahun 2003. Hukuman penjara rata-rata untuk pedagang manusia meningkat dari 2,5 tahun menjadi 3,2 tahun, sementara hukuman rata-rata untuk perdagangan manusia yang dihukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak mencapai 5,3 tahun.

Kekurangan bukti, undang-undang yang tidak memadai, kesadaran yang rendah mengenai perdagangan manusia, dan korupsi merupakan hambatan utama dalam menuntut ke pengadilan kasus perdagangan manusia. Misalnya, pada bulan Desember 2004, polisi setempat menahan 6 orang di sebuah rumah pelacuran di Semarang, Jawa Tengah, setelah menerima laporan dari korban perdagangan manusia. Tetapi, tersangka ini dibebaskan karena tidak cukup bukti.

Dalam tahun itu polisi dan pejabat imigrasi melancarkan operasi untuk mengurangi jumlah pelacur luar negeri. Pada tanggal 24 Agustus, Polisi Jakarta menangkap 68 pekerja seks luar negeri dalam serangan ke kelab malam, tempat mandi sauna, dan salon kecantikan. Ke 68 pekerja seks ini kemudian dideportasikan.

Pada tanggal 26 Februari, polisi Surabaya Utara menahan tersangka pedagang manusia setelah menerima laporan dari korban yang melarikan diri dari rumah pelacuran di Surabaya. Sebuah pengadilan Surabaya menghukum pedagang manusia itu, Radji, beberapa bulan penjara. Pada tanggal 15 Maret di Probolinggo, Jawa Timur, polisi menahan seorang tersangka pemimpin sindikat perdagangan manusia yang dituduh telah menjual enam anak untuk dijadikan pelacur di Surabaya; kasus ini masih diselidiki. Pada bulan April polisi Jawa Timur menangkap tiga orang yang dicurigai sebagai pedagang manusia di daerah Bondowoso. Empat gadis dilaporkan menjadi korban mereka.

Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat masih menjadi daerah terkenal dimana perempuan dan remaja etnis Cina yang miskin berusia antara 14 dan 20 direkrut sebagai pengantin "pesanan pos" (mail order) untuk laki-laki, khususnya di Taiwan tapi juga di Hongkong dan Singapura. Dalam beberapa kasus perempuan ini diperdagangkan untuk melakukan pekerjaan seks, dan memberi pelayanan yang mirip dengan kerja seorang budak.

Dalam banyak kasus perdagangan manusia gadis dan perempuan direkrut dengan janji palsu. Salah satu taktik adalah menawarkan perempuan muda di daerah pedesaan pekerjaan sebagai pelayan atau pegawai hotel di wilayah yang jauh jaraknya, termasuk tempat peristirahatan dipulau. Setelah "pegawai" baru ini tiba ditempat baru dan mereka berhutang uang pada perekrut mereka, mereka diberi tahu bahwa mereka dipekerjakan sebagai pelacur. Pada bulan Oktober polisi Jakarta menahan 2 orang karena menipu paling sedikit 51 perempuan dengan janji bekerja di Jepang sebagai "pemeran budaya." Setelah sampai di Jepang, perempuan-perempuan ini di eksploitasi sebagai pelacur. Pada akhir tahun kedua tersangka masih ditahan menunggu peradilan diri mereka.

Banyak korban terancam jadi korban perdagangan manusia selama proses menjadi pekerja migran. Banyak agen perekrut, yang tidak memiliki izin, beroperasi di seluruh negeri, dan terlibat dalam kegiatan perdagangan manusia pada berbagai tingkatan, dan beberapa agen perekrut yang berlisensi pemerintah juga terlibat dalam perdagangan manusia. Agen perekrut acap kali mengenakan uang jasa yang luar biasa besarnya sehingga menyebabkan calon pekerja terperangkap dalam ikatan hutang, dan orang-orang yang direkrut ini bekerja secara ilegal di luar negeri, sehingga menambah kemudahan pekerja ini jadi korban perdagangan manusia dan pelecehan lainnya.

Kursus dasar yang berlangsung tiga bulan yang diberikan kepada semua polisi tidak mengikutsertakan pelatihan pencegahan perdagangan manusia. Selama tahun itu badan internasional terus memberi polisi pelatihan khusus mengenai pencegahan perdagangan manusia. Perdagangan manusia menurun dibawah otorita dari Departemen Penyelidikan Kriminal (CID). Pada tahun 2003 polisi membentuk sebuah unit anti perdagangan manusia yang terpisah di CID dengan tanggung jawab operasional dan koordinasi sendiri.

Pada tahun 2004 markas besar Kepolisian Negara RI mengeluarkan instruksi kepada kepala polisi di daerah untuk membasmi komplotan perdagangan manusia, membantu para korban, melaporkan kasus perdagangan manusia ke markas besar Kepolisian Negara RI.

Sumber yang kredibel mencatat bahwa anggota pasukan keamanan terlibat dalam mendirikan dan melindungi rumah pelacuran. Pedagang manusia dan pemilik rumah pelacuran dilaporkan membayar uang perlindungan kepada anggota pasukan keamanan. Sebuah survei perdagangan manusia oleh NGO di Papua menyimpulkan bahwa anggota militer mengoperasikan dan melindungi rumah pelacuran yang memperkerjakan korban perdagangan manusia. Selain polisi dan tentara, beberapa pejabat pemerintah terlibat dalam penyelenggaraan perdagangan manusia, khususnya dalam penyediaan dokumen-dokumen palsu. Meluasnya dan kemudahan memperoleh kartu identitas nasional yang palsu, yang mencatat anak-anak sebagai orang dewasa, menyumbang pada permasalahan perdagangan manusia. Di masyarakat dan kalangan pemerintahan, masih ada keengganan untuk mengakui bahwa pelacuran merupakan permasalahan yang penting.

NGO dalam negeri, dengan dukungan internasional, memimpin usaha untuk memantau dan mencegah perdagangan manusia, acapkali lewat koordinasi dengan badan pemerintah. NGO ini termasuk Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia, LBH-Apik, Kelompok Bantuan dan Perlindungan Perempuan, Koalisi Perempuan, dan Solidaritas Perempuan.

Pada bulan Januari pemerintah bereaksi cepat terhadap desas-desus mengenai perdagangan anak yatim atau yang terpisah dari orang tua karena bencana gempa bumi dan tsunami bulan Desember 2004 di propinsi Aceh. Pemerintah membatasi perjalanan dari anak dibawah umur Aceh keluar dari Aceh dan keluar negeri, dan menempatkan pemantau polisi di titik-titik keluar. Desas-desus ini terbukti tidak berdasar, dan beberapa kasus korban perdagangan manusia di Aceh muncul pada bulan-bulan sesudah bencana itu terjadi. Para NGO melaporkan beberapa kasus perempuan Aceh yang diperdagangkan dan dibawa ke negara tetangga dalam tahun itu.

Bantuan nasional dan lokal kepada korban perdagangan manusia meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tetapi masih rendah dibandingkan dengan lingkup permasalahannya. Pada umumnya bantuan pemerintah sedikit dan dipusatkan pada warganegara yang diperdagangkan keluar negeri, sementara bantuan untuk korban didalam negeri minimum. Sepanjang tahun pemerintah dan kelompok masyarakat membentuk sejumlah tempat perlindungan di Dumai, propinsi Riau, dan di propinsi Kalimantan Barat. Polisi mengoperasikan lebih dari 200 meja perempuan (women's desk), yakni unit-unit yang dibentuk untuk membantu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan termasuk perdagangan manusia. Meja perempuan menyediakan perlindungan sementara, penanganan khusus oleh polisi, dan jasa hukum untuk para korban. Meja perempuan acapkali bekerja sama dengan NGO setempat untuk menyediakan jasa medis dan psikologis, serta tempat berlindung jangka panjang. Tetapi, rasa tidak percaya pada polisi membuat beberapa korban enggan memanfaatkan meja perempuan ini.

Kebijakan pemerintah adalah "memperlakukan orang-orang yang diperdagangkan tidak sebagai penjahat tetapi sebagai korban yang membutuhkan bantuan dan perlindungan." Selama tahun itu Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan mempertegas pemberlakuan kebijakan ini dalam pertemuan umum dan program pelatihan untuk polisi dan pejabat lainnya. Tetapi pemerintahan di daerah dan praktek polisi berbeda-beda, khususnya pada tingkat bawah dari aparat penegak hukum. Pemerintah daerah yang memiliki wewenang lebih besar lewat program desentralisasi, kadang-kadang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang cenderung memperlakukan pekerja seks yang diperdagangkan sebagai kriminal, menyalahi kebijakan nasional. Dalam banyak kasus, pejabat pemerintah dan polisi secara aktif melindungi dan membantu para korban. Dalam kasus lainnya, polisi memperlakukan korban, seperti misalnya pelacur yang diperdagangkan, sebagai kriminal, dan memasukkan mereka kedalam tahanan, serta mengambil keuntungan dari situasi mereka yang lemah seperti minta sogokan atau pelayanan seks. Polisi dan pejabat imigrasi secara teratur menangkap pelacur luar negeri dan dengan cepat mendeportasikan mereka tanpa suatu penelaahan apakah mereka merupakan korban perdagangan manusia. Media dan pejabat tingkat bawah, termasuk

polisi, acapkali gagal melindungi identitas korban, dan biasanya menyebar luaskan nama-nama korban pada masyarakat umum.

Pemerintah mendorong para korban untuk membantu penyelidikan dan penuntutan kemeja hijau para pedagang manusia itu, tetapi korban acapkali segan atau menolak untuk memberikan kesaksian karena rasa malu dan khawatir akan terjadi pembalasan terhadap diri mereka dan keluarga mereka.

Orang Cacat

Pemerintah mengklasifikasikan orang cacat kedalam empat kategori: tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan tuna daksa. Undang-undang dasar mengharuskan pemerintah menyediakan untuk mereka pelayanan, tetapi "pelayanan" disini tidak di definisikan, dan penyediaan pendidikan untuk anak-anak cacat bukan merupakan pelayanan yang diilhami oleh persyaratan itu. Undang-undang juga mengharuskan adanya akses ke fasilitas umum untuk orang cacat; tetapi pemerintah tidak menegakkan peraturan ini. Hanya sedikit bangunan, dan boleh dikatakan hampir semua fasilitas transportasi tidak menyediakan akses semacam itu. Undang-undang mengharuskan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 pekerja, menyisihkan 1 persen dari jabatan-jabatan perusahaan untuk orang cacat. Tetapi pemerintah tidak menegakkan undang-undang ini, dan orang-orang cacat menghadapi diskriminasi yang berarti.

Statistik terakhir mengenai orang cacat tidak tersedia. Pada tahun 2004 Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) menaksir 10 persen populasi, atau sekitar 20 juta orang menderita cacat.

Di daerah perkotaan hanya sedikit bis kota yang menyediakan akses kursi roda, dan banyak dari bis yang memiliki alat pengangkat hidrolik, telah rusak alatnya, sehingga tidak bisa dipergunakan.

Pada tahun 2003 pemerintah menyatakan bahwa diseluruh negeri terdapat 1,3 juta anak cacat, tetapi hanya 50 ribu yang bersekolah. Jumlah sebenarnya dari anak cacat diperkirakan jauh lebih tinggi. Undang-undang memberi anak cacat hak memperoleh pendidikan dan pengobatan rehabilitasi. Seorang pejabat pemerintah mengatakan banyak orang tua cenderung menahan anak cacat mereka dirumah, tetapi pada kenyataannya banyak sekolah menolak untuk menerima anak-anak ini, dan alasannya mereka tidak memiliki sumber daya untuk menampung mereka. Menurut pemerintah terdapat 1.234 sekolah yang mengkhususkan diri dalam pendidikan anak cacat; 960 diantaranya di kelola pihak swasta. Beberapa orang muda yang cacat terpaksa mengemis untuk menyambung hidup mereka.

Aktivis HAM di Surabaya melaporkan diskriminasi terhadap orang cacat hadir dalam sektor tenaga kerja dan pendidikan. Misalnya, pada bulan Nopember 2004 pemerintah kota Surabaya menolak seorang calon pegawai negeri dengan alasan bahwa ia tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Pada bulan Mei Pengadilan Administrasi Surabaya memutuskan untuk memenangkan dirinya. Pejabat kota mengajukan naik banding ke Mahkamah Agung, dan pada akhir tahun naik banding ini masih dipertimbangkan.

Minoritas Nasional/Ras/Etnis

Pemerintah secara resmi menggalakkan toleransi ras dan etnis. Kelompok etnis Cina berkisar 3 persen dari populasi, merupakan kelompok minoritas non-pribumi terbesar, dan memainkan peranan utama dalam ekonomi. Kasus diskriminasi dan gangguan terhadap etnis Cina berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa reformasi meningkatkan kebebasan beragama dan kebudayaan. Tetapi, beberapa etnis Cina mencatat bahwa pegawai negeri masih tetap melakukan diskriminasi dalam hal pengeluaran surat perkawinan dan jasa-jasa lainnya, serta acapkali minta sogokan untuk pengeluaran surat bukti kewarganegaraan, meskipun sertifikat semacam itu tidak lagi disyaratkan oleh hukum. Pada tahun 2004 seorang advokat pengacara untuk hak warga etnis Cina mencatat bahwa lebih dari 60 pasal dalam undang-undang, peraturan, atau dekrit pada dasarnya mendiskriminasikan warga etnis Cina. NGO-NGO seperti Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan pasal-pasal itu.

Tidak ada laporan mengenai diskriminasi nyata terhadap warga Aceh yang tinggal diluar propinsi Aceh. Tetapi beberapa warga Aceh melaporkan mereka menghadapi pemeriksaan tambahan ketika mereka hendak meninggalkan Indonesia, dan merasa terhina karena mereka di lengkapi dengan kartu identitas yang berbeda. MOU yang ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus (lihat bagian 1.a.) termasuk peraturan yang mengharuskan warga Aceh diberi kartu identitas biasa pada bulan April 2006.

Rakyat Pribumi

Pemerintah menganggap semua warganegara sebagai "pribumi," dengan kekecualian warga etnis Cina; tetapi pemerintah mengakui keberadaan beberapa "masyarakat terpencil" dan hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik dan sosial. Masyarakat ini termasuk sejumlah suku Dayak di Kalimantan, keluarga yang hidup sebagai pengembara di laut, dan 312 kelompok penduduk asli yang resmi diakui di Papua. Dalam tahun itu rakyat penduduk asli, terutama di Papua, masih mengalami diskriminasi secara luas, dan hanya sedikit perbaikan yang terjadi sehubungan dengan hak-hak tradisional mereka atas tanah. Kegiatan pertambangan dan penebangan kayu, banyak diantaranya ilegal, menciptakan permasalahan sosial, ekonomi, dan logistik yang signifikan untuk masyarakat penduduk asli ini. Pemerintah gagal mencegah perusahaan domestik dan multi-nasional, yang acapkali berkolusi dengan militer dan polisi setempat, melanggar hak atas tanah milik penduduk asli ini.

Di Papua ketegangan terus berlangsung antara penduduk asli Papua dan transmigran dari propinsi lain, antara penduduk pesisir dan masyarakat pedalaman, dan diantara berbagai suku. Beberapa orang dari kalangan masyarakat penduduk asli menuduh pendatang melakukan penipuan harga dan merendahkan mereka, sementara pendatang menuduh bahwa penduduk asli Papua memperlakukan mereka dengan kemarahan dan kecurigaan.

Di Kalimantan Tengah, hubungan antara penduduk asli Dayak dan transmigran etnis Madura masih buruk setelah kekerasan antar etnis pada tahun 2001. Tetapi, paling sedikit antara 30 ribu sampai 57 ribu penduduk etnis Madura yang melarikan diri telah kembali ke Kalimantan Tengah pada akhir tahun. Meski terdapat ketegangan antar etnis, pemilihan setempat berjalan dengan tertib dan relatif damai. Hubungan antara kedua kelompok masih buruk di Kalimantan Barat, dimana bekas penduduk keturunan Madura dihalangi ketika berusaha menguasai kembali rumah dan tanah mereka.

Pada bulan Pebruari Komisi HAM di Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa polisi telah melakukan pelanggaran HAM yang parah pada tahun 2003 ketika mereka menembaki petani dan penduduk setempat yang berusaha menguasai kembali tanah yang disewakan oleh pemerintah kepada London Sumatra Company; empat orang tewas dan lebih dari sepuluh mengalami luka-luka.

Aktivis HAM mengatakan program transmigrasi yang disponsori pemerintah melanggar hak penduduk asli, menuai kemarahan sosial, serta menimbulkan eksploitasi dan degradasi sumber daya alam yang sangat di butuhkan dan diandalkan oleh penduduk asli untuk kehidupan mereka. Di beberapa daerah, seperti sebahagian dari Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Aceh, dan Papua, hubungan antara transmigran dan penduduk asli buruk.

Pelanggaran Sosial dan Diskriminasi Lainnya

Ada beberapa diskriminasi sosial terhadap penderita HIV/AIDS. Beberapa orang diperlakukan dengan kecurigaan di pusat medis, menyaksikan hasil uji laboratorium mereka yang bersifat rahasia disebar luaskan, atau identitas mereka di publikasikan dalam surat kabar. Dalam kebanyakan, malahan barangkali semua kasus, pemerintah gagal mengambil langkah koreksi. Di Papua dimana kasus infeksi HIV lebih tinggi dari daerah lain, anggota masyarakat dan juga keluarga mereka men-stigmatisasikan dan mengucilkan mereka yang diketahui mengidap virus itu. Tetapi pemerintah menyerukan toleransi, dan mengambil langkah untuk mencegah infeksi baru, serta membuat rencana untuk mensubsidi obat-obat anti retroviral.

Bagian 6 Hak Pekerja

a. Hak Berserikat

Undang-undang memberi hak-hak yang luas kepada perserikatan pekerja, dan pekerja menggunakan hak-hak ini. Undang-undang membolehkan pekerja membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang mereka pilih tanpa perlu otorisasi atau persyaratan yang berlebihan, dan dalam prakteknya hal itu dilakukan para pekerja. Undang-undang mengatur bahwa 10 atau lebih pekerja punya hak untuk membentuk serikat pekerja, dengan keanggotaan yang terbuka untuk semua pekerja, lepas dari latar belakang afiliasi politik, agama, etnis, atau gender mereka. Pekerja di sektor swasta lewat undang-undang dijamin bebas membentuk organisasi pekerja tanpa otorisasi sebelumnya, dan serikat pekerja boleh menyusun sendiri

anggaran dasar dan peraturan mereka, serta memilih wakil-wakil mereka. Pemerintah sekedar mencatat, dan bukan menyetujui, pembentukan sebuah serikat, federasi, atau konfederasi, dan memberi organisasi itu nomor registrasi. Sesuai dengan undang-undang, 87 federasi serikat pekerja memberitahu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai keberadaan mereka dan memperoleh nomor registrasi. Pejabat Departemen mengatakan bahwa hanya 64 federasi yang dicatat oleh Departemen memiliki nomor registrasi yang bisa di verifikasi. Sebagian besar anggota serikat pekerja adalah anggota dari tiga konfederasi serikat pekerja: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Sebagai tambahan, lebih dari 18 ribu unit pada level tempat kerja terdaftar pada departemen tenaga kerja.

Menurut pemerintah, tenaga kerja Indonesia terdiri dari sekitar 110 juta pekerja, 42 persen diantaranya bekerja di sektor pertanian dan kehutanan. Dari bulan April sampai September, departemen tenaga kerja menyelenggarakan survei keanggotaan serikat pekerja, hasilnya menunjukkan pengurangan signifikan dari anggota serikat dibandingkan dengan taksiran sebelumnya. Dimasa lalu, pemerintah mengandalkan statistik yang dilaporkan sendiri oleh serikat. Departemen Tenaga Kerja menaksir keanggotaan serikat pekerja mencapai 3,4 juta pekerja, kurang dari 4 persen dari seluruh korps tenaga kerja. Tetapi, kalau dibandingkan dengan 23,8 juta pegawai sektor formal (sebuah kategori yang tidak memasukkan pegawai independen, majikan, pekerja biasa, dan pekerja tak dibayar), keanggotaan serikat mencapai sekitar 14 persen.

Undang-undang mengakui hak pegawai negeri untuk berserikat dan hak untuk berorganisasi, dan pegawai beberapa departemen membentuk asosiasi pegawai; organisasi serikat berusaha untuk mengorganisir pegawai-pegawai ini. Serikat juga berusaha mengorganisir pegawai perusahaan milik negara, meskipun mereka menghadapi tentangan dari pihak manajemen, dan basis hukum untuk mendaftarkan serikat di perusahaan milik negara masih tidak jelas.

Undang-undang membolehkan pemerintah untuk mengajukan petisi ke pengadilan untuk membubarkan sebuah serikat apabila hal itu bertentangan dengan ideologi negara Pancasila atau UUD, atau apabila pemimpin serikat atau anggotanya, dengan membawa nama serikat, melakukan kejahatan yang mengancam keamanan negara dan sebagai akibatnya dijatuhi hukuman paling sedikit lima tahun penjara. Setelah serikat itu dibubarkan maka pemimpin dan anggotanya tidak boleh membentuk serikat lain selama paling sedikit tiga tahun. Tak ada laporan mengenai pembubaran serikat selama tahun itu.

Undang-undang melarang diskriminasi anti serikat oleh majikan dan lainnya terhadap pengelola serikat dan anggotanya serta menjatuhkan denda apabila ketentuan ini dilanggar; tetapi pemerintah tidak secara efektif menegakkan hukum ini dalam banyak kasus. Sering terdapat laporan yang kredibel bahwa terjadi pembalasan oleh majikan terhadap pengelola serikat, termasuk pemecatan dan kekerasan yang dalam prakteknya tidak dicegah secara efektif atau di perbaiki situasinya. Beberapa majikan memperingatkan para pegawainya agar tidak berhubungan dengan pengelola serikat. Beberapa serikat menuduh bahwa pemimpin pemogokan kerja di sasarkan untuk dipecat kalau terjadi penciptaan tenaga kerja. Persyaratan hukum ada yang mengharuskan majikan menerima kembali pekerja yang dipecat karena kegiatan serikat, meskipun dalam banyak kasus pemerintah tidak menegakkan hal ini secara efektif.

Dalam tahun itu the International Union of Food Workers Association (IUF) menuduh manajemen sebuah perkebunan gula memecat Daud Sukamto, ketua dari serikat independen Federation of Sugar Plantation and Mill Workers (FSPM TG) yang berafiliasi dengan IUF, menyusul pembentukan FSPM TG pada bulan Pebruari, dan juga mengancam serikat. Pejabat kantor tenaga kerja di Lampung mendukung pemecatan itu berdasarkan penolakan terhadap usulan penggajian perusahaan. Pejabat kemudian menarik pengakuan legal terhadap serikat itu. Pada bulan Oktober menteri tenaga kerja memberitahu serikat bahwa serikat harus melakukan pendaftaran ulang dan minta FSPM TG menarik keluhannya pada ILO. Kantor tenaga kerja daerah secara resmi mendaftarkan serikat pada tanggal 26 Oktober.

Pada bulan April pekerja di perusahaan keamanan swasta di Jakarta, Group4/Securicor melakukan pemogokan sehubungan rencana perusahaan untuk mengurangi tunjangan untuk pegawai menyusul merger perusahaan itu. Menurut organisasi pendukung buruh dan yang didanai dari luar negeri, Center for International Labor Solidarity, pada tanggal 30 Mei, polisi Jakarta menanyai dan melakukan intimidasi terhadap empat pemimpin serikat. Polisi dilaporkan mengatakan bahwa mereka menyelidiki pemimpin serikat sehubungan kemungkinan tuduhan pencemaran nama dan minta mereka menunjuk pekerja lain dari foto-foto yang dibuat pada sebuah unjuk rasa serikat pada bulan April. Perusahaan memutuskan ikatan kerja 200 pegawai dan menolak menerima mereka kembali meskipun keputusan dari pejabat tenaga kerja

setempat yang menyatakan bahwa pemogokan itu sah serta pemogok harus di pekerjaan kembali. Pada bulan Oktober sebuah komite penyelesaian pertikaian buruh memutuskan pemberian dua bulan gaji untuk para pegawai itu. Pada akhir tahun para pegawai itu belum menerima kompensasi moneter.

Pemimpin serikat lokal Ahmad Fauzi, dari KSBSI, menyelesaikan hukuman penjara 11 bulan pada bulan Agustus. Pada tahun 2004 sebuah pengadilan di Batam menyatakan Fauzi bersalah mencuri dan menjatuhkan hukuman penjara. Pernyataan bersalah ini menyusul sebuah kampanye serikat di PT Batam Expressindo Shipyard. Menurut Pusat Solidaritas, Fauzi menolak tuduhan perusahaan yang menurut laporan adalah seputar pencurian aluminium bekas bernilai 8 dolar. KSBSI menuduh bahwa langkah hukum terhadap Fauzi oleh perusahaan merupakan pembalasan terhadap dirinya karena kegiatannya di serikat pekerja.

Sambil menunggu penyelenggaraan Undang-Undang Penyelesaian Sengketa tahun 2004 dan sistem peradilan buruh yang baru, komite penyelesaian sengketa buruh nasional meneruskan peradilan tuduhan diskriminasi anti-serikat. Keputusan komite bisa diajukan naik banding ke pengadilan administrasi negara. Tetapi karena memiliki riwayat keputusan yang merugikan buruh dan waktu yang lama untuk memproses kasus naik banding ini, kadang-kadang membutuhkan waktu bertahun-tahun, banyak serikat berpendapat komite ini bukan pilihan yang realistis untuk menyelesaikan sengketa. Akibatnya, pekerja acap kali mengajukan keluhan mereka langsung ke Komnas HAM, DPR atau NGO. Keputusan administratif yang memenangkan pekerja yang dipecat biasanya berbentuk ganti rugi moneter tetapi jarang mempekerjakan kembali pekerja itu. Undang-undang mensyaratkan majikan harus memperoleh persetujuan dari komite penyelesaian sengketa buruh sebelum memecat seorang pekerja, tetapi majikan acap kali tidak menghiraukan undang-undang dalam prakteknya.

b. Hak untuk Berorganisasi dan Berunding secara Kolektif

Undang-undang mengizinkan serikat untuk menyelenggarakan kegiatan mereka tanpa gangguan; pemerintah acap kali tidak melindungi hak ini dalam praktek. Undang-undang mengizinkan perundingan kolektif dan mengizinkan organisasi pekerja yang terdaftar pada pemerintah untuk membuat persetujuan buruh kolektif (CLA) yang mengikat secara hukum dengan majikan dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi serikat pekerja lainnya. Didalam undang-undang ini juga termasuk pembatasan terhadap perundingan kolektif, termasuk keharusan bahwa sebuah serikat atau beberapa serikat mewakili lebih dari 50 persen korps tenaga kerja perusahaan untuk merundingkan sebuah CLA.

Undang-undang Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Undang-Undang Tenaga Kerja) yang mengatur perundingan kolektif, hak menyelenggarakan pemogokan kerja, dan kondisi pekerjaan umum tidak berlaku untuk perusahaan milik negara. Meskipun undang-undang ini ditulis dengan bantuan teknis dari ILO, beberapa serikat menuduh bahwa undang-undang ini tidak memuat tunjangan pemutusan hubungan kerja yang memadai dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang; dan tidak membatasi secara memadai terhadap ancaman outsourcing (pemindahan lapangan kerja) dan penggunaan anak dibawah umur. Pemerintah meneruskan usaha ini dengan mengumumkan dekret pelaksanaan undang-undang tenaga kerja.

Pada bulan Januari Presiden menyetujui Undang Undang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industri yang bersama dengan Undang-Undang Serikat Buruh tahun 2000 dan Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 merupakan dasar hukum baru untuk hubungan industri dan hak-hak pekerja. Undang-Undang Penyelesaian Sengketa menguraikan sebuah sistem pengadilan buruh tripartite yang baru, menggantikan komite tripartite yang lama. Undang-undang ini juga menguraikan prosedur penyelesaian lewat mediasi dan arbitrase. ILO menyediakan bantuan bagi penyusunan undang-undangnya. Pemerintah tidak membentuk sistem pengadilan buruh yang baru pada akhir tahun.

Menurut departemen tenaga kerja, selama tahun itu ada 9146 persetujuan kolektif buruh (CLA) antara serikat dan perusahaan swasta. Peraturan perusahaan, yang diijinkan dibawah peraturan pemerintah, menggantikan CLA di 36.459 perusahaan lainnya, banyak diantaranya tidak memiliki perwakilan serikat pekerja. Undang-Undang Tenaga Kerja mensyaratkan majikan dan pekerja membentuk komite bersama majikan/pekerja di perusahaan yang memiliki pekerja 50 atau lebih, sebuah langkah untuk melembagakan komunikasi dan pengembangan konsensus. Tetapi jumlah lembaga seperti itu tidak bertambah secara signifikan setelah diloloskannya undang-undang itu.

Semua pekerja, baik yang menjadi anggota serikat maupun tidak, memiliki hak untuk melakukan pemogokan kerja, kecuali pekerja di sektor umum dan mereka yang terlibat dalam kegiatan yang menyangkut keamanan masyarakat. Undang-undang memperbolehkan pekerja jenis terakhir melaksanakan pemogokan kerja apabila diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat atau membahayakan keamanan masyarakat. Pekerja sektor swasta menggunakan hak mereka untuk mogok kerja, dan juga pegawai perusahaan milik negara, meskipun yang terakhir melakukannya lebih jarang. Majoritas pemogokan yang dicatat oleh pemerintah melibatkan pekerja yang tidak berserikat. Serikat atau wakil-wakil pekerja harus memberikan pemberitahuan tujuh hari sebelumnya kalau merencanakan mogok kerja. Undang-undang menyerukan agar dilakukan mediasi oleh pejabat kantor tenaga kerja lokal tetapi tidak dibutuhkan persetujuan pemerintah kalau bermaksud mengadakan pemogokan. Pada tahun-tahun sebelumnya, pekerja dan majikan jarang mematuhi prosedur penyelesaian sengketa, dan pekerja jarang memberi pemberitahuan resmi mengenai rencana pemogokan karena prosedur departemen tenaga kerja lambat dan tidak memiliki kredibilitas dikalangan pekerja. Diloloskannya Undang-Undang Tenaga Kerja pada tahun 2003 tidak secara signifikan mengubah situasi ini. Jumlah pemogokan yang dicatat pemerintah menurun dalam tahun-tahun terakhir, dari 220 pemogokan yang melibatkan lebih dari 97 ribu pekerja di tahun 2002 menjadi 125 pemogokan yang melibatkan 53 ribu pekerja di tahun 2004.

Pembayaran yang tidak memadai atau sama sekali tidak dibayar untuk ganti rugi yang secara hukum diharuskan untuk paket pemutusan hubungan kerja, menyebabkan terjadinya pemogokan dan unjuk rasa buruh. Pusat Solidaritas mendokumentasi kasus-kasus dimana majikan luar negeri dari industri pakaian dan sepatu, yang terancam oleh pesanan yang menurun dan penutupan pabrik, melarikan diri dari Indonesia guna menghindari dari kewajiban membayar ganti rugi pemutusan hubungan kerja itu.

Aktivis buruh juga melaporkan manajer pabrik di beberapa lokasi menyewa tukang pukul untuk mengintimidasi dan menyerang anggota serikat pekerja yang berusaha mengorganisir pemogokan kerja yang sah. Kadang-kadang polisi campur tangan secara tidak pantas dan dengan kekuatan fisik dalam masalah buruh, biasanya untuk melindungi kepentingan majikan. Pada bulan April Polri memberlakukan pedoman baru untuk "menangani tertib hukum dalam sengketa industrial," yang dikembangkan dengan bantuan ILO.

Pada tanggal 20 Juli, personil keamanan dan polisi bentrok dengan pekerja yang memprotes pemecatan di dua perusahaan, PT Pan United dan IMES, di Batam. Menurut pernyataan bersama dari 3 serikat buruh, kekerasan menyebabkan 26 pekerja luka-luka dan banyak sepeda motor milik pekerja yang berunjuk rasa mengalami kerusakan.

Manajemen dari perkebunan kelapa sawit di propinsi Riau, PT Musim Mas, memecat sekitar 700 pekerja karena mengadakan pemogokan, penguasa menahan 6 pejabat serikat dan anggota berkaitan dengan pemogokan itu. Pemogokan berlangsung menyusul pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan terhadap 9 pemimpin serikat. Pada tanggal 15 September, pihak keamanan perusahaan dilaporkan menabrakkan sebuah truk ke arah sekelompok pekerja yang sedang mogok kerja diluar pabrik, melukai dua diantaranya.

Tidak ada hukum khusus atau pengecualian dari undang-undang buruh di zona pengolahan ekspor (EPZ). Tetapi pengamat dari kalangan non-pemerintah, termasuk Pusat Solidaritas, mengutarakan adanya sentimen dan aksi anti-serikat yang lebih kuat dikalangan majikan di EPZ.

c. Larangan Kerja Paksa atau Kerja Wajib

Undang-undang melarang kerja paksa atau kerja wajib, termasuk oleh anak-anak; tetapi ada laporan bahwa praktek-praktek semacam itu masih terjadi (lihat bagian 5).

Pemerintah mentolerir bentuk-bentuk kerja wajib yang dipraktekkan dalam proses perekrutan pekerja migran. Praktek jahat dari agen perekrutan pekerja migran, dan penegakan hukum yang buruk terhadap peraturan pemerintah ini menjurus pada ikatan hutang dan pengurangan yang tidak sah dan panjang. Menurut laporan pers dan penelitian oleh Pusat Solidaritas, agen-agen perekrut acapkali menahan pekerja migran di pusat penampungan sebelum mengirim mereka keluar negeri. Sementara disana, pekerja migran biasanya tidak menerima gaji, dan perekrut acapkali tidak mengijinkan mereka meninggalkan pusat itu. Dalam kebanyakan kejadian, pekerja dipaksa membayar perekrut untuk biaya tinggal mereka yang dipaksakan, yang menyebabkan hutang besar pada perekrut. Polisi dan pejabat departemen tenaga kerja

melakukan penggrebekan terhadap 14 pusat penampungan pekerja migran di Jakarta dari bulan Desember 2004 sampai Januari, dan sasarannya adalah pusat penampungan yang tidak memiliki ijin, yang secara paksa menahan calon pekerja perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, beberapa diantaranya dalam kondisi yang memilukan. Serangan ini berhasil membebaskan 1.227 perempuan dan gadis, dan penahanan 10 tersangka. Penggrebekan polisi lainnya pada bulan Oktober berhasil membebaskan 565 pekerja perempuan dan menahan 10 orang menurut departemen tenaga kerja.

Kerja paksa dan wajib oleh anak-anak juga terjadi (lihat bagian 6.d.).

d. Larangan Kerja oleh Anak dan Usia Minimum untuk Bekerja

Undang-undang melarang anak-anak bekerja dalam sektor yang berbahaya dan jenis terburuk dari mempekerjakan buruh anak adalah pertambangan, penyelaman, konstruksi, pelacuran, dan bekerja di platform pengolahan ikan lepas pantai. Tetapi pemerintah tidak menegakkan hukum ini secara efektif. Undang-undang, peraturan, dan praktek mengakui bahwa ada anak-anak yang harus bekerja untuk melengkapi pendapatan keluarga. Undang-Undang Tenaga Kerja melarang mempekerjakan anak, yang didefinisikan sebagai orang dibawah usia 18 tahun, dengan pengecualian mereka yang berusia 13 sampai 15 tahun boleh bekerja tidak lebih dari 3 jam per hari dan hanya dibawah sejumlah kondisi, seperti ijin dari orang tua, tidak bekerja selama jam sekolah, dan pembayaran gaji yang sah. Undang-undang tampaknya tidak mengatur anak-anak usia 16 dan 17 tahun.

Undang-undang mencakup masalah eksploitasi ekonomi dan seksual, termasuk pelacuran anak, perdagangan anak, dan dilibatkannya anak dalam perdagangan narkoba, dan terdapat penalti kriminal yang berat dan hukuman penjara untuk orang-orang yang melanggar hak anak. Dalam tahun itu pemerintah mengadili sejumlah kecil kasus yang diatur oleh undang-undang ini.

Pemerintah memiliki sebuah rencana nasional untuk membasmi bentuk terburuk dari penggunaan buruh anak, dan juga sebuah rencana nasional terpisah untuk memerangi perdagangan anak dan melenyapkan eksploitasi seksual anak untuk tujuan komersial.

Buruh anak masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Ditaksir enam sampai delapan juta anak bekerja melewati batas kerja tiga jam per hari, bekerja di bidang pertanian, penjaja dijalan, pertambangan, konstruksi, pelacuran, dan bidang pekerjaan lain. Lebih banyak anak bekerja dalam sektor informal ketimbang formal. Beberapa anak bekerja di pabrik-pabrik besar, tetapi jumlahnya tidak diketahui, sebahagian besar hal ini disebabkan karena dokumen yang menyatakan umur seseorang bisa dipalsukan dengan mudah. Anak-anak bekerja dalam industri seperti mebel rotan dan kayu, pakaian, sepatu, pengolahan makanan dan pembuatan mainan, juga dalam operasi pertambangan skala kecil. Banyak gadis berusia antara 14 dan 16 bekerja sebagai pembantu rumah tangga. ILO menaksir bahwa dari sekitar 2,6 juta pekerja domestik di Indonesia, paling sedikit 688 ribu diantaranya adalah anak. Menurut laporan Human Rights Watch bulan Juni, anak-anak yang berusia antara 12 dan 15 tahun bekerja 14 sampai 18 jam per hari, 7 hari per minggu mulai dari jam 4 pagi sampai 10 malam pada majikan yang acapkali mengancam mereka secara fisik dan seksual. Banyak pembantu rumah tangga anak tidak diperbolehkan belajar dan dipaksa bekerja berjam-jam, digaji rendah, dan pada umumnya tidak tahu mengenai hak-hak yang mereka miliki.

Undang-undang dan peraturan melarang kerja budak terhadap anak-anak; tetapi pemerintah tidak efektif dalam menghapuskan kerja paksa terhadap anak, yang tetap merupakan permasalahan yang serius. Sejumlah besar anak-anak bekerja berlawanan dengan kehendak mereka dalam pelacuran, pornografi, mengemis, perdagangan narkoba, pelayan domestik, dan situasi eksploitatif lainnya, termasuk sejumlah kecil di platform pengolahan ikan (lihat bagian 5).

Hambatan sosial dan budaya merupakan tentangan dalam menghadapi permasalahan buruh anak. Banyak orang tua tidak setuju dengan usaha pemerintah untuk membatasi anak-anak bekerja, dan alasannya, pemerintah tidak menawarkan dukungan ekonomi yang cukup untuk menjamin kesejahteraan keluarga-keluarga ini.

Penegakan undang-undang buruh anak sebagian besar masih tidak efektif. Meskipun ada langkah-langkah perundang-undangan dan penyusunan peraturan, kebanyakan anak yang bekerja, termasuk sebagai pembantu domestik, melakukan hal ini dalam suatu lingkungan yang tidak ada regulasi nya. Bukti anekdot

menunjukkan bahwa pejabat tenaga kerja setempat hanya melakukan sedikit sekali penyelidikan terhadap masalah buruh anak.

e. Kondisi Kerja Yang Memadai

Penguasa propinsi dan kabupaten, bukan pemerintah pusat yang menetapkan gaji minimum, yang bisa berbeda dari satu propinsi, kabupaten, atau sektor, ke propinsi, kabupaten atau sektor lainnya. Pejabat propinsi menentukan tingkat gaji minimum propinsi berdasarkan usulan oleh komisi gaji propinsi tiga pihak (tripartite – pekerja, majikan, dan pemerintah). Tingkat gaji minimum propinsi merupakan dasar dari gaji minimum yang berlaku dalam propinsi itu. Kabupaten menetapkan gaji minimum kabupaten berdasarkan tingkat propinsi sebagai patokan. Kabupaten juga menetapkan gaji minimum di beberapa sektor industri berdasarkan sebuah basis adhoc. Propinsi dan kabupaten menyelenggarakan perundingan gaji minimum tahunan, yang acapkali menimbulkan kontroversi dan protes.

Tingkat gaji minimum yang ditetapkan oleh kebanyakan pemerintah daerah tidak memberikan pekerja dan keluarganya sebuah standar kehidupan yang layak. Kebanyakan tingkat gaji minimum propinsi jatuh dibawah perhitungan pemerintah mengenai kebutuhan minimum mendasar. Selama tahun itu Jakarta menawarkan gaji minimum tertinggi sekitar 71 dolar (710 ribu rupiah) per bulan, sementara departemen tenaga kerja melaporkan gaji minimum resmi sebesar 34 dolar (340 ribu rupiah) per bulan di sebuah daerah tertentu. Pada bulan Desember kebanyakan pemerintahan propinsi memutuskan untuk menaikkan gaji minimum sebesar 15 persen atau lebih dan berlaku mulai bulan Januari 2006. Menyusul keputusan itu pekerja di Medan, Surabaya, Jakarta dan tempat-tempat lain melakukan demonstrasi memprotes tingkat gaji minimum, yang menurut mereka masih berada dibawah standar biaya hidup minimum yang ditetapkan pemerintah. Majikan beralasan, bahwa meningkatkan tingkat gaji, disamping faktor-faktor lainnya, akan membuat pekerja Indonesia kurang mampu bersaing secara internasional dan membatasi pertumbuhan lapangan kerja.

Pejabat tenaga kerja setempat bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan gaji minimum. Penegakan masih tidak memadai, khususnya di perusahaan kecil dan di sektor informal. Dalam prakteknya, tingkat gaji minimum resmi yang diterapkan terhadap sektor formal, mencapai 35 persen dari seluruh korps tenaga kerja.

Undang-undang buruh dan peraturan menteri menyediakan pekerja dengan berbagai tunjangan. Orang yang bekerja di fasilitas yang lebih modern acapkali memperoleh tunjangan kesehatan, makan, dan transportasi. Undang-undang juga mengharuskan majikan mendaftarkan pekerja serta membayar kontribusi pada badan asuransi milik pemerintah JAMSOSTEK. Pada akhir tahun, perusahaan-perusahaan telah mendaftarkan 26 juta pekerja, menurut catatan JAMSOSTEK.

Undang-undang menetapkan kerja selama seminggu sebanyak 40 jam, dengan 30 menit istirahat untuk setiap 4 jam kerja. Perusahaan acapkali mengharuskan satu minggu kerja selama 5 ½ sampai 6 hari. Undang-undang juga mensyaratkan paling sedikit satu hari libur setiap minggu. Tingkat balas jasa lembur per hari diperhitungkan 1 ½ kali dari tingkat balas jasa normal untuk jam pertama dan 2 kali per jamnya untuk lembur tambahan, dengan maksimum 3 jam lembur per hari, dan tidak lebih dari 14 jam per minggunya. Pekerja di industri yang menghasilkan barang eceran untuk ekspor acapkali bekerja lembur untuk memenuhi kuota kontrak. Serikat mengeluh bahwa perusahaan mengandalkan lembur yang berlebihan di beberapa pabrik assembling elektronik, yang mengancam kesehatan dan keamanan pekerja. Kepatuhan pada undang-undang yang mengatur tunjangan dan standar perburuhan berbeda menurut sektor dan wilayah. Pelanggaran oleh majikan terhadap persyaratan legal sangat umum terjadi, sehingga menyebabkan berbagai pemogokan dan protes. Pada bulan Mei sekitar 2500 pekerja dari Katexindo Citra Mandiri di Jakarta Utara menduduki pabrik guna memprotes peningkatan kuota per jam dari potongan garment yang harus dihasilkan, dari 60 potong menjadi 85 potong perjam. Pekerja melukiskan kuota itu sebagai berlebihan dan melanggar standar kerja sukarela yang di kehendaki oleh pembeli internasional garment perusahaan itu. Departemen Tenaga Kerja meneruskan usaha mendesak majikan untuk mematuhi hukum; tetapi penegakan oleh pemerintah dan pengawasan terhadap standar perburuhan lemah.

Baik undang-undang maupun peraturan mengatur standar minimum untuk kesehatan dan keamanan industrial. Dalam prakteknya, catatan keamanan pekerja Indonesia buruk. Sebagaimana di tunjukkan oleh laporan pers, JAMSOSTEK mencatat terjadi 49,148 kecelakaan ditempat kerja untuk tengah tahun pertama, dan 95.418 seluruhnya ditahun 2004. Pejabat lokal memiliki tanggung jawab untuk menegakkan standar kesehatan dan keamanan.

Di perusahaan besar, kualitas dari program kesehatan dan keamanan tempat kerja sangat berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Standar kesehatan dan keamanan di perusahaan lebih kecil dan di sektor informal lebih lemah atau sama sekali tidak ada. Pekerja diwajibkan melaporkan kondisi kerja yang berbahaya, dan majikan dilarang oleh undang-undang melakukan pembalasan terhadap mereka yang melaporkan kondisi kerja berbahaya; tetapi, undang-undangnya tidak ditegakkan secara efektif.